

Rencana Strategis & Rencana Kerja Tahun 2020-2024

Bawaslu Kabupaten Karanganyar



RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KERJA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG**

BAWASLU

RENSTRA BAWASLU

PROVINSI JAWA TENGAH

2020-2024

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur serta berkat rahmat tuhan yang Maha Kuasa, Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024 dapat diwujudkan. Renstra Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020- 2024 merupakan penjabaran dan tindak lanjut pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Sebagaimana diketahui bahwa setiap Kementerian/Lembaga dan jajaran teknisnya dalam pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajibannya pada setiap kurun waktu 5 (lima) tahunan wajib memiliki pedoman/panduan sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu berupa Renstra Kementerian/Lembaga. Bawaslu telah diberi kewenangan untuk membentuk Pengawas Pemilu secara permanen hingga tingkat Kabupaten/Kota sesuai Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Dalam Renstra Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024 ini Bawaslu telah mencoba menyempurnakan konsep, sasaran, indikator, serta target yang lebih mendetail dari Renstra sebelumnya, dan diharapkan dapat menjadi pedoman utama bagi Bawaslu Kabupaten/Kota dalam menjalankan tugasnya sebagai Pengawas Pemilu.

Demikian Renstra Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024 ini disusun, semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya untuk kelancaran serta keberhasilan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dalam berupaya melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan dalam mengawal dan mengawasi Proses Penyelenggaraan Pemilu selama 5 tahun ke depan.

Semarang, 10 Agustus 2021

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH**

KETUA,



M. FAJAR SUBHI A.K. ARIF, SH, MH

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI..... ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum..... 1

1.2 Potensi dan Permasalahan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah 40

BAB II VISI, MISI, TUJUAN STRATEGIS, DAN SASARAN STRATEGIS

2.1 Visi 48

2.2 Misi..... 48

2.3 Tujuan Bawaslu 49

2.4 Sasaran Strategis Bawaslu 50

BAB III TARGET KINERJA DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Target Kinerja 53

3.2 Kerangka Pendanaan 71

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan 88

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Jawa Tengah adalah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian tengah pulau Jawa. Menurut tingkat kemiringan lahan di Jawa Tengah, 38% lahan memiliki kemiringan 0-2%, 31% lahan memiliki kemiringan 2-15%, 19% lahan memiliki kemiringan 15-40%, dan sisanya 12% lahan memiliki kemiringan lebih dari 40%. Ibu kotanya adalah Semarang. Provinsi ini berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat di sebelah barat, Samudra Hindia dan Daerah Istimewa Yogyakarta di sebelah selatan, Jawa Timur di sebelah timur, dan Laut Jawa di sebelah utara. Luas wilayahnya 32.548 km², atau sekitar 28,94% dari luas pulau Jawa. Provinsi Jawa Tengah juga meliputi Pulau Nusakambangan di sebelah selatan (dekat dengan perbatasan Jawa Barat), serta Kepulauan Karimun Jawa di Laut Jawa.

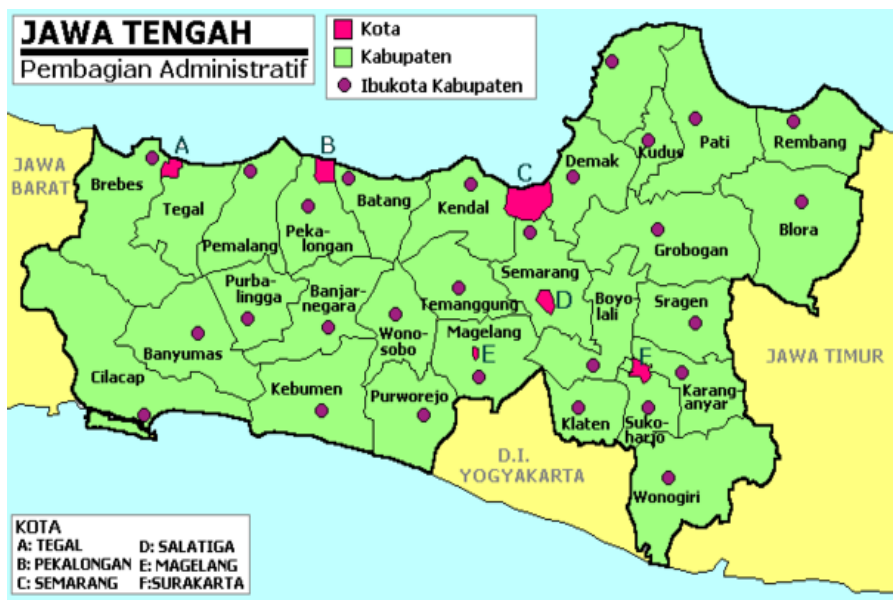
Jawa Tengah terletak koordinat 5o 40' dan 8o 30' Lintang Selatan dan antara 108o 30' dan 111o 30' Bujur Timur (termasuk Kepulauan Karimunjawa). dengan luas wilayah 32.548 km², atau sekitar 25,04% dari luas pulau Jawa. Provinsi Jawa Tengah juga meliputi Pulau Nusakambangan di sebelah selatan (dekat dengan perbatasan Jawa Barat), serta Kepulauan Karimun Jawa di Laut Jawa.

Secara administratif, Provinsi Jawa Tengah terdiri atas 29 kabupaten dan 6 kota. Administrasi pemerintahan kabupaten dan kota ini terdiri atas 545 kecamatan dan 8.490 desa/kelurahan. Sebelum diberlakukannya Undang-undang Nomor 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah, Jawa Tengah juga terdiri atas 3 kota administratif, yaitu Kota Purwokerto, Kota Cilacap, dan Kota Klaten. Namun sejak diberlakukannya Otonomi Daerah tahun 2001 kota-kota administratif tersebut dihapus dan menjadi bagian dalam wilayah kabupaten.

Menyusul otonomi daerah, 3 kabupaten memindahkan pusat pemerintahan ke wilayahnya sendiri, yaitu Kabupaten Magelang (dari Kota Magelang ke Mungkid), Kabupaten Tegal (dari Kota Tegal ke Slawi), serta Kabupaten Pekalongan (dari Kota Pekalongan ke Kajen).

Batas administrasi wilayah Provinsi Jawa Tengah disajikan sebagaimana gambar berikut.

Gambar 1.1 Peta Batas Administrasi Provinsi Jawa Tengah



Luas wilayah Provinsi Jawa Tengah sebesar 32.544,12 km², secara administratif terbagi menjadi 29 kabupaten dan 6 kota, yang tersebar menjadi 573 kecamatan dan 8.558 desa/kelurahan. Wilayah terluas adalah Kabupaten Cilacap dengan luas 2.138,51 km², atau sekitar 6,57 persen dari luas total Provinsi Jawa Tengah, sedangkan Kota Magelang merupakan wilayah yang luasnya paling kecil yaitu seluas 18,12 km².

Tabel 1.1 Tabel Luas Wilayah Provinsi Jawa Tengah

Kabupaten / Kota	Luas Wilayah Menurut Kabupaten/Kota					
	Luas (Km2)			Persentase		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Provinsi Jawa Tengah	32800.69	32800.69	32800.69	100.00	100.00	100.00
Kabupaten Cilacap	2124.47	2124.47	2124.47	6.48	6.48	6.48
Kabupaten Banyumas	1335.30	1335.30	1335.30	4.07	4.07	4.07
Kabupaten Purbalingga	677.55	677.55	677.55	2.07	2.07	2.07
Kabupaten Banjarnegara	1023.73	1023.73	1023.73	3.12	3.12	3.12
Kabupaten Kebumen	1211.74	1211.74	1211.74	3.69	3.69	3.69
Kabupaten Purworejo	1091.49	1091.49	1091.49	3.33	3.33	3.33
Kabupaten Wonosobo	981.41	981.41	981.41	2.99	2.99	2.99
Kabupaten Magelang	1102.93	1102.93	1102.93	3.36	3.36	3.36
Kabupaten Boyolali	1008.45	1008.45	1008.45	3.07	3.07	3.07
Kabupaten Klaten	658.22	658.22	658.22	2.01	2.01	2.01
Kabupaten Sukoharjo	489.12	489.12	489.12	1.49	1.49	1.49
Kabupaten Wonogiri	1793.67	1793.67	1793.67	5.47	5.47	5.47
Kabupaten Karanganyar	775.44	775.44	775.44	2.36	2.36	2.36
Kabupaten Sragen	941.54	941.54	941.54	2.87	2.87	2.87

Kabupaten / Kota	Luas Wilayah Menurut Kabupaten/Kota					
	Luas (Km2)			Persentase		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Kabupaten Grobogan	2013.86	2013.86	2013.86	6.14	6.14	6.14
Kabupaten Blora	1804.59	1804.59	1804.59	5.50	5.50	5.50
Kabupaten Rembang	887.13	887.13	887.13	2.70	2.70	2.71
Kabupaten Pati	1489.19	1489.19	1489.19	4.54	4.54	4.54
Kabupaten Kudus	425.15	425.15	425.15	1.30	1.30	1.30
Kabupaten Jepara	1059.25	1059.25	1059.25	3.23	3.23	3.23
Kabupaten Demak	900.12	900.12	900.12	2.74	2.74	2.74
Kabupaten Semarang	950.21	950.21	950.21	2.90	2.90	2.90
Kabupaten Temanggung	837.71	837.71	837.71	2.55	2.55	2.55
Kabupaten Kendal	1118.13	1118.03	1118.13	3.41	3.41	3.41
Kabupaten Batang	788.65	788.65	788.65	2.40	2.40	2.40
Kabupaten Pekalongan	837.00	837.00	-	2.55	2.55	2.55
Kabupaten Pemalang	1118.03	1118.03	1118.03	3.41	3.41	3.41
Kabupaten Tegal	876.10	876.10	876.10	2.67	2.67	2.67
Kabupaten Brebes	1902.37	1902.37	1902.37	5.80	5.80	5.80
Kota Magelang	16.06	16.06	16.06	0.05	0.05	0.05
Kota Surakarta	46.01	46.01	46.01	0.14	0.14	0.14
Kota Salatiga	57.36	57.36	57.36	0.17	0.17	0.18
Kota Semarang	373.78	373.78	373.78	1.14	1.14	1.14
Kota Pekalongan	45.25	45.25	45.25	0.14	0.14	0.14
Kota Tegal	39.68	39.68	39.68	0.12	0.12	0.12

Sumber : Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah,2020

Kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan melalui Undang Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggara pemilu dengan dibentuk sebuah lembaga yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Adapun lingkup pengawasan Bawaslu yakni terkait kepatuhan KPU sebagai Penyelenggara Pemilu dan Pilkada. Dalam perjalanannya Bawaslu mengalami penguatan secara bertahap, Pertama melalui Undang Undang Nomor 12 Tahun 2003, Undang-Undang ini mengamanatkan pembentukan lembaga ad hoc yang terlepas dari struktur kelembagaan KPU yang bertugas untuk melaksanakan pengawasan pemilu. Kedua melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, dalam Undang-Undang ini Pengawas Pemilu ditingkat pusat dipermanenkan menjadi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Ketiga melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 dalam Undang-Undang ini kelembagaan Bawaslu kembali diperkuat dengan dipermanenkannya Panitia Pengawas Pemilu ditingkat Provinsi menjadi Bawaslu Provinsi. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017, Undang-Undang ini memberikan

kewenangan yang besar dan signifikan. Secara kelembagaan, Panitia Pengawas Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota dipermanenkan menjadi Bawaslu Kabupaten/Kota. Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu diberi kewenangan yang cukup kuat yakni sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi pemilu melalui proses mediasi maupun sidang adjudikasi. Bawaslu bukan hanya sebagai lembaga pengawas, tetapi juga lembaga peradilan dalam penegakan hukum penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu.

Bawaslu Provinsi Jawa Tengah periode 2017 - 2022 terdiri dari tiga komisioner, yakni Fajar Saka (Divisi Hukum dan Data Informasi), Sri Wahyu Ananingsih (Divisi Penindakan Pelanggaran) dan Sri Sumanta (Divisi Sumber Daya Manusia). Pada pertengahan 2018, keanggotaan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah ditambah empat orang, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Empat komisioner itu adalah: Rofiuddin (Divisi Humas dan Hubungan Antar Lembaga), Anik Sholihatun (Divisi Pengawasan), Heru Cahyono (Divisi Sengketa) dan Gugus Risdianto (Divisi Kelembagaan).

Keberhasilan kelembagaan demokrasi dicapai dengan cara yang tidak mudah, melainkan penuh dinamika antar kekuatan politik. Dimulai dari penyelenggaraan Pemilu tahun 1999, kendatipun dipersiapkan dalam masa yang terbatas, namun proses dan hasil-hasil Pemilu tahun 1999 mampu menepis bayang-bayang kerusuhan. Demikian halnya Pemilu tahun 2004 sering digambarkan sebagai Pemilu eksperimen pertama sebagaimana maksud di dalam ketentuan Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang juga memiliki persiapan yang tidak lebih baik daripada Pemilu sebelumnya, juga dinilai gemilang hingga mengundang pujian kalangan domestik dan mancanegara, seraya mengukuhkan posisi Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia dan negara demokrasi pertama berpenduduk muslim terbesar di muka bumi.

Secara umum proses dan hasil-hasil Pemilu tahun 2009 juga diakui keabsahannya, kendati Pemilu kala itu dinilai kurang menggembirakan akibat problematika daftar pemilih dan isu-isu teknik elektoral lainnya. Pada paruh pertama dekade 2010, Pemilu tahun 2014 digelar dan dapat dikatakan menutup kekurangan-kekurangan Pemilu sebelumnya. Pelaksanaan Pemilu tahun 2014 dinilai lebih profesional, transparan, dan

akuntabel terlebih pada Pemilu kali ini penyelenggara Pemilu memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

a. Dasar Hukum Pembentukan Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah

Pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019, serta Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah telah mengalami pengembangan organisasi berupa perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK). Perubahan SOTK tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 bahwa Sekretariat Bawaslu Provinsi dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat setara Eselon II. Terlebih jajaran pengawas Pemilu di tingkat kabupaten/kota, yang semula bersifat adhoc, kini ditransformasi menjadi permanen. Dasar Hukum Pembentukan Kantor Bawaslu Kabupaten Bondowoso adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 3) Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- 4) Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan dan Kriteria Klasifikasi Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- 5) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

- 6) Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
- 7) Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

b. Kerangka Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Dan Wewenang Bawaslu Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berikut adalah Kedudukan, Tugas, Wewenang, dan Kewajiban dari Bawaslu:

a. Kedudukan

Pada pasal 89 ayat (4) menyebutkan bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat tetap.

b. Tugas

Bawaslu Provinsi Jawa Tengah bertugas:

1. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap:
 - a) Pelanggaran Pemilu; dan
 - b) Sengketa proses Pemilu;
2. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi, yang terdiri atas:
 - a) Pelaksanaan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu;
 - b) Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap;
 - c) Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD provinsi;

- d) Penetapan calon anggota DPD dan calon anggota DPRD provinsi;
 - e) Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
 - f) Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 - g) Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
 - h) Penghitungan suara di wilayah kerjanya;
 - i) Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK;
 - j) Rekapitulasi suara dari semua kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU Provinsi;
 - k) Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
 - l) Penetapan hasil Pemilu anggota DPRD provinsi;
3. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah provinsi;
 4. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
 5. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah provinsi, yang terdiri atas:
 - a) Putusan DKPP;
 - b) Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 - c) Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten /Kota;
 - d) Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 - e) Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
 6. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
 7. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi;
 8. Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah provinsi; dan
 9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu Bawaslu Provinsi bertugas:

1. Mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi;
2. Mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi;
3. Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait; dan
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah provinsi.

Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu Bawaslu Provinsi bertugas:

1. Menyampaikan hasil pengawasan di wilayah provinsi kepada Bawaslu atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah provinsi;
2. Menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi;
3. Memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi;
4. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu; dan
5. Merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi kepada Bawaslu.

Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu Bawaslu Provinsi bertugas:

1. Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;
2. Memverifikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;
3. Melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah provinsi;
4. Melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan
5. Memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi.

c. Wewenang

Bawaslu Provinsi Jawa Tengah berwenang:

1. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
2. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang - Undang ini;
3. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;
4. Merekomendasikan hasil pengawasan di wilayah provinsi terhadap pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang - Undang ini;
5. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan;
6. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak yang berkaitan dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;
7. Mengoreksi rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang - undangan; dan
8. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Kewajiban

Adapun kewajiban Bawaslu Provinsi Jawa Tengah adalah:

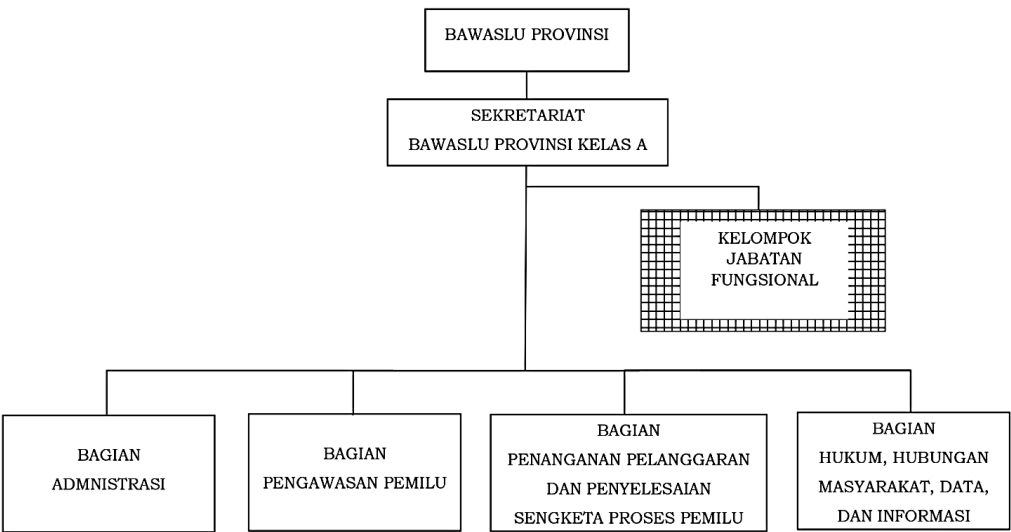
1. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;
3. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
4. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat provinsi;

- 5. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Provinsi dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 6. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka untuk mensinergikan dan menjamin proses pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum, maka Bawaslu Republik Indonesia mengatur secara rinci dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. Berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021. Sekretariat Bawaslu Provinsi Kelas A terdiri atas:

- 1. Bagian Administrasi;
- 2. Bagian Pengawasan Pemilu;
- 3. Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
- 4. Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi; dan
- 5. kelompok jabatan fungsional.

Gambar 1.2 Struktur Organisasi



Bagian Administrasi sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi dan koordinasi pelaksanaan pengawasan internal. Dalam melaksanakan tugas Bagian Administrasi menyelenggarakan fungsi:

1. Pengoordinasian dan Penyiapan Penyusunan Rencana Program dan Anggaran Bawaslu Provinsi Melalui Konsultasi Kepada Pimpinan Bawaslu Provinsi;
2. Pengelolaan Keuangan;
3. Pengelolaan Arsip, Persuratan, Rumah Tangga dan Perlengkapan, Barang Milik Negara, Serta Keprotokolan dan Keamanan Dalam;
4. Pemantauan dan Pengawasan Internal Pelaksanaan Kegiatan Bawaslu Provinsi; dan
5. Pelaksanaan Urusan Administrasi Sumber Daya Manusia dan Ketatausahaan Pimpinan.

Bagian Pengawasan Pemilu mempunyai tugas melaksanakan urusan penyiapan pelaksanaan pengawasan partisipatif, pelaksanaan urusan hubungan dan kerja sama antarlembaga, akreditasi dan penguatan pemantau Pemilu, dan pengawasan tahapan Pemilu di provinsi. Dalam melaksanakan tugas Bagian Pengawasan Pemilu menyelenggarakan fungsi:

1. Mengidentifikasi Potensi Kerawanan Pemilu di Daerah Provinsi;
2. Koordinasi Dengan Instansi Terkait dan Pemerintah Daerah;
3. Fasilitasi Pelatihan Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu;
4. Fasilitasi Pelatihan Pengawasan Pemilu Untuk Bawaslu Kabupaten/Kota;
5. Fasilitasi Kerja Sama dan Hubungan Antarlembaga di Daerah Provinsi;
6. Fasilitasi Akreditasi dan Penguatan Pemantau Pemilu di Daerah Provinsi;
7. Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pemilu di Daerah Provinsi;
8. Pengelolaan dan Penyajian Data dan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu; dan
9. Fasilitasi Supervisi Pengawasan Pemilu Kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.

Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu mempunyai tugas melaksanakan urusan penanganan pelanggaran dan tindak pidana Pemilu, teknis persidangan pelanggaran

Pemilu, serta penyelesaian sengketa proses Pemilu. Dalam melaksanakan tugas, Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu menyelenggarakan fungsi:

1. Fasilitasi Dukungan Administrasi dan Teknis Kajian Laporan dan Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu;
2. Fasilitasi Pelaksanaan Investigasi Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Dugaan Tindak Pidana Pemilu;
3. Fasilitasi Dukungan Administrasi dan Teknis Persidangan Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu dan Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif;
4. Fasilitasi Dukungan Teknis dan Administrasi Penanganan Tindak Pidana Pemilu, Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Dan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Lainnya Yang Bukan Pelanggaran Pemilu, Bukan Sengketa Pemilu, dan Bukan Tindak Pidana Pemilu;
5. Penyediaan Dukungan Administrasi dan Teknis Penanganan Tindak Pidana Pemilu Kepada Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
6. Koordinasi dan Pembinaan Pelaksanaan Dukungan Administrasi Pelaporan dan Registrasi Pelanggaran Pemilu;
7. Koordinasi dan Pembinaan Pelayanan Data Penanganan Pelanggaran Pemilu;
8. Koordinasi Penyajian Laporan Penanganan Pelanggaran Pemilu;
9. Penyiapan Pelaksanaan Urusan Administrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
10. Penyiapan Pelaksanaan Administrasi dan Fasilitasi Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
11. Penyiapan Pelaksanaan Administrasi dan Urusan Persidangan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
12. Penyiapan Administrasi dan Publikasi Putusan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu; dan
13. Fasilitasi Dukungan Administratif dan Teknis Supervisi dan Pendampingan Penanganan Pelanggaran Pemilu dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Bawaslu Kabupaten/Kota.

Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan urusan hukum, hubungan masyarakat, pengelolaan data dan informasi, serta pelayanan informasi di provinsi. Dalam melaksanakan tugas Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat dan

Data Informasi menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan Kajian Hukum Dan Produk Hukum;
2. Fasilitasi Konsultasi Hukum;
3. Fasilitasi Pendampingan Hukum Dan/Atau Pemberian Advokasi Hukum Bagi Bawaslu Provinsi Dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
4. Pelaksanaan Pendokumentasian Hukum;
5. Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Daerah Provinsi;
6. Pengelolaan Hubungan Masyarakat;
7. Pelaksanaan Pemberitaan Dan Publikasi Pengawasan Pemilu Di Daerah Provinsi; Dan
8. Pengelolaan Dan Pelayanan Data Dan Informasi.

c. Isu Strategis dalam Mewujudkan Konsolidasi Demokrasi Sesuai RPJMN (7 Agenda Pembangunan)

RPJMN 2020-2024 dengan visi “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, diwujudkan melalui Sembilan Misi, yang dijabarkan kedalam tujuh agenda pembangunan, sedangkan yang menjadi kewenangan Bawaslu adalah “Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.” Sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah untuk mencapai Tujuh Agenda Pembangunan dengan melalui:

1. Peningkatan Kapasitas dan Integritas Pengawas;
2. Peningkatan Sumber Daya Manusia melalui Pelatihan-pelatihan teknis dan non teknis kepemiluan serta administrasi perkantoran;
3. Peningkatan Dukungan Layanan Administrasi, Organisasi dan Sarana Prasarana;
4. Penguatan Kerja Sama Antar Lembaga melalui Koordinasi dan Kerjasama dengan Lembaga Pendidikan, Stakeholder , jajaran sampling, OKP, Ormas, LSM dan Tokoh masyarakat;
5. Peningkatan Pelibatan Masyarakat dalam Pengawasan Partisipatif melalui Pembentukan Desa Anti Politik Uang dan Desa Pengawasan Partisipatif;
6. Pembentukan Kader Pengawasan Partisipatif melalui SKPP;
7. Melakukan Pendidikan Politik disekolah – sekolah dan Universitas.

d. Implementasi Proyek Prioritas RPJMN oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah

Implementasi yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah adalah Peningkatan Pelibatan Masyarakat dalam Pengawasan Partisipatif melalui:

1. Melakukan rapat pembinaan/penyelenggaraan pengawasan dan supervisi pengawasan Pemilu/Pemilihan;
2. Melakukan rapat koordinasi pengawasan tahapan Pemilu/Pemilihan;
3. Supervisi dan monitoring pengawasan ke Kabupaten/Kota Pilkada;
4. Supervisi dan monitoring pengawasan bagi Kabupaten/Kota Pilkada ke Kecamatan;
5. Melakukan rapat pengembangan dan pembinaan desa anti money politic dan desa pengawasan;
6. Melakukan koordinasi ke desa yang akan dijadikan desa anti money politic dan desa pengawasan;
7. Melaksanakan rapat koordinasi dan deklarasi desa anti money politic dan desa pengawasan;
8. Melakukan riset dan kajian evaluasi penyelenggaraan Pilkada serentak;
2. Melakukan rakor/bimtek/workshop penanganan temuan dan laporan pelanggaran;
3. Melakukan rapat optimalisasi fasilitasi penanganan pelanggaran Pemilihan;
4. Melakukan rakor/bimtek/workshop penyelesaian sengketa Pemilihan;
5. Melakukan rakor sentra Gakkumdu;
6. Melakukan fasilitasi penanganan pelanggaran pidana Pemilihan;
7. Melakukan rapat advokasi pelanggaran dan pidana Pemilu/Pemilihan;
8. Melakukan rapat monitoring dan evaluasi pelaksanaan produk hukum;
9. Melakukan rakor diseminasi peraturan perundang-undangan;
10. Melakukan pelatihan kehumasan pengawas pemilihan;
11. Melakukan pelatihan penyusunan JDIH pengawas Pemilu;
12. Melakukan supervisi dan monitoring penanganan pelanggaran ke kabupaten/kota Pilkada;
13. Melakukan supervisi dan monitoring penyelesaian sengketa ke kabupaten/kota Pilkada;
14. Melakukan supervisi dan monitoring penanganan pelanggaran ke kecamatan;
15. Melakukan supervisi dan monitoring penyelesaian sengketa ke kecamatan;

16. Melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi di daerah bidang hukum.

1.1.1. Analisis Data Kepegawaian Bawaslu Provinsi

Sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan dan Kriteria Klasifikasi Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah masuk dalam klasifikasi Sekretariat Bawaslu Provinsi kelas A. Data Kepegawaian Bawaslu Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2 Data Pegawai Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah

NO	NAMA PEGAWAI	TANGGAL/BULAN/TAHUN/ MULAI BEKERJA DI UNIT KERJA	JABATAN
1	Kartini Tjandra Lestari, S.H., M.M.	1 Oktober 2013	Kepala Sekretariat
2	Drs. Setyo Pramudi	9 Februari 2015	Kepala Bagian Pengawasan
3	Sadhu Sudiyarto, S.H.	9 Februari 2015	Kepala Bagian P3SP
4	Noeroel Fitriani, S.ST, M.E	05 April 2021	Kepala Bagian Administrasi
5	Inti Priswari, S.IP	1 Maret 2015	Analisis Kebijakan Ahli Muda
6	Guritno Ari Wibowo, S.Si	1 Maret 2015	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Muda
7	Muhammad Syaiful Mujib, S.E.	1 Maret 2015	Pranata Kehumasan Ahli Muda
8	Bayu Indra Permana, S.H.	2 Desember 2019	Analisis Hukum Ahli Muda
9	Agus Suyanto, S.Kom., M.A	1 Maret 2014	Analisis Hukum Ahli Muda
10	Andika Asykar, S.IP.	1 Maret 2014	Pranata Kehumasan Ahli Muda
11	Sriyadi	8 Oktober 2012	Bendahara Pengeluaran
12	Budi Evantri Sianturi, S.H.	01 Februari 2019	Analisis Hukum
13	Wanda Sigit Setiawan, S.I.P	01 Februari 2019	Pengawas Pemilu
14	Novi Wulandari, S.Ak	01 Februari 2019	Analisis Keuangan

NO	NAMA PEGAWAI	TANGGAL/BULAN/TAHUN/ MULAI BEKERJA DI UNIT KERJA	JABATAN
15	Setiadi Kurniawan, S.Kom	01 Februari 2019	Analisis Data dan Informasi
16	Nur Laila Azizah, S.H	01 Februari 2019	Analisis Sengketa Peradilan
17	Latief Yulianto, A. Md.	01 Februari 2019	Pengelola Keuangan
18	Nova Dwi Kristiana, A. Md.	01 Februari 2019	Pengelola Keuangan
19	Husnul Faizah, A. Md.	01 Februari 2019	Pengelola Keuangan
20	Adhi Harto, S.E.	01 Desember 2020	Analisis SDM Aparatur
21	Annisaa Dwi Melyani, S.H.	01 Desember 2020	Analisis Hasil Penanganan Pelanggaran
22	Arshinta Ellen Fiadesi, S.Sos	01 Desember 2020	Analisis Pemilihan Umum
23	Donny Ramadita Pradana, S.H.	01 Desember 2020	Analisis Produk Hukum
24	Nurma Anggi Pramesti, S.Tr.Ak.	01 Desember 2020	Analisis Perencanaan Anggaran
25	Rizky Priambodo, S.H.	01 Desember 2020	Analisis Materi Sidang
26	Rudi Witoko, S.Si	01 Desember 2020	Analisis Barang Milik Negara
27	Widya Astuti, S.IP	01 Desember 2020	Analisis Hubungan Antar Lembaga
28	Aniatus Solekhah, A.Md.	11 Maret 2013	PPNPN Staf Pelaksana
29	Suciyati	11 Maret 2013	PPNPN Staf Pelaksana
30	Ari Dwi Saputra, S.Pd.	02 Agustus 2013	PPNPN Staf Pelaksana
31	Widi Utomo, S.Kom	02 Januari 2014	PPNPN Staf Pelaksana
32	Aldyno Paundra SW, S.T.	04 Maret 2014	PPNPN Staf Pelaksana
33	Bayu Bijagsana, A.Md	02 Juni 2014	PPNPN Staf Pelaksana
34	Disti Kumalandari, ST	05 Januari 2015	PPNPN Staf Pelaksana
35	Andhika Ulidiarto S., S.E.	09 April 2015	PPNPN Staf

NO	NAMA PEGAWAI	TANGGAL/BULAN/TAHUN/ MULAI BEKERJA DI UNIT KERJA	JABATAN
			Pelaksana
36	Anggie Desta Ervita, S.A.P	13 November 2017	PPNPN Staf Pelaksana
37	Yusuf Manggala Adityatama, S.A.P	13 November 2017	PPNPN Staf Pelaksana
38	Rr. Respati Likarini, A.Md.	13 November 2017	PPNPN Staf Pelaksana
39	Virginia Puspa Dianti, S.H.	13 November 2017	PPNPN Staf Pelaksana
40	Rifqi Adi Nurcahyo, S.H.	13 November 2017	PPNPN Staf Pelaksana
41	Bramana Bimantara, S.Ds	04 Desember 2017	PPNPN Staf Pelaksana
42	Siti Rohaeti, S.H.	15 Februari 2019	PPNPN Staf Pelaksana
43	Satyawan Rianaldi Pradipta, S.H.	15 Februari 2019	PPNPN Staf Pelaksana
44	Shohibus Tsani, S.H.I.	15 Februari 2019	PPNPN Staf Pelaksana
45	Arista Yoga Feriadi, S.E.	15 Februari 2019	PPNPN Staf Pelaksana
46	Ristya Widodo	05 Januari 2015	PPNPN Tenaga Pendukung
47	Doso Nugroho	05 Januari 2016	PPNPN Tenaga Pendukung
48	Pipit Dian Prasetyo, S.Pd.	01 Maret 2016	PPNPN Tenaga Pendukung
49	Sulistyo	02 Oktober 2017	PPNPN Tenaga Pendukung
50	Agus Daryanto	04 Januari 2018	PPNPN Tenaga Pendukung
51	Raras Heru Suseno	1 Februari 2018	PPNPN Tenaga Pendukung
52	Muh Soni	01 Februari 2018	PPNPN Tenaga Pendukung
53	Siti Khotimah	01 Mei 2018	PPNPN Tenaga Pendukung
54	Andy Suwignyo	20 Agustus 2018	PPNPN Tenaga

NO	NAMA PEGAWAI	TANGGAL/BULAN/TAHUN/ MULAI BEKERJA DI UNIT KERJA	JABATAN
			Pendukung
55	Ahmad Syaekhu, S.Kom	23 Agustus 2018	PPNPN Tenaga Pendukung
56	Aditya Nafiur Rahman, S.H.	09 Maret 2018	PPNPN Tenaga Pendukung
57	Suyanto	14 Agustus 2019	PPNPN Tenaga Pendukung
58	Agus Syaifudin Zuhri	10 Mei 2021	PPNPN Tenaga Pendukung
59	Arinto Dwi Yuwono	7 Juni 2021	PPNPN Tenaga Pendukung

Sumber : Data Administrasi Bawaslu Provinsi Jawa Tengah,2020

Bawaslu Provinsi Jawa Tengah didukung oleh 59 (lima puluh sembilan) pegawai yang terdiri atas 1(satu) Kepala Sekretariat, 3 (tiga) Kepala Bagian, 6 (enam) Subkoordinator/Jabatan Fungsional, 9 (sembilan) staf pelaksana PNS, 8 (delapan) staf pelaksana CPNS, 18 (delapan belas) staf pelaksana teknis PPNPN dan 14(empat belas) tenaga pendukung.

Berdasarkan tabel diatas, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah masih mengalami kekurangan pegawai. Berikut adalah analisis kebutuhan Pegawai Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah:

Tabel 1.3 Data Kebutuhan PNS Pada Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peta Jabatan Bawaslu Provinsi Kelas A

NO	JABATAN	JUMLAH KEBUTUHAN PNS
1	Kasubag Perencanaan, Keuangan Dan BMN	1 Orang
2	Kasubag Hukum	1 Orang
3	Perencana Ahli	2 Orang
4	Pengadaan Barang Dan Jasa Ahli Muda	1 Orang
5	Pranata Komputer Terampil	3 Orang
6	Perancang Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang
7	Analisis Perencanaan Anggaran	1 Orang
8	Analisis SDM Aparatur	1 Orang

NO	JABATAN	JUMLAH KEBUTUHAN PNS
9	Analisis BMN	1 Orang
10	Analisis Pemilihan Umum	1 Orang
11	Pengawas Pemilihan Umum	1 Orang
12	Pengolah Konten Media Sosial	1 Orang
13	Penyusun Rencana Kerjasama Kelembagaan	1 Orang
14	Analisis Hasil Penanganan Pelanggaran	1 Orang
15	Analisis Materi Sidang	2 Orang
16	Analisis Hukum	1 Orang
17	Analisis Hubungan Masyarakat	1 Orang
Jumlah Kebutuhan		22 Orang

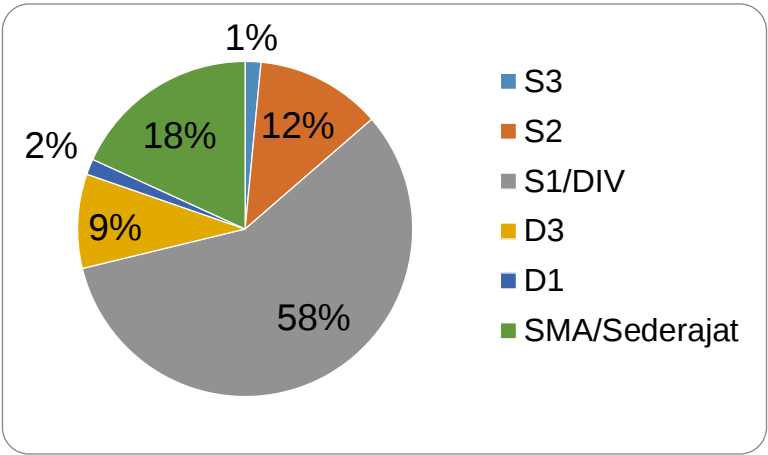
Sumber Data : Data Administrasi Bawaslu Provinsi Jawa Tengah,2020

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah mempunyai kekurangan pegawai sebanyak 22 orang dengan rincian masing-masing jabatan sebagaimana data diatas.

Bawaslu Provinsi Jawa Tengah memiliki pegawai sebanyak 66 (enam puluh enam) orang. Berikut ini rincian pegawai berdasarkan pendidikan terakhir, jenis kelamin, dan status kepegawaian.

a. Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Gambar 1.3 Grafik Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan Terakhir

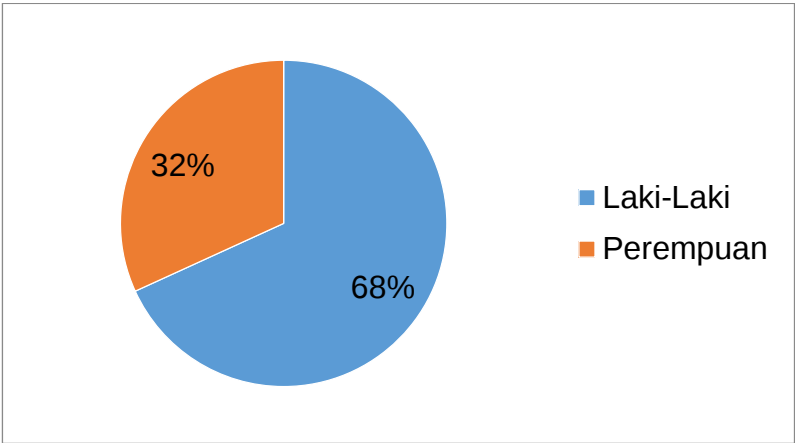


Sumber : Data Bagian Administrasi Bawaslu Provinsi Jateng, 2021

Dari grafik di atas diketahui Bawaslu Provinsi Jawa Tengah memiliki pegawai dengan jenjang pendidikan S3 sebanyak 1 orang, S2 sebanyak 8 orang, S1/DIV sebanyak 38 orang, D3 sebanyak 6 orang, D1 sebanyak 1 orang, dan SMA/Sederajat sebanyak 12 orang. Berdasarkan data tersebut sebagian besar pegawai Bawaslu Provinsi Jawa Tengah berpendidikan minimal D3. Tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat pegawai yang tingkat pendidikannya D1 ke bawah. Apabila melihat jurusan pendidikan yang diambil masih terdapat beberapa pegawai yang belum sesuai antara jurusan pendidikan dengan jabatan atau tugas yang dikerjakan. Hal ini tidak menjadikan suatu kendala karena diimbangi dengan pelatihan dan pembinaan pegawai.

b. Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Gambar 1.4 Grafik Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

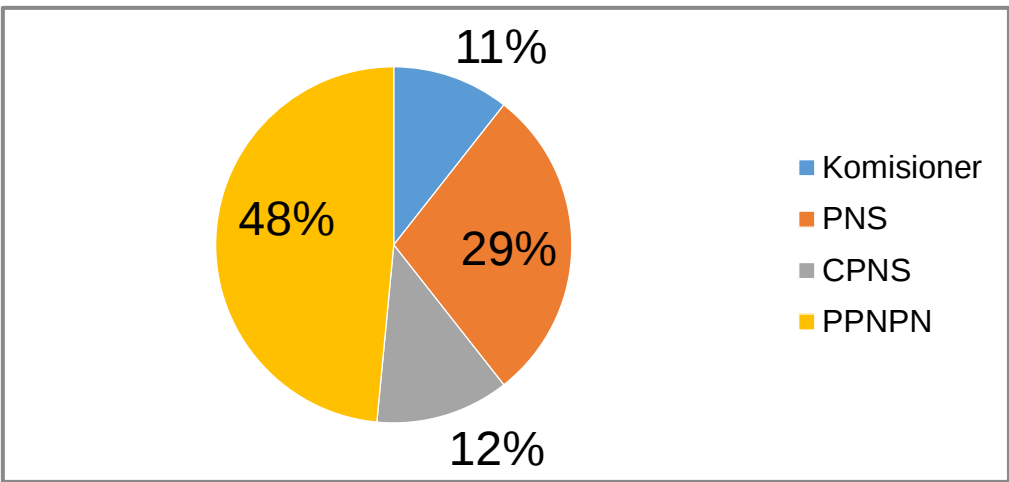


Sumber : Data Bagian Administrasi Bawaslu Provinsi Jateng, 2021

Jumlah pegawai berjenis kelamin laki-laki sebanyak 45 orang, dan sisanya perempuan sebanyak 21 orang. Bawaslu Provinsi Jawa Tengah berkomitmen untuk memberikan hak yang sama bagi perempuan untuk dapat bekerja di kantor ini. Pembagian tugas sehari-hari sudah disesuaikan dengan jabatan masing-masing tanpa melihat jenis kelamin para pegawai. Rencana jangka panjang jumlah pegawai perempuan akan ditingkatkan secara proporsional.

c. Data Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

Gambar 1.5 Grafik Data Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian



Sumber : Data Bagian Administrasi Bawaslu Provinsi Jateng, 2021

Komisioner sebanyak 7 orang, pegawai dengan status Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sebanyak 19 orang, Calon PNS sebanyak 8 orang, dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) sebanyak 32 orang. Jumlah pegawai ini belum proporsional jika dibandingkan dengan beban kerjanya yang membawahi 35 Bawaslu Kabupaten/Kota karena baru 4 Bawaslu Kabupaten/Kota yang sudah ditetapkan sebagai unit kerja mandiri. Untuk saat ini jumlah pegawai tidak dapat ditambah mengingat adanya larangan rekrutmen baru bagi pegawai nonPNS. Rencana Bawaslu ke depan akan merekrut CPNS dan PPPK untuk memenuhi kebutuhan pegawai sesuai dengan peta jabatan yang ada.

d. Struktur Organisasi Bawaslu Provinsi Jawa Tengah

Bawaslu Provinsi Jawa Tengah periode 2017 - 2022 Komposisi Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dengan 3 (tiga) Anggota:

1. M. Fajar Subhi A.K. Arif, S.H., M.H. (Ketua Merangkap Sebagai Kordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar lembaga)
2. Sri Sumanta, S.H. (Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi)
3. Dr. Sri Wahyu Ananingsih, S.H., M.Hum. (Koordinator Divisi Penindakan dan Penyelesaian Sengketa)

Pada bulan Juli 2018, keanggotaan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah ditambah empat orang, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Menjadi 7 (tujuh) Anggota terdiri dari :

1. M. Fajar Subhi A.K. Arif, S.H., M.H. (Ketua Merangkap Sebagai Koordinator

- Divisi Hukum dan Data Informasi)
2. Sri Sumanta, S.H. (Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia)
 3. Dr. Sri Wahyu Ananingsih, S.H., M.Hum. (Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran)
 4. Heru Cahyono, S.Sos., M.A. (Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa)
 5. Anik Sholihatun, S.Ag., M.Pd. (Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan antar lembaga)
 6. Gugus Risdaryanto, S.Sos., M.Si. (Koordinator Divisi Organisasi)
 7. Muhammad Roffiuddin, S.Hi., M.IKom. (Koordinator Divisi Humas).

Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang secara administrasi bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Bawaslu dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.

Tugas dari Kepala Sekretariat yaitu melaksanakan pemberian dukungan administrasi dan teknis operasional kepada Bawaslu Provinsi Jawa Tengah serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait.

Gambar 1.6 Struktur Organisasi Bawaslu Provinsi Jawa Tengah



Sumber : PPID Bawaslu Prov.Jateng

1.1.2. Sarana dan Prasarana Bawaslu Provinsi Jawa Tengah

Dalam aktivitas perkantoran diperlukan adanya sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung kerja pegawai guna mencapai tujuan lembaga. Saat ini Bawaslu Provinsi Jawa Tengah

mempunyai sarana dan prasarana yang cukup memadai. Alat perkantoran berupa meja kursi, komputer, printer dan pendukungnya sudah sesuai dengan jumlah pegawai yang ada.

Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Tengah memiliki ketersediaan ruang rapat, ruang kerja dan ruang pendukung guna menunjang pelaksanaan tugas sehari-hari. Ruang rapat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 2 (dua) ruang. Pertama, ruang rapat besar yang biasa digunakan untuk kegiatan internal maupun eksternal dengan kapasitas peserta kurang lebih 40 (empat puluh) orang dengan sarana dan prasarana yang lengkap seperti LCD projector, televisi, mic conference, sound system dan sarana prasarana lainnya. Kedua, ruang rapat kecil yang berada di ruang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentragakkumdu). Untuk ketersediaan ruang kerja, semua bagian dan seluruh pegawai sudah menempati ruang kerja yang layak sesuai bagian masing-masing. Adapun ruang pendukung diantaranya ruang tamu, ruang studio, kamar mandi, dapur, ruang arsip, gudang dan musholla. Akan tetapi, ketersediaan ruangan ini menjadi salah satu kendala bagi Bawaslu Provinsi Jawa Tengah karena ruangan yang ada belum representative.

Bawaslu Provinsi Jawa Tengah menempati kantor di atas lahan seluas $\pm 2245 \text{ m}^2$ dengan bangunan gedung kantor permanen seluas $\pm 741 \text{ m}^2$. Kantor tersebut merupakan gedung milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dipinjam pakai oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Surat Perjanjian Nomor 030/0006274 tanggal 27 Maret 2017 tentang Pemanfaatan Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah serta Barang-barang Inventaris Lainnya yang dikelola Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah terletak di Jalan Papandayan Selatan nomor 1 Semarang kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah dengan cara pinjam pakai yang akan berakhir di tahun 2022. Status gedung yang seperti itu belum mendukung sifat kelembagaan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah yang permanen. Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Tengah setiap saat dapat dipindahkan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah sebagai pemilik tanah dan bangunan. Ke depan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah berharap dapat memiliki kantor permanen baik melalui mekanisme pengadaan maupun hibah.

Adapun sarana berupa kendaraan operasional yang ada di Bawaslu Provinsi Jawa Tengah merupakan kendaraan milik Bawaslu Provinsi Jawa

Tengah. Sedangkan yang berada di Bawaslu Kabupaten/Kota sebagian berstatus pinjam pakai dan sewa. Adapun jumlah kendaraan operasional milik Bawaslu Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2 Jumlah kendaraan operasional milik Bawaslu Provinsi Jawa Tengah

No	Jenis Kendaraan	Tahun Perolehan	Jumlah
1.	Mini Bus	2013	4
2.	Mini Bus	2018	8
3.	Sepeda Motor	2013	3
4.	Sepeda Motor	2020	1
Jumlah			16

Sumber : Data Bagian Administrasi Bawaslu Provinsi Jateng, 2020

Sarana dan prasarana lainnya merupakan Barang Milik Negara (BMN) dari hasil transfer dan pembelian langsung. Sampai dengan tahun 2020 BMN Satker Bawaslu Jawa Tengah tercatat sebanyak 6600 unit dengan rincian barang dalam kondisi baik sebanyak 6443 unit, rusak ringan sebanyak 43 unit, dan rusak berat sebanyak 114 unit. Barang-barang tersebut berada di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan di 35 Kantor Bawaslu Kabupaten/Kota.

1.1.3. Evaluasi Keberhasilan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah

Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Pasal 186, mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi dan teknis operasional kepada Bawaslu Provinsi sehingga pada tiap akhir periode harus membuat laporan pelaksanaan program. Pelaksanaan program dan kegiatan Bawaslu Provinsi dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga. Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran Negara dalam melaksanakan program dan kegiatannya serta untuk tetap mengedepankan sistem keterbukaan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, Evaluasi keberhasilan tahun sebelumnya dapat dilihat dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2019.

Evaluasi dan analisis capaian kinerja dilakukan untuk setiap capaian sasaran strategis yang telah ditetapkan. Masing-masing sasaran tersebut akan diuraikan beserta permasalahan yang terkait dengan capaiannya.

Tabel 1.3 Sasaran Strategis

No	SASARAN STRATEGIS
1	Meningkatnya Kualitas Pencegahan Indikasi Potensi Pelanggaran Pemilu di Wilayah Jawa Tengah
2	Meningkatnya Kualitas Penindakan Pelanggaran Pemilu di Wilayah Jawa Tengah
3	Meningkatnya Kualitas Penyelesaian Sengketa Pemilu di Wilayah Jawa Tengah
Capaian 99 %	

Sumber: Data LKjIP 2019

Tabel 1.4 Indikator Kinerja pada sasaran 1

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Presentase Peningkatan Jumlah Keterlibatan Stakeholders dalam Pengawasan Pemilu DPR,DPD, dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019	5 %	7.25 %	100%
Presentase Menurunnya Jumlah Pelanggaran Pemilu DPR,DPD, dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019	10 %	-0.49%	-5%

Sumber: Data LKjIP 2019

Tabel 1.5 Indikator Kinerja pada sasaran 2

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Presentase Peningkatan Jumlah Rekomendasi Pelanggaran Pemilu DPR,DPD, dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019	5 %	3.78%	76%
Presentase Jumlah Layanan Laporan dan Temuan Pelanggaran yang ditangani sesuai dengan ketentuan	100 %	100%	100%

Sumber: Data LKjIP 2019

Tabel 1.6 Indikator dan target sasaran 3

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Presentase Tindaklanjut Penyelesaian Sengketa	100 %	100%	100%
Presentase Penyelesaian Sengketa yang dilayani dengan baik	90 %	100%	100%

Sumber: Data LKjIP 2019

Kinerja Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan jajaran dibawahnya selain memenuhi target yang ditentukan setiap tahunnya, ternyata juga mendapatkan apresiasi dari pihak luar. Berikut adalah beberapa apresiasi dan penghargaan yang diperoleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan Bawaslu Kabupaten/Kota hingga tahun 2021:

Tabel 1.7 Apresiasi dan Penghargaan Bawaslu Provinsi

No.	Keterangan	Tahun
1	Bawaslu Provinsi terbaik pertama kategori penanganan pelanggaran diraih Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Bawaslu Award 2014	2014
2	Pengelolaan Dana Hibah Pilkada 2015 terbaik – Bawaslu Award 2016	2016
3	Bawaslu Provinsi Terbaik dalam Pengawasan Tahapan – Bawaslu Award 2016	2016
4	Pengawasan Tahapan Terbaik Bawaslu Tingkat Provinsi Bawaslu Award 2018	2018
5	Pengelolaan Administrasi dan Laporan Keuangan Tingkat Provinsi Bawaslu Award 2018	2018
6	Pelaksana Fungsi Humas dan Hubungan Antar Lembaga Terbaik Pertama Tingkat Provinsi Bawaslu Award 2019	2019
7	Pengelola PPID Terbaik Pertama Tingkat Provinsi Bawaslu Award 2019	2019
8	Keterbukaan Informasi Publik Oleh Komisi Informasi sebagai Lembaga “Informatif”	2020
9	Bawaslu Informatif dalam Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi Se Indonesia Tahun 2020	2020
10	Terbaik Ke 5 Penggunaan Sistem Pengawasan Pemilu (SIWASLU) – Pilkada 2020	2021
11	Peringkat 1 Penilaian IKPA dan EKA Tahun 2020.	2021

Sumber : Data Bagian Humas Bawaslu Prov.Jateng,2021

Tabel 1.8 Apresiasi dan Penghargaan Bawaslu Kabupaten/Kota

No.	Keterangan	Tahun
1	Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Karanganyar dalam kategori Panwas Kabupaten terbaik untuk penanganan pelanggaran Bawaslu Award 2018	2018
2	Inovasi Pencegahan Terbaik Tingkat Pertama oleh Kabupaten Wonosobo Bawaslu Award 2019	2019
3	Penanganan Administrasi Terbaik Kedua oleh Kota Semarang Bawaslu Award 2019	2019
4	Tata Kelola Kesekretariatan Terbaik Kedua oleh Kabupaten Pati Bawaslu Award 2019	2019

Sumber : Data Bagian Humas Bawaslu Prov.Jateng,2021

1.1.4. Data Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pemilihan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah

a. Analisis Hasil Penyelenggaraan Pengawasan

Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 dilaksanakan di 17 Kabupaten dan 4 Kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah yang diikuti oleh 41 pasangan calon Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota. Selama penyelenggaraan Pilkada Tahun 2020 tersebut, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah menghimpun kegiatan-kegiatan pencegahan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota penyelenggara Pilkada. Rincian jumlah kegiatan pencegahan yang telah dilakukan tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 1.9 Jumlah Kegiatan Pencegahan

NO	KABUPAT EN KOTA	PENCEGAHAN						
		Forum2 Sosialisi asi/ Koordin asi	ILM [Video,poste r,dll]	Talksh ow live	Himbau an	Saran Perbaik an	Cegah di Lapang an	JML Total
1	Kab. Blora	186	1.670	10	1.420	60	49	3.395
2	Kab. Boyolali	22	18	19	384	53	3	499
3	Kab.	23	25	12	34	10	35	140

NO	KABUPAT EN KOTA	PENCEGAHAN						
		Forum2 Sosialis asi/ Koordin asi	ILM [Video,poste r,dll]	Talksh ow live	Himbau an	Saran Perbaik an	Cegah di Lapang an	JML Total
	Demak							
4	Kab. Grobogan	2	8.568	20	43	60	1.513	10.20 6
5	Kab. Kebumen	4	30	27	966	864	4	1.895
6	Kab. Kendal	40	560	21	14.518	51	854	16.04 4
7	Kab. Klaten	86	1.059	5	108	62	27	1.347
8	Kab. Pekalonga n	8	708	10	46	24	196	999
9	Kab. Pemalang	6	8.262	6	494	142	307	9.217
10	Kab. Purbalingg a	15	3.375	57	21	5	21	3.494
11	Kab. Purworejo	77	545	21	622	90	149	1.504
12	Kab. Rembang	8	24	9	14	23	29	107
13	Kab. Semarang	440	21.022	19	329	40	1.199	23.04 9
14	Kab. Sragen	70	47	5	240	36	9	408
15	Kab. Sukoharjo	72	1.898	41	612	69	278	2.984
16	Kab. Wonogiri	7	2.957	8	522	7	25	3.526
17	Kab. Wonosobo	24	20.473	8	5.501	339	266	26.61 9
18	Kota	14	343	10	12	8	80	38

NO	KABUPAT EN KOTA	PENCEGAHAN						
		Forum2 Sosialis asi/ Koordin asi	ILM [Video,poste r,dll]	Talksh ow live	Himbau an	Saran Perbaik an	Cegah di Lapang an	JML Total
	Magelang							
19	Kota Pekalonga n	5	17	2	33	24	39	122
20	Kota Semarang	88	2.947	20	68	123	2.030	5.276
21	Kota Surakarta	6	10	5	158	28	4	211
Jumlah		1.203	74.558	335	26.145	2.118	7.117	111.4 76

Sumber: Data Bagian Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah,2020

Berdasarkan data tersebut, kegiatan pencegahan paling banyak yang dilakukan oleh jajaran pengawas adalah pencegahan melalui Iklan Layanan Masyarakat (ILM) yaitu sebanyak 74.558 kali. Pencegahan melalui ILM tersebut dianggap merupakan cara yang efektif untuk menarik perhatian dan dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas. Kegiatan pencegahan terbanyak selanjutnya adalah melalui penerbitan surat imbauan, sebanyak 26.145 imbauan. Surat imbauan tersebut disampaikan oleh jajaran pengawas kepada perangkat daerah dan stakeholder masing-masing secara berjenjang sesuai tingkatan. Sedangkan untuk cegah langsung di lapangan sejumlah 7.117 kegiatan menepati terbanyak ketiga yang dilakukan jajaran pengawas dalam kegiatan pencegahan pelanggaran.

Sedangkan untuk kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh jajaran pengawas dihimpun berdasarkan laporan Formulir A Pengawasan. Terdapat sebanyak 78.854 formulir A pengawasan sepanjang pelaksanaan Pilkada Tahun 2020 yang meliputi pengawasan berbagai tahapan penyelenggaraan. Rincian jumlah terdapat pada tabel berikut:

Tabel 1.10 Jumlah Kegiatan Pencegahan

No	Pengawasan Tahapan	Jumlah Form A
1	Pembentukan Badan <i>Adhoc</i>	3480
2	Bakal Calon Perseorangan	698
3	Penyusunan dan Pemutakhiran Daftar Pemilih	43229
4	Pencalonan	87
5	Netralitas ASN	694
6	Kampanye	10005
7	Dana Kampanye	63
8	Logistik	42
9	Putungsura	20556
Jumlah		78854

Sumber: Data Bagian Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, 2020

Kegiatan pengawasan yang paling banyak dilakukan adalah pada masa Penyusunan dan Pemutakhiran Daftar Pemilih yaitu sebanyak 43.229 formulir A Pengawasan, karena tahapan tersebut merupakan salah satu tahapan yang terpanjang pelaksanaannya sampai ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT).

b. Analisis Hasil Penyelesaian Sengketa Antar Peserta Pemilihan

Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2020 menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah di 21 (dua puluh satu) Kabupaten/Kota. Meskipun tidak menyelenggarakan pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, namun Bawaslu Provinsi Jawa Tengah tetap melaksanakan beberapa kegiatan melalui rapat koordinasi bersama dengan Bawaslu Kabupaten/Kota. Beberapa Bimbingan Teknis dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dalam rangka meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia terkait Penyelesaian Sengketa Antara Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan pada 21 (dua puluh satu) Bawaslu Kabupaten/Kota. Beberapa diantaranya adalah:

1. Sosialisasi Penanganan Penyelesaian Sengketa Pilkada Serentak 2020;
2. Sosialisasi Penanganan Penyelesaian Sengketa Pilkada Serentak 2020 "Implementasi Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS);
3. Bimbingan Teknis Penyelesaian Sengketa Pilkada Serentak 2020;
4. Simulasi Penyelesaian Sengketa Antara Peserta dengan Penyelenggara Pemilihan Tahun 2020;
5. Simulasi Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS);

6. Penyusunan Laporan Tahunan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Tahun 2020.

Hasil dari bimbingan teknis yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah akhirnya dapat diterapkan di lapangan karena ada 1 (Satu) Kabupaten yang menerima Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan yakni Bawaslu Kabupaten Purworejo dengan jumlah 2 (dua) Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan yang semuanya diajukan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo tahun 2020 atas nama Slamet Riyanto SP., dan Suyanto HS.

Permohonan pertama diterima Bawaslu Kabupaten Purworejo pada tahapan Penyerahan syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yakni Permohonan dengan Nomor Register 0001/PS.REG/33.3306/III/2020. Permohonan Kedua pada tahapan Penyerahan syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada masa Perbaikan yakni Permohonan dengan Nomor Register 0002/PS.REG/33.3306/VIII/2020.

Adapun sebab diajukannya permohonan oleh Pemohon adalah berkaitan dengan syarat dukungan yang diserahkan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dukungan perbaikan dan sebaran, sehingga dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan ditolak oleh KPU Kabupaten Purworejo.

Putusan Bawaslu Kabupaten Purworejo Terhadap Permohonan dengan Nomor Register 0001/PS.REG/33.3306/III/2020 adalah Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Sebagian. Sedangkan Putusan terhadap Permohonan dengan Nomor Register 0002/PS.REG/33.3306/VIII/2020 adalah Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Rincian data penyelesaian sengketa tersebut dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1.11 Penyelesaian Sengketa Antara Peserta Pemilihan Dengan Penyelenggara Pemilihan Pada Pemilihan Tahun 2020 Di Jawa Tengah

No	Kabupaten/ Kota	Pemohon	Termohon	Nomor Register	Putusan
1.	Kabupaten Purworejo	Slamet Riyanto SP dan Suyanto	KPU Kabupaten Purworejo	0001/PS.REG /33.3306/III/2020	Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Sebagian

		HS		0002/PS.REG /33.3306/VIII/20 20	Menolak Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya
--	--	----	--	---------------------------------------	---

Pemohon dalam Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan, tidak mengajukan upaya hukum sengketa tata Usaha Negara Pemilihan baik ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara maupun ke Mahkamah Agung. Pemohon menyatakan telah menerima Putusan Bawaslu Kabupaten Purworejo terhadap Permohonan dengan Nomor Register 0002/PS.REG/33.3306/VIII/2020 yang amar putusannya menolak Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya.

Bawaslu Provinsi Jawa Tengah telah memberikan Bimbingan teknis terkait Penyelesaian Sengketa Antar Peserta Pemilihan (PSAP) kepada seluruh jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota se Jawa Tengah yang melaksanakan Pemilihan 2020. Beberapa kegiatan melalui rapat koordinasi Bersama dengan Bawaslu Kabupaten/Kota dan Bimbingan Teknis telah dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dalam rangka meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia terkait Penyelesaian Sengketa Antar Peserta Pemilihan (PSAP), beberapa diantaranya adalah:

1. Rapat Koordinasi Potensi Sengketa melalui Daring Bersama 21 Kabupaten/Kota;
2. Rapat Koordinasi Mekanisme Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan Tahun 2020 melalui Daring Bersama 21 Kabupaten/Kota;
3. Rapat Koordinasi dalam rangka Simulasi Penyelesaian Sengketa Antar Peserta Pemilihan (PSAP) dan Mekanisme Penghimpunan Data Permohonan PSAP;
4. Pemetaan Potensi Sengketa Pada Tahapan Pungut Hitung dan Perhitungan Suara dan Inventarisasi Masalah untuk Evaluasi Penyelesaian Sengketa.

Selanjutnya, dari 21 (Dua Puluh Satu) Kabupaten/Kota yang telah menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 terdapat 10 (Sepuluh) Permohonan Penyelesaian Sengketa Antar Peserta Pemilihan (PSAP) yang terdiri dari 5 (Lima) Kabupaten/Kota diantaranya adalah 2 (Dua) Permohonan di Bawaslu Kabupaten Klaten, 1 (Satu) Permohonan di Bawaslu Kabupaten Pemasang, 1 (Satu) Permohonan di Bawaslu Kabupaten 1 Pekalongan, 5 (Lima) Permohonan di Kabupaten Sukoharjo dan 1 (Satu) Permohonan di Kota Pekalongan. Dari hasil PSAP yang telah dilakukan musyawarah dengan acara cepat maka 10 Permohonan PSAP

dapat diselesaikan dengan hasil putusan SEPAKAT. Rincian data penyelesaian sengketa PSAP tersedia dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.12 Penyelesaian Segketa Antar Peserta Pemilihan Pada Pemilihan Tahun 2020
Di Jawa Tengah

No	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Jumlah Kasus	Putusan
1.	Kabupaten Klaten	Kecamatan Tulung	1 Permohonan	Sepakat
		Kecamatan Jatinom	1 Permohonan	Sepakat
2.	Kabupaten Pemalang	Kecamatan Petarukan	1 Permohonan	Sepakat
3.	Kabupaten Pekalongan	Kecamatan Tirto	1 Permohonan	Sepakat
4.	Kabupaten Sukoharjo	Kecamatan Baki	1 Permohonan	Sepakat
		Kecamatan Gatak	1 Permohonan	Sepakat
		Kecamatan Grogol	1 Permohonan	Sepakat
		Kecamatan Kartosuro	2 Permohonan	Sepakat
5.	Kota Pekalongan	Kecamatan Pekalongan Utara	1 Permohonan	Sepakat

Sumber : Laporan Komprehensif Bawaslu Prov. Jateng,2020

c. Analisis Hubungan Antar Lembaga

Pemilihan Kepala Daerah bukanlah sekadar ajang seremonial politik belaka yang menafikan partisipasi politik masyarakat. Masyarakat yang menjadi subyek dalam proses Pemilihan. Pengawasan partisipatif yang dilakukan untuk mewujudkan warga negara yang aktif dalam mengikuti perkembangan pembangunan demokrasi. Pengawasan juga menjadi sarana pembelajaran politik yang baik bagi masyarakat pemilih.

Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai lembaga independen yang bertugas melakukan pencegahan dan pengawasan, baik pengawasan pemilu maupun pengawasan pemilihan. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah dalam upaya pencegahan dan pengawasan sangat membutuhkan dukungan banyak pihak. Salah satunya adalah dengan mengajak peran serta kelompok masyarakat untuk terlibat dalam

pengawasan partisipatif. Misalnya, mengajak keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemungutan dan penghitungan suara yang mana masyarakat tidak hanya sekadar datang dan memilih, tetapi juga dapat melakukan pengawasan terhadap adanya potensi kecurangan. Sehingga jika terjadi kecurangan masyarakat dapat melaporkan kepada Bawaslu.

Partisipasi pengawasan masyarakat merupakan wujud pengejawantahan kedaulatan rakyat, hal tersebut merupakan titik fundamental dalam proses demokrasi. Oleh karena itu, salah satu misi Bawaslu adalah mendorong pengawasan partisipatif berbasis masyarakat sipil. Pelibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilihan harus terlebih dulu melalui proses sosialisasi dan transfer pengetahuan dan keterampilan pengawasan Pemilihan dari pengawas Pemilu kepada masyarakat. Sehingga dibutuhkan kolaborasi yang kuat antara Bawaslu dan masyarakat pemilih.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut Bawaslu Provinsi Jawa Tengah melaksanakan program sosialisasi pengawasan partisipatif sebagai perwujudan Peningkatan kolaborasi antara Bawaslu dengan kelompok masyarakat. Adapun kegiatan yang dilaksanakan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah antara lain:

1. Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif

Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dalam perencanaan kegiatannya telah mencanangkan program unggulan yang melibatkan masyarakat kaum millennial. Mereka dapat menjadi garda terdepan untuk berperan melakukan pengawasan partisipatif. Bawaslu membuat program sekolah kader pengawasan partisipatif yang terbagi dalam:

a) Sekolah Kader Pengawas Partisipatif Daring

Selama pandemi COVID-19 yang mengharuskan penerapan pembatasan sosial, Bawaslu tetap melakukan inovasi pendidikan pemilih melalui pelaksanaan SKPP Daring. Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) daring dilaksanakan pada bulan Juni s.d. Agustus 2020. SKPP Daring merupakan Program Nasional Bawaslu Republik Indonesia. Bawaslu berupaya menyediakan fasilitas yang baik dan optimal bagi masyarakat untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan melakukan pengawasan partisipatif.

Pembelajaran mengenai pengawasan Pemilu/Pilkada secara daring ini dilakukan dengan memanfaatkan teknologi yang ada. SKPP Daring diawali dengan peluncuran (launching) oleh Bawaslu Republik Indonesia. Peluncuran dilakukan pada Kamis, 9 April 2020 pukul 16.00 WIB di Kantor Bawaslu RI dengan metode

video konferensi dan disiarkan secara langsung melalui youtube live dan media sosial.

Di Jawa Tengah pendaftar Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif daring mencapai 2.432 pendaftar, namun yang dinyatakan lolos seleksi 22.65 (93%) dan yang tidak memenuhi syarat sejumlah 167 (7%) peserta. Adapun peserta yang mengikuti pelatihan selama 3 bulan sejumlah 2.265 peserta, dari peserta laki-laki sejumlah 1.289 dan peserta perempuan sejumlah 976.

Selain sebagai pengawas partisipatif, peserta SKPP Daring nantinya akan menjadi kader yang merupakan perpanjangan tangan Bawaslu dalam menggerakkan masyarakat di lingkungannya untuk turut mengawasi pemilu dan pilkada. Para peserta SKPP Daring akan mengikuti berbagai materi secara daring. Di antaranya menyaksikan audio visual sebanyak 10 materi dengan berbagai tema. Seperti tema sejarah pemilu, tahapan pemilu, pengawasan pemilu, kerawanan pemilu, penyelesaian sengketa, penanganan pelanggaran, kehumasan, pemantauan dan lain-lain.

Setelah itu, ada tahapan pendalaman materi melalui diskusi video conference. Peserta bisa diskusi secara interaktif dengan para narasumber, peserta juga bisa diskusi melalui chat di aplikasi perpesanan. Meski dilakukan secara daring, komunikasi program ini tidak hanya satu arah yaitu dari Bawaslu kepada peserta. SKPP Daring juga membuka ruang diskusi yang memungkinkan masyarakat menggali lebih dalam pengetahuan mengenai pemilu, pilkada dan pengawasannya. Bahkan, di akhir masa pembelajaran, peserta akan menjalani evaluasi yang juga dilakukan secara daring. Peserta yang dinyatakan lulus, akan diberikan sertifikat. Kelas akan berlangsung selama sekitar sembilan hari. Dalam berbagi pengetahuan, Bawaslu melibatkan anggota Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai tenaga pengajar dan fasilitator. Sedikitnya ada 11 topik besar yang akan disampaikan dalam bentuk teks dan audio visual. Materi yang disampaikan di antaranya mengenai hukum pemilu, pengawasan pemilu, kerawanan pemilu hingga pemantauan pemilu.

Pengawasan partisipatif sebagai upaya mentransformasikan kekuatan moral menjadi gerakan sosial. Bawaslu Provinsi Jawa Tengah tetap berkomitmen untuk membangun sistem pendidikan dan pelatihan pengawasan partisipatif. Tujuannya mempersiapkan kader/pionir penggerak pengawasan partisipatif dalam masyarakat yang diharapkan mampu menduplikasi sistem pengawasan partisipatif ini dalam komunitas – komunitas masyarakat basis.

Dalam sistem pendidikan dan pelatihan pengawasan partisipatif ini telah disiapkan kurikulum pendidikan dan pelatihan oleh Bawaslu RI yang di dalamnya terdapat alur proses dan alur materi sekaligus metodologi yang akan dipergunakan

selama pendidikan dan pelatihan tersebut berlangsung yang tentunya kurikulum ini disesuaikan berdasarkan analisis kebutuhan dari Bawaslu.

b) Sekolah Kader Pengawas Partisipatif Tatap Muka

Bawaslu Provinsi Jawa Tengah telah melakukan kegiatan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan. Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) Gelombang I dilaksanakan pada tanggal 26 s.d 28 Oktober 2020 di Kota Salatiga tepatnya di Hotel Laras Asri Resort, Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 335 Kota Salatiga. Peserta Kegiatan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) Bawaslu Provinsii Jawa Tengah 2020 Gelombang I berjumlah 54 (lima puluh empat) peserta yang berasal dari 18 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Dalam kegiatan SKPP gelombang I menghadirkan narasumber yang berasal dari berbagai macam unsure, adapun detail narasumber dimaksud tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 1.13 Narasumber kegiatan SKPP

No	Narasumber	Jabatan/Unsur	Tema Yang Disampaikan
1	Solkhah Mufrikhah, S.IP., M.Si.	Akademisi	Sistem politik, Sistem Pemerintahan dan Sistem Pemilu di Indonesia, Tahapan Pemilu
2	Wahidah Suaib, S.Ag., M.Si.	Anggota Bawaslu RI Peiode 2007-2012	Pembangunan Karakter”(Kepemimpinan, Kesukarelawanan, Team Bulding)
3	Puspaningrum, S.H, M.H.	Anggota Bawaslu Kab. Boyolali	Fungsi penindakan pengawas pemilu (penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa)
4	M. Milkhan, S.H.i.	Anggota Bawaslu Klaten	Pengawasan Partisipatif
5	Arif Rubai	Aktivis dan Pekerja Sosial	Analisa Sosial dan Malam Ideologisasi Dan Keakraban
6	Kalis Mardiasih, S.Pd.	Penulis dan Aktifis Media Sosial	Advokasi Jurnalistik Dan Media Sosial

Selanjutnya, Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) Bawaslu Provinsi Jawa Tengah 2020 Gelombang II telah dilaksanakan pada tanggal 3 s.d. 5 November 2020 di Kabupaten Banjarnegara tepatnya di Hotel Surya Yudha Park Banjarnegara Jalan Raya Rejasa Banjarnegara, Jawa Tengah. Peserta Kegiatan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) Bawaslu Provinsi Jawa Tengah 2020 Gelombang II berjumlah 51 (lima puluh satu) peserta yang berasal dari 17 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Dalam kegiatan SKPP gelombang II menghadirkan narasumber yang berasal dari berbagai macam unsure, adapun detail narasumber dimaksud tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 1.4 Narasumber kegiatan SKPP

No	Narasumber	Jabatan/Unsur	Tema Yang Disampaikan
1	Titis Perdani, S.IP., M.Sos.	Akademisi	Sistem politik, Sistem Pemerintahan dan Sistem Pemilu di Indonesia, Tahapan Pemilu
2	Sunanto	Ketum PP Pemuda Muhammadiyah	Pembangunan Karakter”(Kepemimpinan, Kesukarelawanan, Team Bulding)
3	Nur Kholiq, S.H., S.Th.I, M.Kn.	Ketua Bawaslu Kabupaten Purworejo	Fungsi penindakan pengawas pemilu (penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa)
4	Endro Wibowo Aji, S.sos.	Anggota Bawaslu Banjarnegara	Pengawasan Partisipatif
5	Arif Rubai	Aktivis dan Pekerja Sosial	Analisa Sosial dan Malam Ideologisasi Dan Keakraban
6	Sumali Ibnu Chamid	Ketua Bawaslu Kabupaten Wonosobo	Advokasi Jurnalistik Dan Media Sosial

2. Sosialisasi Pengawasan Partisipatif

a) Sosialisasi kegiatan langsung

Bawaslu Provinsi Jawa Tengah juga telah menggelar Kegiatan Sosialisasi Partisipatif di Kabupaten Brebes. Sosialisasi ini merupakan upaya mentransformasikan kekuatan moral menjadi gerakan sosial. Mentransformasikan pengetahuan dan keterampilan tentang pengawasan pemilihan. Harapannya dapat menumbuhkan kesadaran, kerelawanan dan panggilan hati nurani untuk ikut berperan serta mewujudkan pemilu yang berkualitas.

Sasaran kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah adalah untuk keterwakilan berbagai unsur lapisan masyarakat seperti organisasi masyarakat, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, media massa, tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan, organisasi mahasiswa, perkumpulan masyarakat, komunitas di bidang seni, budaya dan lain – lain.

Diharapkan dengan adanya program ini masyarakat bisa lebih paham tentang pemilihan, turut serta berperan aktif sebagai pengawas pemilu partisipatif. Kegiatan yang memberikan dampak untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pemilihan dan demokrasi, mengoptimalkan peran serta masyarakat sebagai pengawas pemilu partisipatif dan meningkatkan kepedulian masyarakat dalam membangun demokrasi yang berkualitas.

Adapun narasumber dalam kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif disampaikan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Brebes yang membahas tentang Peran Bawaslu dalam Pengawasan Pemilu dan Pemilihan dan Dr Hamidah Abdurrachman yang merupakan Direktur Pasca Sarjana UNIVERSITAS PANCASAKTI menyampaikan tentang pentingnya peran serta Pengawasan Partisipatif agar pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 dapat berjalan sukses sehingga menghasilkan pemimpin yang amanat.

3. Kegiatan Kerjasama

Bawaslu Provinsi Jawa Tengah merupakan lembaga yang diberikan mandat oleh Undang-Undang untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan tahapan pemilihan. Pengawasan setiap tahapan pemilihan merupakan sebuah keniscayaan untuk dapat mewujudkan pemilihan yang Jurdil dan Luber. Dalam melakukan pengawasan seluruh tahapan pemilihan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah membutuhkan dukungan dari berbagai pihak.

Untuk mempererat hubungan dengan berbagai Stakeholder, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah melakukan Memorandum of Understanding (MoU) atau

kerjasama dengan berbagai pihak. Pada tahun 2020 Bawaslu Provinsi Jawa Tengah telah melakukan MoU dengan 13 lembaga/organisasi dengan rincian 3 kerjasama dengan perguruan tinggi, 1 kerjasama dengan organisasi masyarakat, 9 dengan lembaga pemerintah. Adapun detail hubungan kerjasama dengan yang telah dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

Tabel 1.15 Data Kerjasama Yang Telah Dilaksanakan Pada 2020

NO	JUDUL	SUBYEK	TAHUN
1	Nota Kesepahaman tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	Institut Agama Islam Negeri Surakarta	2020
2	Nota Kesepahaman tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang	2020
3	Nota Kesepahaman tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	Fakultas Hukum Universitas Semarang	2020
4	Nota Kesepahaman tentang Penyelenggaraan Pengawasan Media dan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif	Masyarakat dan Pers Pemantau Pemilu Persatuan Wartawan Indonesia Jawa Tengah	2020
5	Perjanjian Kerja Sama tentang Penanganan Laporan Masyarakat dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Provinsi Jawa Tengah	Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jawa Tengah	2020
6	Nota Kesepahaman Pengadaan Barang / Jasa	Rumah Sakit Umum Daerah KRT Setjonegoro	2020
7	Nota Kesepahaman tentang Pengadaan Melalui Swakelola Tipe II	Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang	2020
8	Nota Kesepahaman Pengadaan Barang / Jasa Pelaksanaan Rapid Test Bagi Jajaran Pengawas di Lingkungan	Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga	2020

NO	JUDUL	SUBYEK	TAHUN
	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah		
9	Nota Kesepahaman tentang Pemeriksaan Kesehatan Berupa Rapid Test Bagi Anggota dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2020	Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen	2020
10	Nota Kesepahaman tentang Pengadaan Rapid Test Bagi Jajaran Pengawas di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah	Rumah Sakit Umum Daerah Kajen Pemerintah Kabupaten Pekalongan	2020
11	Nota Kesepahaman tentang Pengadaan Melalui Swakelola Tipe II	Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo	2020
12	Nota Kesepahaman tentang Pengadaan Melalui Swakelola Tipe II	Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen	2020
13	Nota Kesepahaman tentang Pengadaan Melalui Swakelola Tipe II	Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	2020

Sumber : Bawaslu Provinsi Jawa Tengah,2020

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Bawaslu Provinsi Jawa Tengah mengidentifikasi potensi dan permasalahan untuk mengatasi pengaruh dinamika lingkungan, terutama politik lokal terhadap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Bawaslu. Analisis potensi permasalahan yang terjadi di Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dilakukan menggunakan metode analisis SWOT (Strengths Weaknesses Opportunities Threats) dan BSC (Balanced Score Card) ke

dalam sebuah matriks untuk menemukan strategi yang mungkin dapat dilakukan.

1.2.1. POTENSI

Potensi yang dimiliki Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya, yaitu:

a. Aspek Kelembagaan

Kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan melalui Undang Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggara pemilu dengan dibentuk sebuah lembaga yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Kelembagaan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan Bawaslu Kabupaten/Kota bersifat Permanen. Bawaslu merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan pengawasan, penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Pemilu. Adanya Sumber Daya Manusia yang berkualitas dapat menunjang keberhasilan lembaga.

b. Aspek Regulasi

Perbawaslu nomor 1 tahun 2021 dan Perbawaslu nomor 3 tahun 2020 telah mereformasi pola kerja sumber daya manusia di lembaga pengawas Pemilu . Peran strategis kader pengawas partisipatif berpartisipasi secara aktif dan professional serta handal dalam melaksanakan pengawasan pemilu dan pemilihan yang ada di Kabupaten serta adanya sistem penugasan Pegawai Pemerintah Daerah ke instansi vertikal guna pengisian jabatan struktural sementara

c. Aspek Keuangan

Ketersediaan Anggaran yang mendukung kegiatan pengawasan dan pengadaan sarana melalui belanja barang dan belanja modal.

d. Aspek Proses Bisnis Internal

Sinergi antar seluruh komponen di Bawaslu Provinsi Jawa Tengah antara Kesekretariatan dengan Komisioner dengan memerhatikan sistem dan prosedur kerja yang baik dan telah diterapkan dalam internal Bawaslu Provinsi. Hal –hal yang mendukung aspek ini sebagai berikut:

1. Kapabilitas atau kemampuan karyawan.
2. Kemampuan mengelola sistem informasi.
3. Motivasi, dorongan, dan garis tanggung jawab

e. Aspek Kondisi Umum

Pada tahun 2021 terdapat 4 (empat) Bawaslu Kabupaten/Kota yang sudah satker yaitu:

1. Kota Semarang
2. Kabupaten Semarang
3. Kabupaten Demak
4. Kabupaten Kendal.

Adanya Sakter atau Unit Kerja Mandiri di Bawaslu Kabupaten/Kota dapat mempermudah proses pengelolaan keuangan.

1.2.2. MASALAH

Adapun permasalahan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dapat dijelaskan sebagai berikut

a. Aspek Kelembagaan

Strukturisasi Kelembagaan Sekretariat sebagaimana diatur dalam Perbawaslu nomor 1 Tahun 2021 dan telah diubah dengan Perbawaslu nomor 3 Tahun 2021 yang belum sepenuhnya terlaksana karena belum tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang sesuai dengan SOTK terbaru.

b. Aspek Regulasi

Kewenangan Pembuatan dan Penerbitan Standar Operasional Prosedur hanya ada di Bawaslu sedangkan Birokrasi penetapan Standar Operasional Prosedur menghabiskan waktu yang lama

c. Aspek Keuangan

Di Bawaslu Provinsi Jawa Tengah telah restrukturisasi anggaran sehingga ada beberapa kegiatan yang terkena dampak pemotongan anggaran. Rencana Anggaran Biaya yang diajukan oleh Bawaslu Provinsi seringkali ditolak oleh Bagian Perencanaan dan Organisasi Bawaslu sehingga masih terdapat rencana kegiatan yang belum terfasilitasi secara anggaran

d. Aspek Proses Bisnis Internal

Pegawai teknis di Bawaslu Provinsi Jawa Tengah belum seluruhnya memperoleh diklat pengembangan potensi. Belum adanya reward bagi pegawai yang terbaik sebagai sarana motivasi untuk meningkatkan kinerja

e. Aspek Kondisi Umum

Bawaslu Provinsi Jawa Tengah menempati kantor di atas lahan seluas ± 2245 m² dengan bangunan gedung kantor permanen seluas ± 741 m². Kantor tersebut merupakan gedung milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dipinjam pakai di Jalan Papandayan Selatan nomor 1 Semarang yang akan berakhir di tahun 2022. Status gedung yang seperti itu belum mendukung sifat kelembagaan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah yang permanen.

Tabel 1.16 Matrik Metode Analisis SWOT (Strengths Weaknesses Opportunities Threats)

SWOT BSC	STRENGTHS (KEKUATAN)	WEAKNESSES (KELEMAHAN)	OPPORTUNITIES (PELUANG)	THREATS (ANCAMAN)	REKOMENDASI
Kelembagaan	a. Kelembagaan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan Bawaslu Kabupaten/Kota bersifat Permanen b. Sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan pengawasan, penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Pemilu; c. Adanya fasilitas kantor	a. Restrukturisasi Sekretariat sebagaimana Perbawaslu nomor 7 Tahun 2019 belum sepenuhnya terlaksana di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota b. Struktur Sekretariat belum sempurna berjalan sehingga dukungan teknis dan administratif terhadap pelaksanaan wewenang pengawasan, penanganan pelanggaran dan adjudikasi belum dapat dilakukan secara maksimal c. Fasilitas berupa bangunan dan tanah kantor masih berstatus pinjam pakai	a. Adanya sistem penugasan Pegawai Pemerintah Daerah ke instansi vertikal guna pengisian jabatan struktural sementara b. Dukungan masyarakat terhadap pelaksanaan fungsi-fungsi pengawasan Pemilu, baik dalam pencegahan dan penindakan maupun dalam penyelesaian sengketa; c. Meningkatkan kerjasama dengan Pemda dan adanya mekanisme Tanah Hibah dari Pemerintah Daerah untuk pembangunan kantor permanen d. Kapasitas dan	a. Pegawai PNS DPK dapat ditarik sewaktu-waktu oleh Pemda b. Tahapan Pemilu dan Pemilihan yang padat, Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serta Sengketa Proses yang terjadi pada saat yang bersamaan c. Tidak tersedia anggaran pembangunan kantor permanen dan Beberapa Sumber Daya sarana dan prasarana hanya dapat diperoleh melalui anggaran keuangan d. Jumlah PPNPNS Masih lebih banyak dibanding PNS yang	a. Berkoodinasi kepada Pemda setiap akhir tahun mengenai kebutuhan Pegawai DPK di Bawaslu Kabupaten/Kota b. Melakukan kegiatan pengawasan partisipatif c. Mengajukan usulan ke Bawaslu untuk pembangunan gedung Bawaslu Prov.Jateng d. Mengusulkan ke Biro SDM Bawaslu tentang

	d. Kapasitas Sumber Daya Manusia yang berkualitas	d. Belum adanya jaminan perlindungan keselamatan jiwa secara menyeluruh	Kapabilitas Sumber Daya Manusia Pengawas dan Sekretariat dalam melakukan inovasi	sewaktu-waktu bisa keluar/pindah ke instansi lain	penambahan kuota PNS di Bawaslu Prov.Jateng
Learning and Growth Perspective	a. Perbawaslu nomor 7 tahun 2019 dan Perbawaslu nomor 3 tahun 2020 telah mereformasi pola kerja sumber daya manusia di lembaga pengawas Pemilu	a. Sebagian besar pegawai Sekretariat masih bersifat non-Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau non Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K)	a. Adannya rencana penambahan alokasi Calon Pegawai Negeri Sipil secara berkelanjutan dan mekanisme perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	a. <i>Recofussing</i> anggaran yang menghambat pelaksanaan penambahan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)	a. Membuat Peta Jabatan dan analisis kebutuhan pegawai
Financial Perspective	a. Ketersediaan Anggaran b. Anggaran sesuai Tugas Pokok dan Fungsi	a. Lambatnya penyesuaian sistem kerja lembaga terhadap perubahan mekanisme pelaporan anggaran negara b. Anggaran yang tersedia belum dapat mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi secara maksimal	a. Inovasi sistem kerja yang fleksibel dan responsif terhadap perubahan mekanisme pelaporan anggaran negara b. Inovasi program pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang tepat sasaran dan hemat anggaran	a. Birokrasi lembaga keuangan negara yang kaku b. Program prioritas yang luput dari perencanaan anggaran	a. Membuat Rencana Anggaran Biaya sesuai dengan kebutuhan

Internal Process Perspective	a. Kewenangan Mengusulkan Standar Operasional Prosedur ke Bawaslu untuk ditetapkan	a. Birokrasi penetapan Standar Operasional Prosedur menghabiskan waktu yang lama	a. Koordinasi secara berkelanjutan dengan Bawaslu RI dalam proses penyusunan draft usulan Standar Operasional Prosedur.	a. Peraturan yang berubah memerlukan turunan Standar Operasional Prosedur untuk melaksanakan peraturan dengan segera.	a. Membuat Draft SOP Bawaslu Provinsi yang diusulkan ke Bawaslu untuk disahkan menjadi SOP
Customer Perspective	a. Kewenangan melakukan kerjasama antar lembaga	a. Pendanaan pelaksanaan kerjasama antar lembaga	a. Lembaga Negara lain dengan tugas pokok dan fungsi yang dapat menunjang program pengawas Pemilu	a. Keadaan <i>force majeure</i> yang mengancam keberlangsungan kerjasama antar lembaga	
Kondisi Umum	a. Hanya ada 3 Kabupaten dan 1 Kota, yang sudah Satker b. Kerjasama dengan pemangku kepentingan (stakeholder) dalam pelaksanaan pengawasan pemilu di Wilayah Provinsi Jawa Tengah c. Kapasitas Sumber Daya Manusia yang berkualitas d. Keterbukaan pelayanan terhadap informasi publik e. Ketersediaan kelompok-kelompok	a. Belum terpenuhinya SDM sesuai dengan SOTK; b. Masih terdapat Perguruan tinggi di Jawa Tengah yang belum melakukan MOU dengan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah c. Belum optimalnya peningkatan kapasitas SDM yang mengikuti diklat dan pelatihan-pelatihan lainnya; d. Terbatasnya fasilitas prasarana ruang penyimpanan khusus peralatan kehumasan;	a. Pegawai DPK yang di Bawaslu Kabupaten/Kota sudah mendapatkan ijin mutasi ke Bawaslu b. Meningkatkan kualitas jumlah stakeholder melalui kegiatan web binar yang mengundang narasumber eksternal c. Menempatkan pegawai sesuai dengan kompensasi yang dimiliki d. Tersedianya sarana berupa lemari khusus penyimpanan e. Adanya Program Desa Pengawasan Anti Politik Uang	a. Pegawai DPK belum semuanya menjadi organik sehingga dapat ditarik Pemda b. Masih lemahnya perlindungan hukum terhadap pengawas Pemilu dalam menjalankan tugas dan wewenangnya; c. Belum adanya jaminan perlindungan keselamatan jiwa secara menyeluruh; d. Meningkatnya Resiko hilangnya asset e. Perkembangan persoalan Pemilu selalu lebih cepat dari pada perkembangan regulasi Pemilu; f. Masih terbatasnya anggaran terkait Pendidikan dan Pelatihan Pengawas Pemilu	a. Berkoordinasi dengan Pemda b. Melakukan MOU dengan universitas c. Mendaftarkan Pegawai Bawaslu Provinsi ke BPJS Ketenagakerjaan d. Memasang CCTV diseluruh ruangan e. Melaksanakan kegiatan desa anti politik uang di 35 Kabupaten/Kota f. Melaksanakan kegiatan SKPP secara maksimal sesuai dengan anggaran yang tersedia

	strategis untuk terlibat dalam pelaksanaan pengawasan partisipatif, pelaksanaan tugas kewenangan penyelesaian sengketa Pemilu, dan penegakan hukum Pemilu; f. Perkembangan jumlah pengawas partisipatif yang berasal dari alumni Sekolah Kader Pengawasan Pemilu Partisipatif di Wilayah Provinsi Jawa Tengah yang sebagian besar diikuti oleh generasi millenial.	e. Apatisme masyarakat terhadap adanya pelanggaran Pemilu. f. Kegiatan sekolah kader pengawasan baru terlaksana tahun 2020 di Bawaslu Prov.Jateng	f. Adanya peningkatan jumlah pelaksanaan SKPP menjadi 6 titik di Wilayah Provinsi Jawa Tengah		
--	--	---	--	--	--

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS BAWASLU

2.1 Visi Bawaslu

Mengacu pada Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2020, Bawaslu memiliki Visi yang menunjukkan jati diri dan fungsi Bawaslu dalam menyelenggarakan Pemilu.

“Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Tepercaya”

Penyelenggaraan Pemilu merupakan kerja bersama seluruh komponen bangsa. Keberhasilan atau kegagalan Pemilu ditentukan oleh banyak faktor dan aktor. Oleh karena itu, Bawaslu bertekad untuk menjadi aktor yang mensinergikan seluruh potensi bangsa dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis dan berintegritas. Proses penyelenggaraan Pemilu khususnya pencegahan dan pengawasan harus melibatkan seluruh elemen bangsa, baik dari unsur masyarakat maupun pemangku kepentingan (stakeholder) Pemilu dilaksanakan secara transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif, serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan Pemilu di semua tahapan Pemilu, dimana tujuan akhirnya adalah Bawaslu dapat berkembang menjadi lembaga yang paling dipercaya dan diandalkan oleh rakyat Indonesia dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu.

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata tepercaya yaitu melakukan pengawasan, penindakan pelanggaran Pemilu dan penyelesaian sengketa Pemilu secara profesional, berintegritas, netral, transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif sesuai dengan asas dan prinsip umum penyelenggaraan Pemilu demokratis, sehingga menumbuhkan legitimasi hukum serta moral politik dari publik.

2.1.2 Implementasi Visi Bawaslu RI oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah

Dalam rangka mengimplementasikan Visi Bawaslu. Bawaslu Provinsi Jawa Tengah menjadikan Lembaga Bawaslu sebagai Lembaga yang profesional, berintegritas, menjaga netralitas, transparan, akuntabel, kredibel dan partisipatif.

2.2 Misi Bawaslu

Untuk menjabarkan Visi tersebut, Bawaslu menyusun Misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja selama periode 2020-2024. Adapun Misi Bawaslu adalah:

1. Meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yang inovatif serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif;

2. Meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu yang progresif, cepat dan sederhana;
3. Meningkatkan kualitas prosuk hukum yang harmonis dan terintegrasi;
4. Memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
5. Mempercepat penguatan kelembagaan, dan SDM pengawas serta aparatur Sekretariat di seluruh jenjang kelembagaan pengawas pemilu, melalui penerapan tata kelola organisasi yang professional dan berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik dan bersih.

2.2.1 Implementasi Misi Bawaslu RI oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah

Dalam rangka mengimplementasikan Misi Bawaslu RI. Maka, implementasi Misi oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan melalui Sosialisasi pengawasan partisipatif dan pendidikan politik.
2. Melakukan proses penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa pemilu secara adil dan transparan
3. Meningkatkan kualitas produk hukum dalam proses pelaksanaan pengawasan, penanganan pelanggaran proses penyelesaian sengketa secara terintegrasi.
4. Meningkatkan system layanan informasi public, dan pengembangan teknologi informatika public secara terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel.
5. Meningkatkan penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas SDM Kesekretariatan melalui tata kelola tata kelola organisasi yang professional dan berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik dan bersih.

2.3 Tujuan Bawaslu

Berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Bawaslu, maka tujuan yang ditetapkan Bawaslu adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan efektifitas kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, memperkuat peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif;
- b. Meningkatkan kualitas dan efektifitas kegiatan penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu;
- c. Mewujudkan kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas;
- d. Membangun dan mengembangkan sistem teknologi informasi yang terintegrasi,

- efektif, transparan dan aksesibel;
- e. Meningkatkan kualitas SDM dan tata kelola organisasi secara profesional dan sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik, bersih dan modern.

2.3.1 Implementasi Tujuan Bawaslu RI oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah

Dalam rangka mendukung dan melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan, Implementasi tujuan Bawaslu RI oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, melalui peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif;
2. Meningkatkan kualitas kegiatan penanganan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu secara adil dan transparan;
3. Meningkatkan kajian produk hukum secara periodik dan berkelanjutan
4. Mengembangkan sistem teknologi informasi dan layanan informasi publik yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
5. Meningkatkan kualitas SDM dan tata kelola organisasi secara profesional.

2.4 Sasaran Strategis Bawaslu

Adapun sasaran strategis Bawaslu yang akan dicapai pada periode 2020-2024 adalah:

1. Meningkatkan ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif;
2. Meningkatkan kualitas penanganan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu;
3. Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas;
4. Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
5. Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik, bersih dan modern.

2.4.1 Implementasi Sasaran Bawaslu Provinsi Jawa Tengah

Adapun Implementasi sasaran strategis Bawaslu RI yang telah dicapai oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah:

1. Meningkatkan ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, melalui peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif;

2. Meningkatkan kualitas layanan kegiatan penanganan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu secara adil dan transparan;
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kajian produk hukum secara periodik dan berkelanjutan
4. Mengembangkan kualitas sistem teknologi informasi dan layanan informasi publik yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
5. Meningkatkan kualitas SDM dan tata kelola organisasi secara profesional dan berkelanjutan.

2.5 Kegiatan Strategis Bawaslu Provinsi Jawa Tengah

Bawaslu Provinsi Jawa Tengah memiliki 2 (dua) program yaitu Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dan Program Dukungan Manajemen. Dari kedua program tersebut kemudian dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, sebagai berikut:

- a. Kegiatan-kegiatan untuk melaksanakan Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, yakni:
 1. Pelayanan Publik Lainnya
 2. Kegiatan Pemantauan Lembaga
 3. Kegiatan Perencanaan dan Penganggaran Internal
 4. Kegiatan Layanan Umum
 5. Kegiatan Layanan Internal
 6. Kegiatan Layanan Prasarana Internal
 7. Kegiatan Layanan SDM
 8. Kegiatan Layanan Hukum
 9. Kegiatan Layanan Kehumasan dan Protokol
 10. Layanan Data dan Informasi
 11. Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal
 12. Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal
 13. Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat
 14. Kegiatan untuk melaksanakan Program Dukungan Manajemen, yakni Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Aset.
- b. Kegiatan-kegiatan untuk melaksanakan Program Program Dukungan Manajemen, yakni:
 1. Gaji dan Tunjangan
 2. Operasional dan Pemeliharaan Kantor.

2.6 Arah Kebijakan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Renstra Badan Pengawas Pemilu Tahun 2020-2024, maka Bawaslu Provinsi Jawa Tengah harus membuat arah kebijakan pengawasan pemilu untuk meningkatkan kualitas pengawasan pemilu. Arah Kebijakan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan peran dan fungsi Pengawasan Pemilu;
2. Melakukan Penguatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu melalui Peningkatan regulasi, sistem dan prosedur pengawasan pemilu: pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa;
3. Melakukan Peningkatan dukungan manajemen dan teknis lainnya, sertadukungan struktur kelembagaan Pengawas Pemilu.

2.7 Strategi Bawaslu Provinsi Jawa Tengah

Dalam menyusun rancang bangun atau strategi pengawasan Pemilu 2024, Bawaslu harus bisa menciptakan terobosan dan inovasi pengawasan. Untuk itu perlu menyusun Strategi Pengawasan dalam Persiapan Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024.

1. Melakukan evaluasi sumber daya manusia (SDM) pengawasan. Yaitu Kinerja jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota hingga Pengawas TPS
2. Meningkatkan kualitas pegawai melalui Bimbingan Teknis Kesektarian
3. Menegakkan Regulasi dan Standar Operasional Prosedur Pengawasan, Meningkatkan Koordinasi dengan stakeholder dan mitra strategis lainnya.
4. Membuat Surat Edaran kepada Bawaslu Kabupaten/Kota atas perturan-peraturan yang diciptakan oleh Bawaslu Provinsi sembari menunggu SOP resmi dari Bawaslu
5. Mengoptimalkan pencegahan, memaksimalkan pengawasan, dan menegaskan penanganan pelanggaran.
6. Mendigitalisasi seluruh data dokumen Bawaslu Provinsi Jateng dan mengintegrasikan dengan Website.
7. Mengenalkan Bawaslu Provinsi Jateng ke seluruh lapisan masyarakat khususnya di daerah Jawa Tengah.

BAB III
TARGET KINERJA
DAN KERANGKA PENDANAAN

3.1. Target Kinerja

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan, dan sasaran strategis, telah ditetapkan indikator-indikator sebagai pengukur capaian kinerja yang direncanakan. Indikator dimaksud baik berupa indikator program maupun indikator kegiatan. Rincian indikator dan target pada masing-masing program dan kegiatan, sebagaimana disampaikan pada lampiran Renstra ini. Adapun untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian, setiap sasaran strategis dan Program diukur dengan Indikator Kinerja Utama.

Di dalam Renstra Bawaslu terdapat 2 (dua) tabel Indikator Kinerja Kegiatan karena Tahun 2020 Bawaslu belum melakukan restrukturisasi organisasi Sekretariat Jenderal Bawaslu berdasarkan SOTK yang baru maka tabel Indikator Kinerja untuk Sekretariat Jenderal Bawaslu disusun berdasarkan struktur organisasi yang saat ini masih berlaku. Sedangkan tabel kedua berisi Indikator Kinerja Bawaslu Tahun 2021-2024 dengan mengacu kepada SOTK baru. Pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan oleh 2 (dua) Program yakni:

1. Program Penyelenggaran Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi
2. Program Dukungan Manajemen.

Tabel 3.1 Indikator Kinerja Kegiatan
Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target	Formula
1 1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	100%	1. Jumlah stakeholder yang aktif dalam pelaksanaan pengawasan pemilu partisipatif dibagi stakeholder yang terdaftar x 100 2. Jumlah dugaan pelanggaran berdasarkan laporan hasil pengawasan tahun 2020 - jumlah dugaan pelanggaran berdasarkan laporan hasil pengawasan tahun 2018 dibagi jumlah dugaan pelanggaran berdasarkan laporan hasil pengawasan tahun 2018 x 100 3. Jumlah hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi/putusan penanganan pelanggaran yang terpantau dengan efektif dan efisien dibagi jumlah seluruh putusan atau rekomendasi yang diterima lembaga terkait x 100% 4. Jumlah layanan penerimaan, verifikasi, registrasi dan analisa permohonan penyelesaian sengketa yang dapat dilayani dengan cepat, sederhana, tanpa biaya dan sesuai ketentuan dibagi Jumlah Permintaan Layanan yang masuk x 100% 5. Jumlah Permohonan Informasi yang dilayani dibagi Jumlah permohonan yang masuk x 100%

		Persentase teknis pengawasan atas penyelenggaraan pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan regulasi	100%	Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota yang dilaksanakan secara partisipatif dan melibatkan masyarakat dibagi jumlah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota yang direncanakan x 100
		Persentase pengembangan pusat pendidikan dan pelatihan pengawasan Pemilu	100%	Jumlah kegiatan SKPP dibagi rencana kegiatan X 100
		Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	100%	Jumlah penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota yang tepat waktu, efektif, efisien dan akuntabel dibagi jumlah penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota yang diterima x 100
		Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas Desa/Kelurahan, Pengawas TPS dan Pengawas Luar Negeri	100%	Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, Pengawas TPS dan Pengawas Luar Negeri yang dilayani sesuai dengan Ketentuan yang berlaku dibagi jumlah semua penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, Pengawas TPS dan Pengawas Luar Negeri yang dilaksanakan x 100
		Persentase pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan	100%	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai Kebutuhan dibagi Jumlah semua Pengadaan Sarana dan Prasarana Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota yang dilaksanakan x 100

		Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja	100%	Jumlah Pelayanan Dukungan Operasional Kerja Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota (Pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran serta langganan daya dan jasa) yang tepat waktu dibagi Jumlah semua Pelayanan Dukungan Operasional Kerja Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota (Pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran serta langganan daya dan jasa) yang diselesaikan x 100
--	--	--	------	---

Tabel 3.2 Indikator Kinerja Kegiatan
Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2024

NO	Nama Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	TARGET					Satuan	Formula
					2021	2022	2023	2024		
MISI 1 : MENINGKATKAN KUALITAS PENCEGAHAN DAN PENGAWASAN PEMILU YANG INOVATIF SERTA KEPELOPORAN MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN PARTISIPATIF										
Ketua Bawaslu Jawa Tengah (Sekretariat Tipe A)										
1.	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota serta Lembaga Pengawas Pemilu Ad-Hoc	1. Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Hak-hak politik Variabel memilih dan dipilih terhambat dan ketiadaan/kekurangan fasilitas sebagai penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih)		82	82,5	83	83,5		Hasil Data BPS Indeks Demokerasi Indonesia (IDI)
MISI 2 : MENINGKATKAN KUALITAS PENINDAKAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU YANG PROGRESIF, CEPAT DAN SEDERHANA										
Ketua Bawaslu Jawa Tengah (Sekretariat Tipe A)										
2.	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Oleh Bawaslu Provinsi dan	2. Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu	Indeks Demokrasi Indonesia (Apek Lembaga Demokrasi		75	75,35	75,4	75,45	Nilai	- Hasil BPS

	Bawaslu Kabupaten/Kota serta Lembaga Pengawas Pemilu Ad-Hoc	dan penyelesaian sengketa proses pemilu	Indonesia Variabel Pemilih yang bebas dan adil Indikator Netralitas penyelenggaraan pemilu kecurangan dalam perhitungan suara)							
MISI 3 : MENINGKATKAN KUALITAS PRODUK HUKUM YANG HARMONIS DAN TERINTEGRASI										
Ketua Bawaslu Jawa Tengah (Sekretariat Tipe A)										
3.	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota serta Lembaga Pengawas Pemilu Ad-Hoc	3. Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	1. Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum		Sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi	Predikat	Penilaian oleh pihak ke-3 - Perlu ada kegiatan ini di Bagian PerUU-an & Analisis Hukum.
MISI 4 : MEMPERKUAT SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI UNTUK MENDUKUNG KINERJA PENGAWASAN, PENINDAKAN SERTA PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU TERINTEGRASI, EFEKTIF, TRANSPARAN DAN AKSESIBEL										
Ketua Bawaslu Jawa Tengah (Sekretariat Tipe A)										
4.	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	4. Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang	Kualifikasi keterbukaan informasi publik		Informatif	Informatif	Informatif	Informatif	Predikat	Berdasarkan hasil perhitungan Peraturan

	serta Lembaga Pengawas Pemilu Ad-Hoc	berkualitas								Komisi Informasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Metode dan Teknik Keterbukaan Informasi Publik
			Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)		1,9 (Cukup)	2,2 (Cukup)	2,6 (Cukup)	2,7 (Baik)	Skala (1-5)	Berdasarkan Perpres 95 tahun 2018 tentang SPBE, Permenpan RB No.5 Tahun 2018
MISI 5 : MEMPERCEPAT PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN SDM PENGAWAS SERTA APARATUR SEKRETARIAT DI SELURUH JENJANG KELEMBAGAAN PENGAWAS PEMILU, MELALUI PENERAPAN TATA KELOLA ORGANISASI YANG PROFESIONAL DAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI SESUAI DENGAN PRINSIP TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH										
Ketua Bawaslu Jawa Tengah (Sekretariat Tipe A)										
5.	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota serta Lembaga Pengawas	5. Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang professional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi		65	70	75	82	Nilai	- Hasil Evaluasi RB dari Kementerian PAN RB

	Pemilu Ad-Hoc	yang baik, bersih dan modern								
--	---------------	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Tabel 3.3 Indikator Kinerja Kegiatan
Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2024

NO	Nama Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	TARGET					Satuan	Formula
					2021	2022	2023	2024		
MISI 1 : MENINGKATKAN KUALITAS PENCEGAHAN DAN PENGAWASAN PEMILU YANG INOVATIF SERTA KEPELOPORAN MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN PARTISIPAITF										
Kepala Sekretariat Bawaslu Jawa Tengah(Sekretariat Tipe A)										
1.	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota serta Lembaga Pengawas Pemilu Ad-Hoc	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	1. Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, Pengawas TPS dan Pengawas Luar Negeri			100	100	100	Persen	Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, Pengawas TPS dan

										Pengawas Luar Negeri yang dilayani sesuai dengan Ketentuan yang berlaku dibagi jumlah semua penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, Pengawas TPS dan Pengawas Luar Negeri yang dilaksanakan x 100
			2. Jumlah daerah yang melaksanakan kegiatan Teknis Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota yang				35	35	Daerah	

			disesuaikan dengan regulasi							
			3. Jumlah daerah yang mengembangkan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif hasil piloting		1	1	1	1	Daerah	
			4. Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota	-			100	100	Persen	Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota yang dilakukan partisipatif dan melibatkan masyarakat untuk menciptakan demokrasi yang luberdan jurdil dibagi jumlah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota yang

										telah dilakukan x 100
MISI 2 : MENINGKATKAN KUALITAS PENINDAKAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU YANG PROGRESIF, CEPAT DAN SEDERHANA										
Kepala Sekretariat Bawaslu Jawa Tengah(Sekretariat Tipe A)										
1.	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota serta Lembaga Pengawas Pemilu Ad-Hoc	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, Pengawas TPS dan Pengawas Luar Negeri			100	100	100	Persen	Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, Pengawas TPS dan Pengawas Luar Negeri yang dilayani sesuai dengan Ketentuan yang berlaku dibagi jumlah semua penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada serta

										Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, Pengawas TPS dan Pengawas Luar Negeri yang dilaksanakan x 100
			Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota		100	100	100	100	Persen	Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota yang dilakukan partisipatif dan melibatkan masyarakat untuk menciptakan demokrasi yang luber dan jurdil dibagi jumlah Penyelenggaraan Pengawasan

										Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota yang telah dilakukan x 100
MISI 3 : MENINGKATKAN KUALITAS PRODUK HUKUM YANG HARMONIS DAN TERINTEGRASI										
Kepala Sekretariat Bawaslu Jawa Tengah(Sekretariat Tipe A)										
1.	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota serta Lembaga Pengawas Pemilu Ad-Hoc	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota		100	100	100	100	Persen	Persentase jumlah penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota yang tepat waktu, efektif, efisien dan akuntabel dibagi jumlah penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota yang diterima x 100

MISI 4 : MEMPERKUAT SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI UNTUK MENDUKUNG KINERJA PENGAWASAN, PENINDAKAN SERTA PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU TERINTEGRASI, EFEKTIF, TRANSPARAN DAN AKSESIBEL;										
Kepala Sekretariat Bawaslu Jawa Tengah(Sekretariat Tipe A)										
1.	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota serta Lembaga Pengawas Pemilu Ad-Hoc	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	<i>Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota</i>		100	100	100	100	Persen	Persentase jumlah penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota yang tepat waktu, efektif, efisien dan akuntabel dibagi jumlah penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota yang diterima x 100

MISI 5 : MEMPERCEPAT PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN SDM PENGAWAS SERTA APARATUR SEKRETARIAT DI SELURUH JENJANG KELEMBAGAAN PENGAWAS PEMILU, MELALUI PENERAPAN TATA KELOLA ORGANISASI YANG PROFESIONAL DAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI SESUAI DENGAN PRINSIP TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH										
Kepala Sekretariat Bawaslu Jawa Tengah(Sekretariat Tipe A)										
1.	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota serta Lembaga Pengawas Pemilu Ad-Hoc	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	Persentase pengadaan sarana dan prasarana Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan		100	100	100	100	Persen	Persentase Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai Kebutuhan dibagi Jumlah semua Pengadaan Sarana dan Prasarana Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota yang dilaksanakan x 100

3. 2. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan merupakan perencanaan kebutuhan riil anggaran atau detail penjabaran strategi pendanaan program dan kegiatan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Bawaslu Provinsi Jawa Tengah disusun berdasarkan pagu sementara yang ditetapkan Kementerian Keuangan dengan mengacu pada Rencana Kerja (Renja) Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.

Penyusunan RKA Bawaslu Jawa Tengah dilakukan dengan menggunakan pendekatan penganggaran terpadu, penganggaran berbasis kinerja, dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM). Karena itu, kerangka pendanaan untuk Renstra Bawaslu Provinsi Jawa Tengah 2020-2024 disusun dalam perspektif jangka menengah yang merupakan wujud dari penerapan KPJM.

Penerapan KPJM merupakan pendekatan pendanaan berdasarkan kebijakan dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan. Hal tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran. Tentu saja dengan mempertimbangkan implikasi biaya keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju. Penerapan KPJM dilakukan selama lima tahun.

Kerangka pendanaan Bawaslu 2020-2024 dilakukan untuk mewujudkan visi dan misi, serta tercapainya tujuan dan sasaran strategis Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dalam bentuk pelaksanaan program/kegiatan yang telah disusun berdasarkan indikator dan target kinerja setiap tahun. Kerangka pendanaan disusun berdasarkan tahapan sebagai berikut:

1. Penelaahan (*review*) program dan kegiatan;
2. Penyusunan program dan kegiatan baru untuk periode 2020-2024;
3. Penyusunan anggaran tahun dasar (2020) bagi program dan kegiatan baru;
4. Menyusun prakiraan maju jangka menengah. Perhitungan prakiraan maju dilakukan untuk tahun anggaran 2021, 2022, 2023, hingga 2024 dengan menggunakan tahun dasar 2020.

Matrik Kerangka Pendanaan Bawaslu Jawa Tengah Tahun 2020

Kode	Program / sasaran Program / Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan / Out Put	Satuan/ Volume	2020 (dalam ribuan rupiah)
5245	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsidan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc		
5245.001	Laporan Layanan Administrasi <u>Indikator output:</u> - <i>Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota</i>	36 Laporan/ Dokumen	8.756.428.000
5245.002	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Bawaslu Provinsidan Kabupaten/Kota <u>Indikator output:</u> - Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	36 Laporan/ Dokumen	6.828.574.000
5245.006	Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Hasil Piloting	1 Daerah	268.000.000
5245.007	Laporan Pengelolaan Administrasi dan Manajemen Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses <u>Indikator output:</u> - <i>Persentase engelolaan Administrasi dan Manajemen Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaiaan Sengketa Proses</i>	3 Laporan/ Dokumen	3.008.094.000
5245.008	Laporan Fasilitas Bidang Hukum <u>Indikator output:</u> - <i>Persentase Fasilitas Bidang Hukum</i>	1 Laporan/ Dokumen	593.951.000
5245.009	Laporan Pengelolaan Kehumasan dan Data Informasi	36 Laporan/	1.238.362.000

	Indikator output: - <i>Persentase Pengelolaan Kehumasan dan Data Informasi</i>	Dokumen	
5245.010	Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah	21 Laporan/ Dokumen	185.518.019.000
5245.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal Indikator output: - <i>Persentase pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan</i>	1 Layanan	385.000.000
5245.994	Layanan Perkantoran Indikator output: - <i>Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan jasa) yang tepat waktu</i>	1 Layanan	95.592.554.000

Matrik Kerangka Pendanaan Bawaslu Jawa Tengah Tahun 2021-2024

PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN INPUT					2021	2022	2023	2024	
KODE	Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input		Volume / Target						
			2021	Satuan					
1	2		3	4	5	6	7	8	9
115.CQ	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI					14.976.257.000	15.725.069.850	16.511.323.343	17.336.889.510
5245	TEKNIS PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PEMILU OLEH BAWASLU PROVINSI DAN BAWASLU KABUPATEN/KOTA SERTA LEMBAGA PENGAWAS PEMILU AD-HOC					14.976.257.000	15.725.069.850	16.511.323.343	17.336.889.510
BAH	Pelayanan Publik Lainnya		2	Layanan		387.982.000	407.381.100	427.750.155	449.137.663
	Indikator KRO :						0	0	0
	01	Persentase Pengelolaan Administrasi dan Manajemen Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses	100	%			0	0	0
001	Pengelolaan Administrasi dan Manajemen Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Bawaslu Provinsi		1	Layanan		219.982.000	230.981.100	242.530.155	254.656.663
	Komponen Input :						0	0	0

PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN INPUT						2021	2022	2023	2024
KODE	Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input		Indikator Komponen Input	Volume / Target					
				2021	Satuan				
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	051	Pembinaan/Pelaksanaan Penanganan dan Penindakan Pelanggaran	Jumlah Laporan Pembinaan/Pelaksanaan Penanganan dan Penindakan Pelanggaran	1	Laporan	76.210.000	80.020.500	84.021.525	88.222.601
	052	Pembinaan/Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Pemilu/Pemilihan	Jumlah Laporan Pembinaan/Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Pemilu/Pemilihan	1	Laporan	75.100.000	78.855.000	82.797.750	86.937.638
	053	Fasilitasi Sentra Gakkumdu	Jumlah Laporan Fasilitasi Sentra Gakkumdu	1	Laporan	68.672.000	72.105.600	75.710.880	79.496.424
							0	0	0
002	Pengelolaan Administrasi dan Manajemen Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaiaan Sengketa Proses Bawaslu Kabupaten/Kota			1	Layanan	168.000.000	176.400.000	185.220.000	194.481.000
	Komponen Input :						0	0	0
	051	Pembinaan/Pelaksanaan Penanganan dan Penindakan Pelanggaran	Jumlah Laporan Pembinaan/Pelaksanaan Penanganan dan Penindakan Pelanggaran	21	Laporan	84.000.000	88.200.000	92.610.000	97.240.500
	052	Pembinaan/Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Pemilu/Pemilihan	Jumlah Laporan Pembinaan/Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Pemilu/Pemilihan	21	Laporan	84.000.000	88.200.000	92.610.000	97.240.500
							0	0	0
BKC	Pemantauan Lembaga			110	Laporan	10.859.900.000	11.402.895.000	11.973.039.750	12.571.691.738
	Indikator KRO :						0	0	0
	01	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota		100	%		0	0	0

PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN INPUT					2021	2022	2023	2024	
KODE	Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input		Indikator Komponen Input	Volume / Target					
				2021					Satuan
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	02	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah		0	%		0	0	0
001	Teknis penyelenggaraan pengawasan Pemilu Bawaslu Provinsi			5	Laporan	1.288.790.000	1.353.229.500	1.420.890.975	1.491.935.524
	Komponen Input :						0	0	0
	051	Pengawasan Pemilu Partisipatif	Jumlah Laporan Pengawasan Pemilu Partisipatif	1	Laporan	163.440.000	171.612.000	180.192.600	189.202.230
	052	Pembinaan/Penyelenggaraan Pengawasan dan Supervisi Pengawasan Pemilu/Pemilihan	Jumlah Laporan Pembinaan/Penyelenggaraa n Pengawasan dan Supervisi Pengawasan Pemilu/Pemilihan	1	Laporan	196.164.000	205.972.200	216.270.810	227.084.351
	053	Koordinasi Pengawasan Tahapan Pemilu/Pemilihan	Jumlah Laporan Koordinasi Pengawasan Tahapan Pemilu/Pemilihan	1	Laporan	8.298.000	8.712.900	9.148.545	9.605.972
	054	Fasilitasi, Koordinasi, dan Pelaporan Bawaslu Provinsi	Jumlah Laporan Fasilitasi, Koordinasi, dan Pelaporan Bawaslu Provinsi	1	Laporan	430.272.000	451.785.600	474.374.880	498.093.624
	055	Evaluasi Pengawasan Pemilu/Pemilihan	Jumlah Laporan Evaluasi Pengawasan Pemilu/Pemilihan	1	Laporan	490.616.000	515.146.800	540.904.140	567.949.347
							0	0	0
002	Teknis penyelenggaraan pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten/Kota			105	Laporan	9.571.110.000	10.049.665.500	10.552.148.775	11.079.756.214
	Komponen Input :						0	0	0

PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN INPUT						2021	2022	2023	2024
KODE	Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input		Indikator Komponen Input	Volume / Target					
				2021	Satuan				
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	051	Pengawasan Pemilu Partisipatif	Jumlah Laporan Pengawasan Pemilu Partisipatif	35	Laporan	1.814.400.000	1.905.120.000	2.000.376.000	2.100.394.800
	052	Pembinaan/Penyelenggaraan Pengawasan dan Supervisi Pengawasan Pemilu/Pemilihan	Jumlah Laporan Pembinaan/Penyelenggaraa n Pengawasan dan Supervisi Pengawasan Pemilu/Pemilihan	35	Laporan	311.850.000	327.442.500	343.814.625	361.005.356
	053	Koordinasi Pengawasan Tahapan Pemilu/Pemilihan	Jumlah Laporan Koordinasi Pengawasan Tahapan Pemilu/Pemilihan	0	Laporan	0	0	0	0
	054	Fasilitasi, Koordinasi, dan Pelaporan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Fasilitasi, Koordinasi, dan Pelaporan Bawaslu Provinsi	35	Laporan	7.444.860.000	7.817.103.000	8.207.958.150	8.618.356.058
	055	Evaluasi Pengawasan Pemilu/Pemilihan	Jumlah Laporan Evaluasi Pengawasan Pemilu/Pemilihan	0	Laporan	0	0	0	0
							0	0	0
EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal			2	Layanan	141.970.000	149.068.500	156.521.925	164.348.021
	Indikator KRO :						0	0	0
	01	Persentase penyelesaian pelayanan administrasi perencanaan dan anggaran Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota		100	%		0	0	0
001	Bawaslu Provinsi			1	Layanan	32.770.000	34.408.500	36.128.925	37.935.371
	Komponen Input :						0	0	0
	051	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran	Jumlah Laporan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran	1	Laporan	32.770.000	34.408.500	36.128.925	37.935.371

PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN INPUT					2021	2022	2023	2024	
KODE	Program/ Kegiatan/ KRO/ RO/ Komponen Input		Indikator Komponen Input	Volume / Target					
				2021					Satuan
1	2		3	4	5	6	7	8	9
							0	0	0
002	Bawaslu Kabupaten/Kota			1	Layanan	109.200.000	114.660.000	120.393.000	126.412.650
	Komponen Input :						0	0	0
	051	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran	Jumlah Laporan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran	35	Laporan	109.200.000	114.660.000	120.393.000	126.412.650
							0	0	0
EAC	Layanan Umum			1	Layanan	57.256.000	60.118.800	63.124.740	66.280.977
	Indikator KRO :						0	0	0
	01	Persentase penyelesaian pelayanan administrasi umum Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota		100	%		0	0	0
001	Bawaslu Provinsi			1	Layanan	57.256.000	60.118.800	63.124.740	66.280.977
	Komponen Input :						0	0	0
	051	Pembinaan dan Pengelolaan BMN	Jumlah Pembinaan dan Pengelolaan BMN yang sesuai dengan ketentuan	1	Laporan	57.256.000	60.118.800	63.124.740	66.280.977
	052	Pembinaan dan Pengelolaan Ketatausahaan dan Kearsipan	Jumlah Pembinaan dan Pengelolaan Ketatausahaan dan Kearsipan yang diselenggarakan	0	Laporan	0	0	0	0
							0	0	0
002	Bawaslu Kabupaten/Kota			0	Layanan	0	0	0	0
	Komponen Input :						0	0	0

PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN INPUT						2021	2022	2023	2024
KODE	Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input		Indikator Komponen Input	Volume / Target					
				2021	Satuan				
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	051	Pengelolaan BMN	Jumlah Laporan Pengelolaan BMN	0	Laporan	0	0	0	0
	052	Pengelolaan Ketatausahaan dan Kearsipan	Jumlah Laporan Pengelolaan Ketatausahaan dan Kearsipan	0	Laporan	0	0	0	0
							0	0	0
EAD	Layanan Sarana Internal			2	Unit	40.000.000	42.000.000	44.100.000	46.305.000
	Indikator KRO :						0	0	0
	01	Persentase pengadaan sarana sesuai kebutuhan		80	%		0	0	0
001	Bawaslu Provinsi			2	Unit	40.000.000	42.000.000	44.100.000	46.305.000
	Komponen Input :						0	0	0
	051	Pengadaan kendaraan bermotor	Jumlah unit kendaraan bermotor	0	Unit	0	0	0	0
	052	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	Jumlah unit perangkat pengolah data dan komunikasi	2	Unit	40.000.000	42.000.000	44.100.000	46.305.000
	053	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	Jumlah unit peralatan fasilitas perkantoran	0	Unit	0	0	0	0
							0	0	0
002	Bawaslu Kabupaten/Kota			0	Unit	0	0	0	0
	Komponen Input :						0	0	0

PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN INPUT					2021	2022	2023	2024	
KODE	Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input		Indikator Komponen Input	Volume / Target					
				2021					Satuan
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	051	Pengadaan kendaraan bermotor	Jumlah unit kendaraan bermotor	0	Unit	0	0	0	0
	052	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	Jumlah unit perangkat pengolah data dan komunikasi	0	Unit	0	0	0	0
	053	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	Jumlah unit peralatan fasilitas perkantoran	0	Unit	0	0	0	0
							0	0	0
EAE	Layanan Prasarana Internal			0	Unit	0	0	0	0
	Indikator KRO :						0	0	0
	01	Persentase pengadaan prasarana sesuai kebutuhan		80	%		0	0	0
001	Bawaslu Provinsi			0	Unit	0	0	0	0
	Komponen Input :						0	0	0
	051	Pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan	Jumlah luas pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan	0	M2	0	0	0	0
	052	Pengadaan tanah untuk pembangunan/ renovasi gadung dan bangunan	Jumlah luas pengadaan tanah untuk pembangunan/ renovasi gadung dan bangunan	0	M2	0	0	0	0
							0	0	0
002	Bawaslu Kabupaten/Kota			0	Unit	0	0	0	0
	Komponen Input :						0	0	0

PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN INPUT					2021	2022	2023	2024	
KODE	Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input		Indikator Komponen Input	Volume / Target					
				2021					Satuan
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	051	Pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan	Jumlah luas pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan	0	M2	0	0	0	0
	052	Pengadaan tanah untuk pembangunan/ renovasi gadung dan bangunan	Jumlah luas pengadaan tanah untuk pembangunan/ renovasi gadung dan bangunan	0	M2	0	0	0	0
							0	0	0
EAF	Layanan SDM			36	Orang	26.346.000	27.663.300	29.046.465	30.498.788
	Indikator KRO :						0	0	0
	01	Persentase penyelesaian pelayanan SDM Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota		100	%		0	0	0
001	Bawaslu Provinsi			36	Orang	26.346.000	27.663.300	29.046.465	30.498.788
	Komponen Input :						0	0	0
	051	Pembinaan SDM Pengawas dan Kesekretariatan	Jumlah SDM Pengawas dan Kesekretariatan yang dibina	36	Orang	26.346.000	27.663.300	29.046.465	30.498.788
							0	0	0
002	Bawaslu Kabupaten/Kota			0	Orang	0	0	0	0
	Komponen Input :						0	0	0
	051	Manajemen SDM Pengawas dan Kesekretariatan	Jumlah SDM Pengawas dan Kesekretariatan yang dibina	0	Orang	0	0	0	0
							0	0	0
EAG	Layanan Hukum			1	Layanan	453.268.000	475.931.400	499.727.970	524.714.369

PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN INPUT					2021	2022	2023	2024	
KODE	Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input		Indikator Komponen Input	Volume / Target					
				2021					Satuan
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	Indikator KRO :						0	0	0
	01	Persentase Fasilitasi Bidang Hukum		100	%		0	0	0
001	Layanan Hukum Bawaslu Provinsi			1	Layanan	453.268.000	475.931.400	499.727.970	524.714.369
	Komponen Input :						0	0	0
	051	Advokasi Pelanggaran dan Pidana Pemilu/Pemilihan	Jumlah Laporan Advokasi Pelanggaran dan Pidana Pemilu/Pemilihan yang diselenggarakan sesuai ketentuan	1	Laporan	212.112.000	222.717.600	233.853.480	245.546.154
	052	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Produk Hukum	Jumlah kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Produk Hukum yang diselenggarakan sesuai ketentuan	1	Laporan	241.156.000	253.213.800	265.874.490	279.168.215
	053	Diseminasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Diseminasi Peraturan Perundang-Undangan yang diselenggarakan sesuai SOP	0	Laporan	0	0	0	0
							0	0	0
002	Layanan Hukum Bawaslu Kabupaten/Kota			0	Layanan	0	0	0	0
	Komponen Input :						0	0	0
	051	Advokasi Pelanggaran dan Pidana Pemilu/Pemilihan	Jumlah Laporan Advokasi Pelanggaran dan Pidana Pemilu/Pemilihan yang diproses sesuai ketentuan	0	Laporan	0	0	0	0
							0	0	0
EAI	Layanan Kehumasan dan Protokol			2	Layanan	412.363.000	432.981.150	454.630.208	477.361.718

PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN INPUT					2021	2022	2023	2024	
KODE	Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input		Indikator Komponen Input	Volume / Target					
				2021					Satuan
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	Indikator KRO :						0	0	0
	01	Persentase Pengelolaan Kehumasan		80	%		0	0	0
001	Pengelolaan Kehumasan Bawaslu Provinsi			1	Layanan	155.113.000	162.868.650	171.012.083	179.562.687
	Komponen Input :						0	0	0
	051	Pengelolaan Kehumasan, Peliputan dan Dokumentasi	Jumlah Laporan Pengelolaan Kehumasan, Peliputan dan Dokumentasi	3	Laporan	155.113.000	162.868.650	171.012.083	179.562.687
							0	0	0
002	Pengelolaan Kehumasan Bawaslu Kabupaten/Kota			1	Layanan	257.250.000	270.112.500	283.618.125	297.799.031
	Komponen Input :						0	0	0
	051	Pengelolaan Kehumasan, Peliputan dan Dokumentasi	Jumlah Laporan Pengelolaan Kehumasan, Peliputan dan Dokumentasi	35	Laporan	257.250.000	270.112.500	283.618.125	297.799.031
							0	0	0
EAJ	Layanan Data dan Informasi			1	Layanan	172.328.000	180.944.400	189.991.620	199.491.201
	Indikator KRO :						0	0	0
	01	Persentase Pengelolaan Data dan Informasi		80	%		0	0	0
001	Pengelolaan Data dan Informasi Bawaslu Provinsi			1	Layanan	172.328.000	180.944.400	189.991.620	199.491.201
	Komponen Input :						0	0	0
	051	Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik	Jumlah Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik yang tersedia	1	Laporan	172.328.000	180.944.400	189.991.620	199.491.201

PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN INPUT					2021	2022	2023	2024	
KODE	Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input		Indikator Komponen Input	Volume / Target					
				2021					Satuan
1	2		3	4	5	6	7	8	9
							0	0	0
002	Pengelolaan Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten/Kota			0	Layanan	0	0	0	0
	Komponen Input :						0	0	0
	051	Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik	Jumlah Laporan Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik yang tersedia	0	Laporan	0	0	0	0
							0	0	0
EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal			1	Laporan	1.400.312.000	1.470.327.600	1.543.843.980	1.621.036.179
	Indikator KRO :						0	0	0
	01	Persentase penyelesaian laporan pelaksanaan program Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota		100	%		0	0	0
001	Bawaslu Provinsi			1	Laporan	1.400.312.000	1.470.327.600	1.543.843.980	1.621.036.179
	Komponen Input :						0	0	0
	051	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program	Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program	1	Laporan	1.400.312.000	1.470.327.600	1.543.843.980	1.621.036.179
							0	0	0
002	Bawaslu Kabupaten/Kota			0	Laporan	0	0	0	0
	Komponen Input :						0	0	0
	051	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Program	Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Program	0	Laporan	0	0	0	0

PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN INPUT					2021	2022	2023	2024	
KODE	Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input		Indikator Komponen Input	Volume / Target					
				2021					Satuan
1	2		3	4	5	6	7	8	9
							0	0	0
EAN	Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal			1	Dokumen	384.532.000	403.758.600	423.946.530	445.143.857
	Indikator KRO :						0	0	0
	01	Persentase penyelesaian pelayanan administrasi keuangan Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota		100	%		0	0	0
001	Bawaslu Provinsi			1	Dokumen	384.532.000	403.758.600	423.946.530	445.143.857
	Komponen Input :						0	0	0
	051	Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan	Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan	1	Dokumen	384.532.000	403.758.600	423.946.530	445.143.857
							0	0	0
002	Bawaslu Kabupaten/Kota			0	Dokumen	0	0	0	0
	Komponen Input :						0	0	0
	051	Pengelolaan Administrasi Keuangan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Administrasi Keuangan	0	Dokumen	0	0	0	0
							0	0	0
QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat			1	Orang	640.000.000	672.000.000	705.600.000	740.880.000
	Indikator KRO :						0	0	0
	01	Jumlah daerah yang mengembangkan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif hasil piloting		34	Daerah		0	0	0

PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN INPUT					2021	2022	2023	2024	
KODE	Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input		Indikator Komponen Input	Volume / Target					
				2021					Satuan
1	2		3	4	5	6	7	8	9
001	Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Hasil Piloting			1	Orang	640.000.000	672.000.000	705.600.000	740.880.000
	Komponen Input :						0	0	0
	051	Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Hasil Piloting	Jumlah daerah yang mengembangkan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif hasil piloting	1	Daerah	640.000.000	672.000.000	705.600.000	740.880.000
							0	0	0
115.WA	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN					62.965.667.000	66.113.950.350	69.419.647.868	72.890.630.261
4352	PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DAN ASET					62.965.667.000	66.113.950.350	69.419.647.868	72.890.630.261
EAA	Layanan Perkantoran			2	Layanan	62.965.667.000	66.113.950.350	69.419.647.868	72.890.630.261
	Indikator KRO :						0	0	0
	01	Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan Jasa) yang tepat waktu		100	%		0	0	0
002	Bawaslu Provinsi			1	Layanan	9.332.394.000	9.799.013.700	10.288.964.385	10.803.412.604
	Komponen Input :						0	0	0
	001	Gaji Dan Tunjangan	Jumlah Laporan Gaji Dan Tunjangan	1	Laporan	4.357.074.000	4.574.927.700	4.803.674.085	5.043.857.789

PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN INPUT						2021	2022	2023	2024
KODE	Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input		Indikator Komponen Input	Volume / Target					
				2021	Satuan				
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Jumlah Laporan Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1	Laporan	4.975.320.000	5.224.086.000	5.485.290.300	5.759.554.815
							0	0	0
003	Bawaslu Kabupaten/Kota			1	Layanan	53.633.273.000	56.314.936.650	59.130.683.483	62.087.217.657
	Komponen Input :						0	0	0
	001	Gaji Dan Tunjangan	Jumlah Laporan Gaji Dan Tunjangan	35	Laporan	25.914.270.000	27.209.983.500	28.570.482.675	29.999.006.809
	002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Jumlah Laporan Operasional dan Pemeliharaan Kantor	35	Laporan	27.719.003.000	29.104.953.150	30.560.200.808	32.088.210.848
							0	0	0
							0	0	0
TOTAL						77.941.924.000	81.839.020.200	85.930.971.210	90.227.519.771

BAB IV

PENUTUP

Secara politis, yuridis, dan fungsional, Renstra Bawaslu Provinsi Jawa Tengah 2020- 2024 merupakan panduan bagi Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangannya selama lima tahun ke depan. Secara teknis, Renstra Bawaslu merupakan turunan dari Renstra Bawaslu RI.

Renstra Bawaslu Provinsi Jawa Tengah digunakan sebagai acuan bagi seluruh Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan, Panwaslu Desa Kelurahan/PPL/PPLN, dan Pengawas TPS dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing. Selain itu, melalui Renstra Bawaslu Provinsi Jawa Tengah 2020-2024 ini, seluruh struktur Bawaslu dapat melaksanakan tugas, fungsi, kewenangannya secara transparan, akuntabel dan kredibel, serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*) organisasi.

Dalam menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra Bawaslu Provinsi Jawa Tengah 2020- 2024 ini, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah akan melakukan evaluasi setiap tahun. Bawaslu Provinsi Jawa Tengah juga akan melakukan adaptasi terhadap perkembangan yang ada dengan cara melakukan perubahan (revisi) terhadap muatan Renstra Bawaslu Provinsi Jawa Tengah 2020- 2024, sesuai dengan arahan dari Bawaslu RI serta Renstra Bawaslu RI Tahun 2020 – 2021.

Pada akhirnya perlu ditegaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan Renstra Bawaslu Provinsi Jawa Tengah 2020-2024 ini sangat ditentukan oleh sejumlah faktor, antara lain: regulasi, sistem, struktur, kultur, anggaran, personil, sarana- prasarana, hubungan antar lembaga, dan *stakeholder* Pemilu.

MASUKKAN NOMOR URUT
KABUPATEN/KOTA

33

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/ LEMBAGA
KOTA SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2024

Revisi ke-5

15.899.373.000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ KOMPONEN INPUT/AKUN/ RINCIAN BELANJA	DETAIL	VOL. KEG	BIAYA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 4 * 5
115.CQ	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI				14.259.719.000
5245	TEKNIS PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PEMILU OLEH BAWASLU PROVINSI DAN BAWASLU KABUPATEN/KOTA SERTA LEMBAGA PENGAWAS PEMILU AD-HOC				118.803.000
5245.BAH	Pelayanan Publik Lainnya				41.276.000
5245.BAH.001	Layanan Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota				41.276.000
301	Koordinasi Penanganan Pelanggaran (Kabupaten/Kota)				3.580.000
A)	Koordinasi Penanganan Pelanggaran				3.580.000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				3.580.000
	- Penginapan Eselon III	1 HARI x 1 ORG x 1 KALI x 1 K/K	1 OH	600.000	600.000
	- Penginapan Staf	1 HARI x 1 ORG x 1 KALI x 1 K/K	1 OH	600.000	600.000
	- Uang Harian Eselon III	2 HARI x 1 ORG x 1 KALI x 1 K/K	2 OH	370.000	740.000
	- Uang Harian Staf	2 HARI x 1 ORG x 1 KALI x 1 K/K	2 OH	370.000	740.000
	- Transport Eselon III	1 HARI x 1 ORG x 1 KALI x 1 K/K	1 OK	450.000	450.000
	- Transport Staf	1 HARI x 1 ORG x 1 KALI x 1 K/K	1 OK	450.000	450.000
302	Koordinasi Penyelesaian Sengketa Proses				37.696.000
A)	Supervisi Penyelesaian Sengketa Antar Peserta Pemilu (PSAP) ke Kecamatan				3.840.000
524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota				3.840.000
	- Uang Harian	3 KALI x 4 ORG x 1 KK	12 OH	150.000	1.800.000
	- Transport	3 KALI x 4 ORG x 1 KK	12 OK	170.000	2.040.000
B)	Koordinasi Evaluasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Tahun 2024				4.004.000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				4.004.000
	- Penginapan Eselon III	1 HARI x 1 ORG x 1 KALI x 1 KK	1 OH	1.024.000	1.024.000
	- Penginapan	1 HARI x 1 ORG x 1 KALI x 1 KK	1 OH	600.000	600.000
	- Uang Harian	2 HARI x 2 ORG x 1 KALI x 1 KK	4 OH	370.000	1.480.000
	- Transport	1 HARI x 2 ORG x 1 KALI x 1 KK	2 OK	450.000	900.000
C)	Koordinasi Wilayah Penyusunan Laporan Akhir Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu 2024				4.004.000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				4.004.000
	- Penginapan Eselon III	1 HARI x 1 ORG x 1 KALI x 1 KK	1 OH	1.024.000	1.024.000
	- Penginapan	1 HARI x 1 ORG x 1 KALI x 1 KK	1 OH	600.000	600.000
	- Uang Harian	2 HARI x 2 ORG x 1 KALI x 1 KK	4 OH	370.000	1.480.000
	- Transport	1 HARI x 2 ORG x 1 KALI x 1 KK	2 OK	450.000	900.000
D)	Koordinasi Wilayah Penyusunan Buku Inovasi Penyelesaian Sengketa Proses				4.004.000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				4.004.000
	- Penginapan Eselon III	1 HARI x 1 ORG x 1 KALI x 1 KK	1 OH	1.024.000	1.024.000
	- Penginapan	1 HARI x 1 ORG x 1 KALI x 1 KK	1 OH	600.000	600.000
	- Uang Harian	2 HARI x 2 ORG x 1 KALI x 1 KK	4 OH	370.000	1.480.000
	- Transport	1 HARI x 2 ORG x 1 KALI x 1 KK	2 OK	450.000	900.000
E)	Penyusunan Buku Evaluasi Penyelesaian Sengketa Proses				8.186.000
521211	Belanja Bahan				6.386.000
	> Rapat di Kantor				
	- Penggandaan/Fotocopy	1 KALI x 1 PAKET x 1 KK	1 PKT	750.000	750.000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ KOMPONEN INPUT/AKUN/ RINCIAN BELANJA	DETAIL								VOL. KEG		BIAYA SATUAN	JUMLAH	
	- Belanja ATK	1	KALI	x	1	PAKET	x	1	KK	1	PKT	586.000	586.000	
	- Komputer Supply	1	KALI	x	1	PAKET	x	1	KK	1	PKT	500.000	500.000	
	- Konsumsi dan Snack	1	KALI	x	15	ORG	x	1	KK	15	OK	70.000	1.050.000	
	- Percetakan Buku	1	BK	x	50	EKS	x	1	KK	50	EKS	70.000	3.500.000	
522151	Belanja Jasa Profesi												1.800.000	
	- Narasumber	1	KALI	x	2	JAM	x	1	ORG x	1	KK	2 OJ	900.000	1.800.000
	F) Rapat Kerja Teknis Penyelesaian Sengketa Antar Peserta Pemilu dengan Panwaslu Kecamatan dan Stakeholder												8.538.000	
521211	Belanja Bahan												3.338.000	
	> Rapat di Kantor													
	- Penggandaan/Fotocopy	1	KALI	x	1	PAKET	x	1	KK	1	PKT	750.000	750.000	
	- Belanja ATK	1	KALI	x	1	PAKET	x	1	KK	1	PKT	688.000	688.000	
	- Komputer Supply	1	KALI	x	1	PAKET	x	1	KK	1	PKT	500.000	500.000	
	- Konsumsi dan Snack	1	KALI	x	20	ORG	x	1	KK	20	OK	70.000	1.400.000	
522151	Belanja Jasa Profesi												1.800.000	
	- Narasumber	1	KALI	x	2	JAM	x	1	ORG x	1	KK	2 OJ	900.000	1.800.000
524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota												3.400.000	
	- Transport	1	KALI	x	20	ORG	x	1	KK	20	OH	170.000	3.400.000	
	G) Supervisi dan Monitoring Sengketa Proses Pemilu												5.120.000	
524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota												5.120.000	
	- Uang Harian	4	KALI	x	4	ORG	x	1	KK	16	OH	150.000	2.400.000	
	- Transport	4	KALI	x	4	ORG	x	1	KK	16	OK	170.000	2.720.000	
5245.BKC	Pemantauan Lembaga												77.527.000	
5245.BKC.001	Laporan Hasil Pencegahan/ Pengawasan Pemilu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota												77.527.000	
301	Pengawasan pemilu partisipatif (Kab/Kota)												32.800.000	
	A) Sosialisasi Masyarakat Pinggiran/ Marginal di Bawaslu Kabupaten/Kota												22.400.000	
521211	Belanja Bahan												8.400.000	
	- Konsumsi dan Snack	2	KALI	x	60	ORG	x	1	K/K	120	OK	70.000	8.400.000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota												14.000.000	
	- Transport peserta dan panitia	2	KALI	x	70	ORG	x	1	KK	140	OK	100.000	14.000.000	
	B) Bawaslu Goes to School / Campus												10.400.000	
521211	Belanja Bahan												8.400.000	
	- Konsumsi dan Snack	2	KALI	x	60	ORG	x	1	KK	120	OK	70.000	8.400.000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota												2.000.000	
	- Transport Panitia	2	KALI	x	10	ORG	x	1	KK	20	OK	100.000	2.000.000	
302	Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan Bawaslu Kabupaten/Kota												30.410.000	
	A) Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan (Kab./Kota)												30.410.000	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota												17.610.000	
	> KOORDINASI KE PUSAT/LUAR PROVINSI												14.030.000	
	- Transport Provinsi - Jakarta/Luar Daerah	1	KALI	x	3	ORG	x	1	KK	3	OK	2.182.000	6.546.000	
	- Taxi	1	KALI	x	2	ORG	x	1	KK	2	OK	692.000	1.384.000	
	- Penginapan	1	KALI	x	2	ORG	x	2	HARI x	1	KK	4 OH	730.000	2.920.000
	- Uang Harian	1	KALI	x	2	ORG	x	3	HARI x	1	KK	6 OH	530.000	3.180.000
	> KOORDINASI KE PROVINSI												-	
	- Penginapan	1	KALI	x	2	ORG	x	1	HARI x	0	KK	0 OH	600.000	-
	- Uang Harian	1	KALI	x	2	ORG	x	2	HARI x	0	KK	0 OH	370.000	-
	- Transport	1	KALI	x	2	ORG	x	0	KK	0	OK	450.000	-	
	> BAWASLU KOTA SEMARANG												3.580.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ KOMPONEN INPUT/AKUN/ RINCIAN BELANJA	DETAIL										VOL. KEG		BIAYA SATUAN	JUMLAH	
	- Penginapan	1	KALI	x	2	ORG	x	1	HARI	x	1	KK	2	OH	600.000	1.200.000
	- Uang Harian	1	KALI	x	2	ORG	x	2	HARI	x	1	KK	4	OH	370.000	1.480.000
	- Transport	1	KALI	x	2	ORG	x	1					2	OK	450.000	900.000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota															12.800.000
	> Bawaslu Kota Semarang															12.800.000
	- Uang Harian	10	KALI	x	4	ORG	x	1					40	OH	150.000	6.000.000
	- Transport	10	KALI	x	4	ORG	x	1					40	OK	170.000	6.800.000
303	Evaluasi pelaksanaan pengawasan (Kab./Kota)															4.800.000
	A) Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Pemilu Partisipatif															4.800.000
521211	Belanja Bahan															3.400.000
	- Belanja ATK	2	KALI	x	1	PAKET	x	1					2	PAKET	300.000	600.000
	- Konsumsi dan Snack	2	KALI	x	20	ORG	x	1					40	OK	70.000	2.800.000
524113	Transport Peserta															1.400.000
	Transport Peserta Luar	2	KALI	x	7	ORG	x	1					14	OK	100.000	1.400.000
304	Pemutakhiran data pemilih tetap berkelanjutan (Kab./Kota)															4.100.000
	A) Rapat Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten/Kota															4.100.000
521211	Belanja Bahan															4.100.000
	- Penggandaan/Fotocopy	2	Kali	x	1	Paket	x	1					2	PKT	300.000	600.000
	- ATK	2	Kali	x	1	Paket	x	1					2	PKT	400.000	800.000
	- Komputer Supply	2	Kali	x	1	Paket	x	1					2	PKT	300.000	600.000
	- Konsumsi dan Snack	2	Kali	x	15	ORG	x	1					30	PKT	70.000	2.100.000
305	Fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas															5.417.000
	A) Fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas (Kab./Kota)															5.417.000
521211	Belanja Bahan															3.417.000
	- Penggandaan/Fotocopy	1	KALI	x	1	PAKET	x	1					1	PKT	417.000	417.000
	- Belanja ATK	1	KALI	x	1	PAKET	x	1					1	PKT	400.000	400.000
	- Komputer Supply	1	KALI	x	1	PAKET	x	1					1	PKT	500.000	500.000
	- Konsumsi dan snack	1	KALI	x	30	ORG	x	1					30	PKT	70.000	2.100.000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota															2.000.000
	- Uang Transport Pihak Luar	1	KALI	x	20	ORG	x	1					20	OK	100.000	2.000.000
6661	PERENCANAAN, PROGRAM DAN ANGGARAN SERTA PENYUSUNAN PERATURAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILU															4.006.808.000
6661.QIC	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga															4.006.808.000
6661.QIC.001	Fasilitasi dan Pembinaan Perencanaan, Program dan Anggaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu															2.170.171.000
301	Perencanaan program dan anggaran pengawasan penyelenggaraan pemilu (Kab./Kota)															105.436.000
	A) Rapat Pembahasan Perencanaan program dan anggaran pengawasan penyelenggaraan pemilu															36.316.000
521211	Belanja Bahan															1.392.000
	- Penggandaan/Fotocopy	1	KALI	x	1	PAKET	x	1					1	PAKET	367.000	367.000
	- Belanja ATK	1	KALI	x	1	PAKET	x	1					1	PAKET	350.000	350.000
	- Komputer Supply	1	KALI	x	1	PKT	x	1					1	PAKET	300.000	300.000
	- Snack (Rapat Persiapan)	1	KALI	x	25	ORG	x	1					25	OK	15.000	375.000
522151	Belanja Jasa Profesi															1.800.000
	- Narasumber	1	KALI	x	2	JAM	x	1	ORG	x	1	K/K	2	OJ	900.000	1.800.000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa															17.324.000
	> KOORDINASI KE PROVINSI															
	- Penginapan Eselon III	4	KALI	x	1	ORG	x	1	HARI	x	1	KK	4	OH	1.201.000	4.804.000
	- Penginapan	4	KALI	x	1	ORG	x	1	HARI	x	1	KK	4	OH	750.000	3.000.000
	- Uang Harian	4	KALI	x	2	ORG	x	2	HARI	x	1	KK	16	OH	370.000	5.920.000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ KOMPONEN INPUT/AKUN/ RINCIAN BELANJA	DETAIL										VOL. KEG		BIAYA SATUAN	JUMLAH
	- Transport	4	KALI	x	2	ORG	x	1	KK			8	OK	450.000	3.600.000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota														15.800.000
	- Paket Rapat Halfday Panitia, Narasumber Es III, Moderator	1	KALI	x	10	Org	x	1	KK			10	OH	200.000	2.000.000
	- Paket Rapat Halfday Peserta	1	KALI	x	30	Org	x	1	KK			30	OH	200.000	6.000.000
	- Uang Harian Halfday Panitia	1	KALI	x	10	Org	x	1	KK			10	OH	95.000	950.000
	- Uang Harian Halfday Peserta	1	KALI	x	30	Org	x	1	KK			30	OH	95.000	2.850.000
	- Uang Transport	1	KALI	x	40	Org	x	1	KK			40	OK	100.000	4.000.000
B)	Pelaporan Keuangan ke Bawaslu Provinsi														11.520.000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa														0
	> Pelaporan Keuangan ke Bawaslu Provinsi														0
	- Penginapan	12	KALI	x	3	ORG	x	1	HARI	x	0	0	OH	600.000	0
	- Uang Harian	12	KALI	x	3	ORG	x	2	HARI	x	0	0	OH	370.000	0
	- Transport	12	KALI	x	3	ORG	x	0	K/K			0	OK	450.000	0
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota														11.520.000
	> Bawaslu Kota Semarang														11.520.000
	- Transport	12	KALI	x	3	ORG	x	1	KK			36	OH	170.000	6.120.000
	- Uang Harian Lebih dari 8 Jam	12	KALI	x	3	ORG	x	1	KK			36	OK	150.000	5.400.000
C)	Supervisi Keuangan ke Kecamatan														57.600.000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota														57.600.000
	> Perjadin Dalam Kota														57.600.000
	- Transport	5	KALI	x	3	ORG	x	12	BLN	x	1	180	OH	170.000	30.600.000
	- Uang Harian Lebih dari 8 Jam	5	KALI	x	3	ORG	x	12	BLN	x	1	180	OK	150.000	27.000.000
302	Sosialisasi dan implementasi peraturan dan non peraturan Bawaslu														33.025.000
A)	Sosialisasi Peraturan Bawaslu dan Produk Hukum Non Perbawaslu														28.025.000
	> Rapat Fullday dalam kota														
521211	Belanja Bahan														1.500.000
	- Penggandaan/Fotocopy	1	KALI	x	1	PAKET	x	1	KK			1	PKT	300.000	300.000
	- Belanja ATK	1	KALI	x	1	PAKET	x	1	KK			1	PKT	300.000	300.000
	- Komputer Supply	1	KALI	x	1	PAKET	x	1	KK			1	PKT	300.000	300.000
	- Spanduk	1	KALI	x	2	PAKET	x	1	KK			2	PKT	300.000	600.000
522151	Belanja Jasa Profesi														3.600.000
	- Narasumber Eselon III	1	KALI	x	2	JAM	x	2	ORG	x	1	4	OJ	900.000	3.600.000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota														22.925.000
	- Paket Rapat Fullday	1	HARI	x	60	ORG	x	1	KALI	x	1	60	OH	200.000	12.000.000
	- Uang Harian Fullday Peserta	1	HARI	x	50	ORG	x	1	KALI	x	1	50	OH	95.000	4.750.000
	- Uang Harian Fullday Panitia	1	HARI	x	5	ORG	x	1	KALI	x	1	5	OH	95.000	475.000
	- Uang Transport Peserta	1	KALI	x	50	ORG	x	1	KK			50	OH	100.000	5.000.000
	- Uang Transport Panitia	1	KALI	x	5	ORG	x	1	KK			5	OH	100.000	500.000
	- Uang Transport Narasumber	1	KALI	x	2	ORG	x	1	KK			2	OH	100.000	200.000
B)	Rapat Penyusunan Kajian Hukum Perbawaslu/Produk Hukum Non Perbawaslu														5.000.000
521211	Belanja Bahan														3.000.000
	- Penggandaan/Fotocopy	1	KALI	x	1	PAKET	x	1	K/K			1	PKT	300.000	300.000
	- Belanja ATK	1	KALI	x	1	PAKET	x	1	K/K			1	PKT	250.000	250.000
	- Komputer Supply	1	KALI	x	1	PAKET	x	1	K/K			1	PKT	350.000	350.000
	- Konsumsi dan Snack	1	KALI	x	30	ORG	x	1	K/K			30	OK	70.000	2.100.000
522151	Belanja Jasa Profesi														2.000.000
	- Narasumber	1	KALI	x	2	JAM	x	1	ORG	x	1	2	OJ	1.000.000	2.000.000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ KOMPONEN INPUT/AKUN/ RINCIAN BELANJA	DETAIL	VOL. KEG	BIAYA SATUAN	JUMLAH
303	Fasilitasi dan pembinaan aparatur pengawas pemilu (Kab./Kota)				453.681.000
A)	Fasilitasi pembinaan aparatur administrasi dan konsolidasi sekretariat				28.560.000
521211	Belanja Bahan				1.200.000
	- Penggandaan/Fotocopy	1 KALI x 1 PAKET x 1 K/K	1 PAKET	300.000	300.000
	- Spanduk	1 KALI x 1 PAKET x 1 K/K	1 PAKET	300.000	300.000
	- Belanja ATK	1 KALI x 1 PAKET x 1 K/K	1 PAKET	300.000	300.000
	- Komputer Supply	1 KALI x 1 PAKET x 1 K/K	1 PAKET	300.000	300.000
522151	Belanja Jasa Profesi				3.600.000
	- Narasumber Eselon III	1 KALI x 2 JAM x 2 ORG x 1 K/K	4 OJ	900.000	3.600.000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				850.000
	> Supervisi, Monitoring dan Evaluasi				850.000
	- Supervisi/ Monev ke Kecamatan	1 KALI x 5 ORG x 1 K/K	5 OK	170.000	850.000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota				22.910.000
	- Paket Rapat Halfday Panitia, Narasumber Es III, Moderator	1 KALI x 10 Org x 1 KK	10 OH	200.000	2.000.000
	- Paket Rapat Halfday Peserta	1 KALI x 3 Org x 16 KEC	48 OH	200.000	9.600.000
	- Uang Harian Halfday Panitia	1 KALI x 10 Org x 1 KK	10 OH	95.000	950.000
	- Uang Harian Halfday Peserta	1 KALI x 3 Org x 16 KEC	48 OH	95.000	4.560.000
	- Uang Transport	1 KALI x 58 Org	58 OK	100.000	5.800.000
B)	Koordinasi pembentukan pengawas Ad-hoc				30.860.000
521211	Belanja Bahan				2.650.000
	- Konsumsi dan Snack	1 KALI x 25 ORG x 1 K/K	25 PAKET	70.000	1.750.000
	- Penggandaan/Fotocopy	1 KALI x 1 PAKET x 1 K/K	1 PAKET	300.000	300.000
	- Belanja ATK	1 KALI x 1 PAKET x 1 K/K	1 PAKET	300.000	300.000
	- Komputer Supply	1 KALI x 1 PAKET x 1 K/K	1 PAKET	300.000	300.000
522151	Belanja Jasa Profesi				3.600.000
	- Narasumber Eselon III	1 KALI x 2 JAM x 2 ORG x 1 K/K	4 OJ	900.000	3.600.000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				1.700.000
	> Supervisi, Monitoring dan Evaluasi				1.700.000
	- Supervisi/ Monev ke Kecamatan	2 KALI x 5 ORG x 1 K/K	10 OK	170.000	1.700.000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota				22.910.000
	- Paket Rapat Halfday Panitia, Narasumber Es III, Moderator	1 KALI x 10 Org x 1 KK	10 OH	200.000	2.000.000
	- Paket Rapat Halfday Peserta	1 KALI x 3 Org x 16 KEC	48 OH	200.000	9.600.000
	- Uang Harian Halfday Panitia	1 KALI x 10 Org x 1 KK	10 OH	95.000	950.000
	- Uang Harian Halfday Peserta	1 KALI x 3 Org x 16 KEC	48 OH	95.000	4.560.000
	- Uang Transport	1 KALI x 58 Org	58 OK	100.000	5.800.000
C)	Bimtek pengelolaan administrasi kesekretariatan (Keuangan dan Kearsipan)				55.514.000
521211	Belanja Bahan				2.494.000
	- Penggandaan/Fotocopy	2 KALI x 1 PAKET x 1 K/K	2 PAKET	347.300	694.000
	- Spanduk	2 KALI x 1 PAKET x 1 K/K	2 PAKET	300.000	600.000
	- Belanja ATK	2 KALI x 1 PAKET x 1 K/K	2 PAKET	300.000	600.000
	- Komputer Supply	2 KALI x 1 PAKET x 1 K/K	2 PAKET	300.000	600.000
522151	Belanja Jasa Profesi				7.200.000
	- Narasumber Eselon III	2 KALI x 2 JAM x 2 ORG x 1 K/K	8 OJ	900.000	7.200.000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota				45.820.000
	- Paket Rapat Halfday Panitia, Narasumber Es III, Moderator	2 KALI x 10 Org x 1 KK	20 OH	200.000	4.000.000
	- Paket Rapat Halfday Peserta	2 KALI x 3 Org x 16 KEC	96 OH	200.000	19.200.000
	- Uang Harian Halfday Panitia	2 KALI x 10 Org x 1 KK	20 OH	95.000	1.900.000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ KOMPONEN INPUT/AKUN/ RINCIAN BELANJA	DETAIL								VOL. KEG	BIAYA SATUAN	JUMLAH
	- Uang Harian Halfday Peserta	2	KALI	x	3	Org	x	16	KEC	96	OH	9.120.000
	- Uang Transport	2	KALI	x	58	Org				116	OK	11.600.000
	D) Peningkatan Soliditas SDM Bawaslu Kabupaten/Kota											39.120.000
521211	Belanja Bahan											1.380.000
	- Penggandaan/Fotocopy	1	KALI	x	1	PAKET	x	1	K/K	1	PAKET	380.000
	- Belanja ATK	1	KALI	x	1	PAKET	x	1	K/K	1	PAKET	400.000
	- Komputer Supply	1	KALI	x	1	PKT	x	1	K/K	1	PAKET	400.000
	- Spanduk	1	KALI	x	1	PKT	x	1	K/K	1	PAKET	200.000
522151	Belanja Jasa Profesi											5.400.000
	- Narasumber	1	KALI	x	2	JAM	x	3	ORG x 1 K/K	6	OJ	900.000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota											32.340.000
	- Paket Rapat Fullboard Narasumber dan Peserta	1	KALI	x	30	Org	x	1	KK x 1 HARI	30	OH	648.000
	- Uang Harian Fullboard Peserta	1	KALI	x	30	Org	x	1	KK x 2 HARI	60	OH	130.000
	- Uang Transport	1	KALI	x	30	Org	x	1	KK	30	OK	170.000
	E) Peningkatan Kapasitas dan Soliditas Bawaslu Kab/Kota dan Panwaslu Kecamatan Pemilu/Pemilihan											58.100.000
521211	Belanja Bahan											1.200.000
	- Penggandaan/Fotocopy	1	KALI	x	1	PAKET	x	1	K/K	1	PAKET	300.000
	- Belanja ATK	1	KALI	x	1	PAKET	x	1	K/K	1	PAKET	300.000
	- Komputer Supply	1	KALI	x	1	PKT	x	1	K/K	1	PAKET	300.000
	- Spanduk	1	KALI	x	1	PKT	x	1	K/K	1	PAKET	300.000
522151	Belanja Jasa Profesi											3.600.000
	- Narasumber	1	KALI	x	2	JAM	x	2	ORG x 1 K/K	4	OJ	900.000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota											53.300.000
	- Paket Rapat Fullboard Panitia, Narasumber Es III, Moderator	1	KALI	x	20	Org	x	1	KK x 1 HARI	20	OH	500.000
	- Paket Rapat Fullboard Peserta	1	KALI	x	3	Org	x	16	Kec x 1 HARI	48	OH	500.000
	- Uang Harian Fullboard Panitia	1	KALI	x	18	Org	x	1	KK x 2 HARI	36	OH	100.000
	- Uang Harian Fullboard Peserta	1	KALI	x	3	Org	x	16	Kec x 2 HARI	96	OH	100.000
	- Uang Transport Panitia	1	KALI	x	13	Org	x	1	KK	13	OK	100.000
	- Uang Transport Peserta	1	KALI	x	3	Org	x	16	Kec	48	OK	100.000
	F) Penerbitan Buku SDM Hasil Pengolahan Basis Data Pengawas Ad Hoc Pemilu 2024 di seluruh kab/kota se-Jawa Tengah											39.000.000
521211	Belanja Bahan											22.500.000
	> Rapat di Kantor											
	- Penggandaan/Fotocopy	1	KALI	x	1	PAKET	x	1	K/K	1	PKT	300.000
	- Belanja ATK	1	KALI	x	1	PAKET	x	1	K/K	1	PKT	300.000
	- Komputer Supply	1	KALI	x	1	PAKET	x	1	K/K	1	PKT	300.000
	- Konsumsi dan Snack	2	KALI	x	20	ORG	x	1	K/K	40	OK	70.000
	- Pencetakan Buku Panduan	1	TBT	x	300	EKS	x	1	K/K	300	EKS	50.000
	> Launching dan Bedah Buku											
	- Spanduk	1	KALI	x	1	PAKET	x	1	K/K	1	PKT	300.000
	- Konsumsi dan Snack	1	KALI	x	50	ORG	x	1	K/K	50	OK	70.000
522151	Belanja Jasa Profesi											16.500.000
	- Narasumber Penyusunan Buku	3	KALI	x	2	JAM	x	2	ORG x 1 K/K	12	OJ	900.000
	- Narasumber Launching Buku	1	KALI	x	2	JAM	x	2	ORG x 1 K/K	4	OJ	900.000
	- Moderator	3	KALI	x	1	ORG	x	1	K/K	3	OK	700.000
	G) Sosialisasi Keberadaan SDM Pengawas TPS pada Pemilu 2024											7.200.000
522191	Belanja Jasa Lainnya											4.000.000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ KOMPONEN INPUT/AKUN/ RINCIAN BELANJA	DETAIL										VOL. KEG	BIAYA SATUAN	JUMLAH		
	- Talkshow di Radio (Blocking Time)	1	KALI	x	2	RADIO	x	1	K/K			2	PKT	2.000.000	4.000.000	
522151	Belanja Jasa Profesi														3.200.000	
	- Narasumber	2	Kali	x	1	Jam	x	1	Org	x	1	K/K	2	OJ	900.000	1.800.000
	- Moderator	2	Kali	x	1	Org	x	1	K/K			2	OK	700.000	1.400.000	
	H) Rapat Evaluasi SDM Pengawas Pemilu 2024 Bersama Panwaslu Kecamatan														88.080.000	
521211	Belanja Bahan														800.000	
	- Penggandaan/Fotocopy	1	KALI	x	1	PAKET	x	1	K/K			1	PAKET	200.000	200.000	
	- Belanja ATK	1	KALI	x	1	PAKET	x	1	K/K			1	PAKET	200.000	200.000	
	- Komputer Supply	1	KALI	x	1	PAKET	x	1	K/K			1	PAKET	200.000	200.000	
	- Spanduk	1	KALI	x	1	PAKET	x	1	K/K			1	PAKET	200.000	200.000	
522151	Belanja Jasa Profesi														3.600.000	
	- Narasumber	1	KALI	x	2	JAM	x	2	ORG	x	1	K/K	4	OJ	900.000	3.600.000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota														78.900.000	
	- Paket Rapat Fullboard Panitia, Narasumber Es III, Moderator	1	KALI	x	20	Org	x	1	KK	x	1	HARI	20	OH	500.000	10.000.000
	- Paket Rapat Fullboard Peserta	1	KALI	x	5	Org	x	16	Kec	x	1	HARI	80	OH	500.000	40.000.000
	- Uang Harian Fullboard Panitia	1	KALI	x	18	Org	x	1	KK	x	2	HARI	36	OH	100.000	3.600.000
	- Uang Harian Fullboard Peserta	1	KALI	x	5	Org	x	16	Kec	x	2	HARI	160	OH	100.000	16.000.000
	- Uang Transport Panitia	1	KALI	x	13	Org	x	1	KK				13	OK	100.000	1.300.000
	- Uang Transport Peserta	1	KALI	x	5	Org	x	16	Kec				80	OK	100.000	8.000.000
524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa														2.740.000	
	> Undangan/Konsultasi ke Provinsi															
	- Penginapan	1	KALI	x	2	ORG	x	1	K/K			2	OH	600.000	1.200.000	
	- Uang Harian	1	KALI	x	2	ORG	x	1	K/K			2	OH	370.000	740.000	
	- Transport	1	KALI	x	2	ORG	x	1	K/K			2	OK	400.000	800.000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota														2.040.000	
	- Transport	6	KALI	x	2	ORG	x	1	K/K			12	OK	170.000	2.040.000	
	I) Bantuan Penambah Daya Tahan Tubuh Masa Penghitungan dan Rekapitulasi Suara														87.609.000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya														87.609.000	
	Penambah Daya Tahan Tubuh Kabupaten/Kota	25	ORG	x	1	KK	x	15	HARI			375	OH	19.000	7.125.000	
	Penambah Daya Tahan Tubuh Kecamatan	11	ORG	x	16	KEC	x	12	HARI			2112	OH	19.000	40.128.000	
	Penambah Daya Tahan Tubuh Kelurahan/Desa	1	ORG	x	177	D/K	x	12	HARI			2124	OH	19.000	40.356.000	
	Penambah Daya Tahan Tubuh PTPS PSS Demak	1	ORG	x	0	TPS	x	3	HARI			0	OH	19.000	-	
	Penambah Daya Tahan Tubuh PTPS PSU Salatiga	1	ORG	x	0	TPS	x	3	HARI			0	OH	19.000	-	
	Penambah Daya Tahan Tubuh PTPS PSU Boyolali	1	ORG	x	0	TPS	x	3	HARI			0	OH	19.000	-	
	Penambah Daya Tahan Tubuh PTPS PSU Kab.Magelang	1	ORG	x	0	TPS	x	3	HARI			0	OH	19.000	-	
	J) Rapat Evaluasi Pengawas Pemilu Kecamatan Bawaslu Kabupaten/Kota														19.638.000	
521211	Belanja Bahan														13.128.000	
	- Penggandaan/Fotocopy/Spanduk	4	KALI	x	1	PAKET	x	1	K/K			4	PAKET	500.000	2.000.000	
	- Belanja ATK	4	KALI	x	1	PAKET	x	1	K/K			4	PAKET	500.000	2.000.000	
	- Komputer Supply	4	KALI	x	1	PAKET	x	1	K/K			4	PAKET	1.000.000	4.000.000	
	- Konsumsi dan Snack Rapat	4	KALI	x	15	ORG	x	1	K/K			60	PAKET	70.000	4.200.000	
	>> Tes Tertulis															
	- Snack Panitia	1	KALI	x	10	ORG	x	1	K/K			10	PAKET	16.000	160.000	
	- Snack Peserta	1	KALI	x	3	ORG	x	16	KEC			48	PAKET	16.000	768.000	
522191	Belanja Jasa Lainnya														1.000.000	
	>> Pengumuman Hasil Evaluasi															
	- Pengumuman Hasil Evaluasi di Media Cetak/elektronik/online	1	KALI	x	1	PKT	x	1	K/K			1	PAKET	1.000.000	1.000.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ KOMPONEN INPUT/AKUN/ RINCIAN BELANJA	DETAIL	VOL. KEG	BIAYA SATUAN	JUMLAH
522141	Belanja Sewa				5.000.000
	>> Sewa Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan				
	- Tes Tertulis	1 KALI x 1 PAKET x 1 K/K	1 PAKET	5.000.000	5.000.000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				0
	> Konsultasi ke Bawaslu Provinsi				
	- Penginapan	1 KALI x 3 ORG x 1 HARI x 0 K/K	0 OH	600.000	0
	- Uang Harian	1 KALI x 3 ORG x 2 HARI x 0 K/K	0 OH	370.000	0
	- Transport	1 KALI x 3 ORG x 0 K/K	0 OK	450.000	0
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				510.000
	> Konsultasi ke Bawaslu Provinsi				
	- Perjalanan Dinas Dalam Kota	1 KALI x 3 ORG x 1 HARI x 1 K/K	3 OH	170.000	510.000
304	Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif (Kab/Kota)				27.360.000
A)	Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif				27.360.000
521211	Belanja Bahan				1.200.000
	- Penggandaan/Fotocopy	1 Kali x 1 Paket x 1 KK	1 PKT	300.000	300.000
	- Spanduk	1 Kali x 1 Paket x 1 KK	1 PKT	300.000	300.000
	- ATK	1 Kali x 1 Paket x 1 KK	1 PKT	300.000	300.000
	- Komputer Supply	1 Kali x 1 Paket x 1 KK	1 PKT	300.000	300.000
522151	Belanja Jasa Profesi				2.500.000
	- Narasumber Eselon III (Eksternal)	1 Kali x 2 Jam x 1 Org x 1 KK	2 OJ	900.000	1.800.000
	- Moderator (Eksternal)	1 Kali x 1 Org x 1 KK	1 OK	700.000	700.000
524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota				23.660.000
	- Paket Rapat Halfday Panitia, Narasumber Es III, Moderator	1 Kali x 12 Org x 1 KK	12 OH	205.000	2.460.000
	- Paket Rapat Halfday Peserta	1 Kali x 50 Org x 1 KK	50 OH	205.000	10.250.000
	- Uang Harian Halfday Peserta	1 Kali x 50 Org x 1 KK	50 OH	95.000	4.750.000
	- Uang Transport	1 Kali x 62 Org x 1 KK	62 OK	100.000	6.200.000
305	Fasilitasi dan Pembinaan Penanganan Pelanggaran (Kabupaten/Kota)				453.488.000
A)	Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu				316.700.000
521211	Belanja Bahan				21.000.000
	- Konsumsi dan Snack	12 BLN x 25 ORG x 1 K/K	300 OK	70.000	21.000.000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya				16.200.000
	Pemeliharaan Kendaraan Operasional	1 Unit x 100 Liter x 12 BLN x 1 K/K	1200 UT	13.500	16.200.000
521213	Honor Output Kegiatan				279.500.000
	> Honorarium Pokja Gakkumdu				
	- Penasihat	10 BLN x 3 ORG x 1 K/K	30 OK	1.600.000	48.000.000
	- Pembina	10 BLN x 3 ORG x 1 K/K	30 OK	1.450.000	43.500.000
	- Koordinator	10 BLN x 3 ORG x 1 K/K	30 OK	1.200.000	36.000.000
	- Anggota	10 BLN x 16 ORG x 1 K/K	160 OK	950.000	152.000.000
B)	Supervisi Pendampingan dan Pembinaan Penanganan Pelanggaran ke Kecamatan				8.640.000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				8.640.000
	- Uang Harian	3 KALI x 9 ORG x 1 K/K	27 OH	150.000	4.050.000
	- Transport	3 KALI x 9 ORG x 1 K/K	27 OK	170.000	4.590.000
C)	Rapat Koordinasi Penanganan Pelanggaran				12.900.000
521211	Belanja Bahan				12.900.000
	- Penggandaan/Fotocopy	3 KALI x 1 PAKET x 1 K/K	3 OH	500.000	1.500.000
	- Belanja ATK	3 KALI x 1 PAKET x 1 K/K	3 PKT	500.000	1.500.000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ KOMPONEN INPUT/AKUN/ RINCIAN BELANJA	DETAIL									VOL. KEG	BIAYA SATUAN	JUMLAH	
	- Komputer Supply	3	KALI	x	1	PAKET	x	1	K/K		3	PKT	500.000	1.500.000
	- Konsumsi dan Snack	3	KALI	x	40	ORG	x	1	K/K		120	OK	70.000	8.400.000
	D) Koordinasi Penanganan Pelanggaran													3.580.000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa													3.580.000
	- Penginapan Eselon III	1	HARI	x	1	ORG	x	1	KALI x 1 k/k		1	OH	600.000	600.000
	- Penginapan Staf	1	HARI	x	1	ORG	x	1	KALI x 1 k/k		1	OH	600.000	600.000
	- Uang Harian Eselon III	2	HARI	x	1	ORG	x	1	KALI x 1 k/k		2	OH	370.000	740.000
	- Uang Harian Staf	2	HARI	x	1	ORG	x	1	KALI x 1 k/k		2	OH	370.000	740.000
	- Transport Eselon III	1	HARI	x	1	ORG	x	1	KALI x 1 k/k		1	OK	450.000	450.000
	- Transport Staf	1	HARI	x	1	ORG	x	1	KALI x 1 k/k		1	OK	450.000	450.000
	E) Piket Gakkumdu													93.000.000
521211	Belanja Bahan													8.000.000
	- Snack	10	KALI	x	5	ORG	x	10	BLN x 1 k/k		500	OK	16.000	8.000.000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota													85.000.000
	- Uang Transport	10	KALI	x	5	ORG	x	10	BLN x 1 k/k		500	OK	170.000	85.000.000
	F) Saksi Ahli													10.800.000
522151	Belanja Jasa Profesi													10.800.000
	- Saksi Ahli	2	ORG	x	3	PAKET	x	1	k/k		6	PKT	1.800.000	10.800.000
	- Saksi Ahli Kabupaten Karanganyar	3	ORG	x	6	PAKET	x	0	k/k		0	PKT	1.800.000	0
	- Saksi Ahli Kabupaten Purworejo	3	ORG	x	8	PAKET	x	0	k/k		0	PKT	1.800.000	0
	G) Koordinasi Penanganan Pelanggaran Pemilu													7.868.000
	>> Validasi Data Penanganan Pelanggaran Persiapan PHPU Pemilu													
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa													3.934.000
	- Penginapan Eselon III	1	HARI	x	1	ORG	x	1	KALI x 1 k/k		1	OH	954.000	954.000
	- Penginapan	1	HARI	x	1	ORG	x	1	KALI x 1 k/k		1	OH	600.000	600.000
	- Uang Harian	2	HARI	x	2	ORG	x	1	KALI x 1 k/k		4	OH	370.000	1.480.000
	- Transport	1	KALI	x	2	ORG			x 1 k/k		2	OK	450.000	900.000
	>> Teknik Penyusunan Putusan Pelanggaran Administratif Pemilu													
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa													3.934.000
	- Penginapan Eselon III	1	HARI	x	1	ORG	x	1	KALI x 1 k/k		1	OH	954.000	954.000
	- Penginapan	1	HARI	x	1	ORG	x	1	KALI x 1 k/k		1	OH	600.000	600.000
	- Uang Harian	2	HARI	x	2	ORG	x	1	KALI x 1 k/k		4	OH	370.000	1.480.000
	- Transport	1	KALI	x	2	ORG			x 1 k/k		2	OK	450.000	900.000
306	Fasilitasi dan pembinaan penyelesaian sengketa													11.942.000
	A) Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu													8.008.000
	> Konsultasi/Laporan Penyelesaian Sengketa ke Provinsi													
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa													8.008.000
	- Penginapan Eselon III	2	KALI	x	1	ORG	x	1	HARI x 1 KK		2	OH	1.024.000	2.048.000
	- Penginapan	2	KALI	x	1	ORG	x	1	HARI x 1 KK		2	OH	600.000	1.200.000
	- Uang Harian	2	KALI	x	2	ORG	x	2	HARI x 1 KK		8	OH	370.000	2.960.000
	- Transport	2	KALI	x	2	ORG	x	1	HARI x 1 KK		4	OK	450.000	1.800.000
	B) Konsolidasi Data Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Tahun 2024													3.934.000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa													3.934.000
	- Penginapan Eselon III	1	HARI	x	1	ORG	x	1	KALI x 1 KK		1	OH	954.000	954.000
	- Penginapan	1	HARI	x	1	ORG	x	1	KALI x 1 KK		1	OH	600.000	600.000
	- Uang Harian	2	HARI	x	2	ORG	x	1	KALI x 1 KK		4	OH	370.000	1.480.000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ KOMPONEN INPUT/AKUN/ RINCIAN BELANJA	DETAIL										VOL. KEG		BIAYA SATUAN	JUMLAH
	- Transport	1	KALI	x	2	ORG			x	1	KK	2	OK	450.000	900.000
307	Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan (Kab/Kota)														749.692.000
A)	Fasilitasi, Koordinasi dan Pelaporan Bawaslu Kabupaten/Kota														749.692.000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa														170.010.000
	> KOORDINASI KE PUSAT/LUAR PROVINSI														89.460.000
	- Transport Provinsi - Jakarta/Luar Daerah	5	KALI	x	3	ORG	x	1	KK			15	OK	2.182.000	32.730.000
	- Taxi	5	KALI	x	3	ORG	x	1	KK			15	OK	692.000	10.380.000
	- Penginapan	5	KALI	x	3	ORG	x	2	HARI	x	1	30	OH	750.000	22.500.000
	- Uang Harian	5	KALI	x	3	ORG	x	3	HARI	x	1	45	OH	530.000	23.850.000
	> KOORDINASI KE PROVINSI														-
	- Penginapan	15	KALI	x	3	ORG	x	1	HARI	x	0	0	OH	600.000	-
	- Uang Harian	15	KALI	x	3	ORG	x	2	HARI	x	0	0	OH	370.000	-
	- Transport	15	KALI	x	3	ORG	x	0	KK			0	OK	450.000	-
	> BAWASLU KOTA SEMARANG														80.550.000
	- Penginapan	15	KALI	x	3	ORG	x	1	HARI	x	1	45	OH	600.000	27.000.000
	- Uang Harian	15	KALI	x	3	ORG	x	2	HARI	x	1	90	OH	370.000	33.300.000
	- Transport	15	KALI	x	3	ORG	x	1	KK			45	OK	450.000	20.250.000
524119	Belanja Perjalanan Paket Meeting Luar Kota														563.682.000
	> KOORDINASI KE PUSAT/LUAR PROVINSI														375.732.000
	- Transport Provinsi - Jakarta/Luar Daerah	21	KALI	x	3	ORG	x	1	KK			63	OK	2.182.000	137.466.000
	- Taxi	21	KALI	x	3	ORG	x	1	KK			63	OK	692.000	43.596.000
	- Penginapan	21	KALI	x	3	ORG	x	2	HARI	x	1	126	OH	750.000	94.500.000
	- Uang Harian	21	KALI	x	3	ORG	x	3	HARI	x	1	189	OH	530.000	100.170.000
	> KOORDINASI KE PROVINSI														-
	- Penginapan	40	KALI	x	3	ORG	x	1	HARI	x	0	0	OH	600.000	-
	- Uang Harian	40	KALI	x	3	ORG	x	2	HARI	x	0	0	OH	370.000	-
	- Transport	40	KALI	x	3	ORG	x	0	KK			0	OK	450.000	-
	> BAWASLU KOTA SEMARANG														187.950.000
	- Penginapan	35	KALI	x	3	ORG	x	1	HARI	x	1	105	OH	600.000	63.000.000
	- Uang Harian	35	KALI	x	3	ORG	x	2	HARI	x	1	210	OH	370.000	77.700.000
	- Transport	35	KALI	x	3	ORG	x	1	KK			105	OK	450.000	47.250.000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota														16.000.000
	> Bawaslu Kota Semarang														16.000.000
	- Uang Harian	25	KALI	x	2	ORG	x	1	KK			50	OH	150.000	7.500.000
	- Transport	25	KALI	x	2	ORG	x	1	KK			50	OK	170.000	8.500.000
308	Fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu														30.257.000
A)	Konsolidasi Kebijakan Bawaslu Kab/Kota dan Panwascam														30.257.000
521211	Belanja Bahan														1.097.000
	- Penggandaan/Fotocopy	1	KALI	x	1	PAKET	x	1	K/K			1	PAKET	297.686	297.000
	- Spanduk	1	KALI	x	1	PAKET	x	1	K/K			1	PAKET	200.000	200.000
	- Belanja ATK	1	KALI	x	1	PAKET	x	1	K/K			1	PAKET	300.000	300.000
	- Komputer Supply	1	KALI	x	1	PAKET	x	1	K/K			1	PAKET	300.000	300.000
522151	Belanja Jasa Profesi														3.600.000
	- Narasumber Eselon III	1	KALI	x	2	JAM	x	2	ORG	x	1	4	OJ	900.000	3.600.000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota														1.700.000
	> Supervisi, Monitoring dan Evaluasi														1.700.000
	- Supervisi/ Investigasi/ Monev ke Desa/ Kelurahan	2	KALI	x	5	ORG	x	1	K/K			10	OK	170.000	1.700.000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ KOMPONEN INPUT/AKUN/ RINCIAN BELANJA	DETAIL								VOL. KEG	BIAYA SATUAN	JUMLAH
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota											23.860.000
	- Paket Rapat Halfday Panitia, Narasumber Es III, Moderator	1	KALI	x	10	Org	x	1	KK	10	OH	2.000.000
	- Paket Rapat Halfday Peserta	1	KALI	x	3	Org	x	16	KEC	48	OH	9.600.000
	- Uang Harian Halfday Panitia	2	KALI	x	10	Org	x	1	KK	20	OH	1.900.000
	- Uang Harian Halfday Peserta	1	KALI	x	3	Org	x	16	KEC	48	OH	4.560.000
	- Uang Transport	1	KALI	x	58	Org				58	OK	5.800.000
401	Fasilitasi dan pembinaan aparatur pengawas pemilu (Kecamatan)											94.090.000
A)	Fasilitasi pembinaan aparatur administrasi dan konsolidasi sekretariat dan Komisioner Panwascam dan Pengawas D/K dalam pengawasan penyelenggaraan tahapan pemilu											28.595.000
521211	Belanja Bahan											28.595.000
	- Penggandaan/Fotocopy	1	Kali	x	16	Kec				16	PKT	4.800.000
	- Spanduk	1	Kali	x	16	Kec				16	PKT	2.400.000
	- ATK	1	Kali	x	16	Kec				16	PKT	4.800.000
	- Komputer Supply	1	Kali	x	16	Kec				16	PKT	4.800.000
	- Konsumsi rapat (panitia)	1	Kali	x	16	Kec	x	10	Org	160	OK	5.600.000
	- Konsumsi rapat (D/K)	1	Kali	x	177	D/K	x	1	Org	177	OK	6.195.000
B)	Bimtek teknis pengawasan											65.495.000
521211	Belanja Bahan											23.795.000
	- Pelatihan/Bimtek Pengawas Pemilu (Desa/Kelurahan)											23.795.000
	ATK & Komputer Supply	1	Kali	x	16	Kec				16	PKT	4.800.000
	Konsumsi rapat (panitia)	1	Kali	x	16	Kec	x	10	Org	160	OK	5.600.000
	Konsumsi rapat (D/K)	1	Kali	x	177	D/K	x	1	Org	177	OK	6.195.000
	Spanduk	1	Kali	x	16	Kec				16	PKT	2.400.000
	Fotocopy/penggandaan Modul	1	Kali	x	16	Kec				16	PKT	4.800.000
		DILAKSANAKAN OLEH PROVINSI										-
522141	Belanja Sewa											12.000.000
	- Pelatihan/Bimtek Pengawas Pemilu (Desa/Kelurahan)											12.000.000
	Sewa ruang rapat	1	Kali	x	1	PAKET	x	16	Kec	16	PKT	12.000.000
524113	Perjalanan Dinas Dalam Kota											29.700.000
	- Pelatihan/Bimtek Pengawas Pemilu (Desa/Kelurahan)											
	Transport rapat (panitia)	1	Kali	x	16	Kec	x	10	Org	160	OK	12.000.000
	Transport rapat (D/K)	2	Kali	x	177	D/K	x	1	Org	354	OK	17.700.000
402	Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan (Kecamatan)											211.200.000
A)	Fasilitasi, Koordinasi, Pelaporan dan Pengawasan Tahapan Pemilu (Kecamatan)											
524113	Perjalanan Dinas Dalam Kota											211.200.000
	Konsultasi/ Undangan ke Kab/Kota	22	Kali	x	3	Org	x	16	Kec	1.056	OK	105.600.000
	Konsultasi/ Undangan ke Kab/Kota (Karimun Jawa dan Kampung Laut)	22	Kali	x	3	Org	x	-	Kec	-	OK	-
	Supervisi/ Investigasi/ Movev ke Desa/ Kelurahan	22	Kali	x	3	Org	x	16	Kec	1.056	OK	105.600.000
	Supervisi/ Investigasi/ Movev ke Desa/ Kelurahan (Karimun Jawa)	22	Kali	x	3	Org	x	-	Kec	-	OK	-
6661.QIC.003	Seleksi Anggota Badan Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilu Ad-Hoc											1.836.637.000
402	Rekrutmen Pengawas TPS (Kecamatan)											1.836.637.000
A)	Rekrutmen Pengawas TPS (Kecamatan)											1.312.392.000
521211	Belanja Bahan											676.272.000
	> PERSIAPAN PELAKSANAAN											-
	- ATK dan Komputer Supply	1	KALI	x	1	PAKET	x	16	Kec	16	PAKET	4.800.000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ KOMPONEN INPUT/AKUN/ RINCIAN BELANJA	DETAIL								VOL. KEG		BIAYA SATUAN	JUMLAH
	- Penggandaan	2	KALI	x	1	PAKET	x	16	Kec	32	PAKET	500.000	16.000.000
	> Rapat Persiapan dan Pelaksanaan												
	- Konsumsi	2	KALI	x	10	ORG	x	16	Kec	320	OK	35.000	11.200.000
	> TES WAWANCARA												
	- Konsumsi Panitia	3	KALI	x	15	ORG	x	16	Kec	720	OK	35.000	25.200.000
	> PELANTIKAN DAN PEMBEKALAN												
	- ATK dan Komputer Supply	1	KALI	x	1	PAKET	x	16	Kec	16	PAKET	200.000	3.200.000
	- Spanduk	1	KALI	x	1	PAKET	x	16	Kec	16	PAKET	300.000	4.800.000
	- Konsumsi dan Snack Panitia	2	KALI	x	8	ORG	x	16	Kec	256	OK	64.000	16.384.000
	- Konsumsi dan Snack PTPS	2	KALI	x	4646	ORG				9292	OK	64.000	594.688.000
521213	Belanja Honor Output Kegiatan												25.600.000
	> PELANTIKAN DAN PEMBEKALAN												
	- Rohaniwan	1	KALI	x	4	ORG	x	16	Kec	64	OK	400.000	25.600.000
522141	Belanja Sewa												80.000.000
	> TES WAWANCARA												
	- Sewa Ruangan	1	KALI	x	1	PAKET	x	16	Kec	16	PAKET	1.000.000	16.000.000
	> PELANTIKAN DAN PEMBEKALAN												
	- Sewa Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan	2	KALI	x	1	PAKET	x	16	Kec	32	PAKET	2.000.000	64.000.000
522151	Belanja Jasa Profesi												28.800.000
	> NARASUMBER PELANTIKAN DAN PEMBEKALAN												
	- Narasumber Eselon III ke bawah/disetarakan	1	KALI	x	1	Jam	x	2	ORG x 16 Kec	32	OJ	900.000	28.800.000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota												501.720.000
	> PELANTIKAN DAN PEMBEKALAN												
	- Uang Harian (Panitia)	2	KALI	x	128	ORG	x	1	Hari	256	OH	95.000	24.320.000
	- Transport (Panitia dan PTPS)	2	KALI	x	4774	ORG				9548	OK	50.000	477.400.000
	B) Pelantikan PAW Panwaslu Kecamatan												2.425.000
521211	Belanja Bahan												825.000
	> PELANTIKAN DAN PEMBEKALAN												
	- Spanduk	1	KALI	x	1	PAKET	x	1	K/K	1	PAKET	300.000	300.000
	- Konsumsi dan Snack	1	KALI	x	15	ORG	x	1	K/K	15	PAKET	35.000	525.000
521213	Belanja Honor Output Kegiatan												1.600.000
	> PELANTIKAN DAN PEMBEKALAN												
	- Rohaniwan	1	KALI	x	4	ORG	x	1	K/K	4	OK	400.000	1.600.000
	C) Pembekalan Pengawas TPS (Kecamatan)												521.820.000
521211	Belanja Bahan												194.160.000
	> Pembekalan												
	- ATK dan Komputer Supply	1	KALI	x	1	PAKET	x	16	Kec	16	PAKET	100.000	1.600.000
	- Spanduk	1	KALI	x	1	PAKET	x	16	Kec	16	PAKET	100.000	1.600.000
	- Konsumsi dan Snack Panitia Panwascam	1	KALI	x	1	PAKET	x	8	ORG x 16 Kec	128	OK	40.000	5.120.000
	- Konsumsi dan Snack PTPS	1	KALI	x	1	PAKET	x	4.646	ORG	4646	OK	40.000	185.840.000
522141	Belanja Sewa												48.000.000
	> Pembekalan												
	- Sewa Ruangan	1	KALI	x	1	PAKET	x	16	Kec	16	PAKET	1.000.000	16.000.000
	- Sewa Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan	1	KALI	x	1	PAKET	x	16	Kec	16	PAKET	2.000.000	32.000.000
522151	Belanja Jasa Profesi												28.800.000
	> NARASUMBER PEMBEKALAN												

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ KOMPONEN INPUT/AKUN/ RINCIAN BELANJA	DETAIL											VOL. KEG		BIAYA SATUAN	JUMLAH			
	- Narasumber Eselon III ke bawah/disetarakan	1	KALI	x	1	Jam	x	2	ORG	x	16	Kec	32	OJ	900.000	28.800.000			
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota															250.860.000			
	> PEMBEKALAN																		
	- Uang Harian (Panitia)	1	KALI	x	128	ORG	x	1	Hari				128	OH	95.000	12.160.000			
	- Transport (Panitia dan Peserta)	1	KALI	x	4774	ORG							4774	OK	50.000	238.700.000			
6838	PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILU OLEH LEMBAGA AD-HOC															6.912.400.000			
6838.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga															6.912.400.000			
6838.QIC.001	Honorarium Pengawas Ad-Hoc															6.452.640.000			
401	Honorarium (Kecamatan)															1.027.840.000			
	A) Honorarium Panwaslu																		384.000.000
521213	Belanja Honor Output Kegiatan																		
	Ketua	1	Org	x	4	Bln	x	16	Kec				64	OB	2.200.000	140.800.000			
	Anggota	2	Org	x	4	Bln	x	16	Kec				128	OB	1.900.000	243.200.000			
	B) Honorarium Kesekretariatan																		630.400.000
521213	Belanja Honor Output Kegiatan																		
	Kepala sekretariat	1	Org	x	4	Bln	x	16	Kec				64	OB	1.550.000	99.200.000			
	Pelaksana PNS	2	Org	x	4	Bln	x	16	Kec				128	OB	900.000	115.200.000			
	Pelaksana Non PNS	3	Org	x	4	Bln	x	16	Kec				192	OB	1.500.000	288.000.000			
	Tenaga pendukung (Satpam/ Pramukbakti)	2	Org	x	4	Bln	x	16	Kec				128	OB	1.000.000	128.000.000			
	C) Honorarium Korsek dan Staf PNS (Kab/Kota)																		13.440.000
521111	Belanja Keperluan Perkantoran																		
	Honorarium Korsek	0	ORG	x	12	BLN							0	OB	3.352.000	-			
	Honorarium Staf PNS Non Organik	1	ORG	x	12	BLN							12	OB	1.120.000	13.440.000			
	D) Honorarium Panwaslu Bawaslu Kota Pekalongan (Tunggakan)																		-
521213	Belanja Honor Output Kegiatan																		
	Ketua (Kota Pekalongan)	1	Org	x	1	Bln	x	0	Kec				-	OB	2.200.000	-			
	Anggota (Kota Pekalongan)	2	Org	x	1	Bln	x	0	Kec				-	OB	1.900.000	-			
	E) Honorarium Kesekretariatan Bawaslu Kota Pekalongan (Tunggakan)																		-
521213	Belanja Honor Output Kegiatan																		
	Kepala sekretariat (Kota Pekalongan)	1	Org	x	1	Bln	x	0	Kec				-	OB	1.550.000	-			
	Pelaksana PNS (Kota Pekalongan)	2	Org	x	1	Bln	x	0	Kec				-	OB	900.000	-			
	Pelaksana Non PNS (Kota Pekalongan)	3	Org	x	1	Bln	x	0	Kec				-	OB	1.500.000	-			
	Tenaga pendukung (Satpam/ Pramukbakti) (Kota Pekalongan)	2	Org	x	1	Bln	x	0	Kec				-	OB	1.000.000	-			
501	Honorarium Panwaslu															778.800.000			
	A) Honorarium Panwaslu																		778.800.000
521213	Belanja Honor Output Kegiatan																		
	PPD/K	1	Org	x	4	Bln	x	177	D/K				708	OB	1.100.000	778.800.000			
	B) Honorarium Panwaslu Bawaslu Kota Pekalongan (Tunggakan)																		-
521213	Belanja Honor Output Kegiatan																		
	PPD/K (Kota Pekalongan)	1	Org	x	1	Bln	x	-	D/K				-	OB	1.100.000	-			

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ KOMPONEN INPUT/AKUN/ RINCIAN BELANJA	DETAIL										VOL. KEG		BIAYA SATUAN	JUMLAH
601	Honorarium TPS														4.646.000.000
A)	Honorarium PTPS														4.646.000.000
521213	Belanja Honor Output Kegiatan														
	PTPS	1	Org	x	1	Bln	x	4.646	TPS		4.646	OB	1.000.000	4.646.000.000	
6838.QIC.002	Operasional Pengawas Ad-Hoc														459.760.000
301	Sewa kendaraan operasional (Kab/Kota)														97.200.000
A)	tanpa sub komponen														97.200.000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya														97.200.000
	Pemeliharaan Kendaraan Operasional	6	Unit	x	100	Liter	x	12	BLN	x	1	K/K	7200	UT	97.200.000
	Pemeliharaan Kendaraan Operasional	4	Unit	x	100	Liter	x	12	BLN	x	0	K/K	0	UT	-
302	Sewa gedung/ peralatan/ meubelair (Kab/Kota)														24.000.000
A)	tanpa sub komponen														24.000.000
	Sewa gedung gakkumdu	1	Unit	x	4	Bln	x	1	K/K		4	UB	4.000.000	16.000.000	
	Sewa peralatan gakkumdu	1	Unit	x	4	Bln	x	1	K/K		4	UB	1.000.000	4.000.000	
	Sewa meubelair gakkumdu	1	Unit	x	4	Bln	x	1	K/K		4	UB	1.000.000	4.000.000	
402	Sewa gedung/ peralatan/ meubelair (Kecamatan)														112.000.000
A)	tanpa sub komponen														112.000.000
	Sewa gedung	1	Unit	x	4	Bln	x	4	Kec		16	UB	2.000.000	32.000.000	
	Sewa peralatan	1	Unit	x	4	Bln	x	16	Kec		64	UB	1.000.000	64.000.000	
	Sewa meubelair	1	Unit	x	4	Bln	x	4	Kec		16	UB	1.000.000	16.000.000	
403	Pemeliharaan gedung/ meubelair/ peralatan (Kecamatan)														48.000.000
A)	tanpa sub komponen														48.000.000
523111	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan														48.000.000
	Pemeliharaan gedung kantor	1	Unit	x	4	Bln	x	16	Kec		64	UB	750.000	48.000.000	
404	Pelayanan operasional perkantoran (Kecamatan)														178.560.000
A)	tanpa sub komponen														178.560.000
521111	Belanja Keperluan Perkantoran														19.200.000
	Keperluan Sehari-hari	1	Pkt	x	4	Bln	x	16	Kec		64	PKT	300.000	19.200.000	
521211	Belanja Bahan														116.160.000
	Alat Tulis Kantor	1	Pkt	x	4	Bln	x	16	Kec		64	PKT	300.000	19.200.000	
	Komputer Supply	1	Pkt	x	4	Bln	x	16	Kec		64	PKT	300.000	19.200.000	
	Snack rapat biasa	4	Kali	x	4	Bln	x	16	Kec	x	9	Org	2.304	OK	34.560.000
	Jamuan tamu	3	Hari	x	4	Bln	x	16	Kec	x	5	Org	960	OK	14.400.000
	Fotocopy/peggandaan	1	Pkt	x	4	Bln	x	16	Kec		64	PKT	300.000	19.200.000	
	Fotocopy/peggandaan form A/AKP/berkas Siwaslu	1	Pkt	x			x	16	Kec		16	PKT	300.000	4.800.000	
	Papan Nama Kantor Kecamatan	1	Nama	Pkt	x	16	Kec				16	PKT	300.000	4.800.000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya														43.200.000
	Langganan Listrik	1	Pkt	x	4	Bln	x	4	Kec		16	PKT	500.000	8.000.000	
	Langganan Telepon/Faximile	1	Pkt	x	4	Bln	x	-	Kec		-	PKT	500.000	-	
	Langganan Air	1	Pkt	x	4	Bln	x	4	Kec		16	PKT	200.000	3.200.000	
	Langganan Internet	1	Pkt	x	4	Bln	x	16	Kec		64	PKT	500.000	32.000.000	
6843	PENGAWASAN MASA KAMPANYE PEMILU														265.974.000
6843.QCE	Penanganan Perkara														14.724.000
6843.QCE.001	Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Masa Kampanye														14.724.000
301	Pengelolaan data penanganan pelanggaran masa kampanye (Kab./Kota)														2.380.000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ KOMPONEN INPUT/AKUN/ RINCIAN BELANJA	DETAIL										VOL. KEG		BIAYA SATUAN	JUMLAH
	A) Validasi Data Penanganan Pelanggaran Masa Kampanye														2.380.000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota														2.380.000
	- Uang Transport	2	KALI	x	7	ORG	x	1	k/k		14	OK	170.000	2.380.000	
302	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran masa kampanye (Kab./Kota)														5.960.000
	A) Pemetaan Potensi Pelanggaran Tahapan Kampanye Pemilu														2.380.000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota														2.380.000
	- Uang Transport	2	KALI	x	7	ORG	x	1	k/k		14	OK	170.000	2.380.000	
	B) Konsultasi ke Provinsi terkait Penanganan Pelanggaran Kampanye														3.580.000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa														3.580.000
	- Penginapan Eselon III	1	HARI	x	1	ORG	x	1	KALI	x	1	OH	600.000	600.000	
	- Penginapan Staf	1	HARI	x	1	ORG	x	1	KALI	x	1	OH	600.000	600.000	
	- Uang Harian Eselon III	2	HARI	x	1	ORG	x	1	KALI	x	1	OH	370.000	740.000	
	- Uang Harian Staf	2	HARI	x	1	ORG	x	1	KALI	x	1	OH	370.000	740.000	
	- Transport Eselon III	1	HARI	x	1	ORG	x	1	KALI	x	1	OK	450.000	450.000	
	- Transport Staf	1	HARI	x	1	ORG	x	1	KALI	x	1	OK	450.000	450.000	
303	Pengelolaan barang dugaan pelanggaran masa kampanye (Kab./Kota)														2.380.000
	A) Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu Tahapan Kampanye Pemilu														2.380.000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota														2.380.000
	- Uang Transport	2	KALI	x	7	ORG				x	1	OK	170.000	2.380.000	
304	Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses masa kampanye (Kab./Kota)														4.004.000
	A) Konsultasi ke Provinsi terkait Penanganan Pelanggaran Kampanye														4.004.000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa														4.004.000
	- Penginapan Eselon III	1	HARI	x	1	ORG	x	1	KALI	x	1	OH	1.024.000	1.024.000	
	- Penginapan	1	HARI	x	1	ORG	x	1	KALI	x	1	OH	600.000	600.000	
	- Uang Harian	2	HARI	x	2	ORG	x	1	KALI	x	1	OH	370.000	1.480.000	
	- Transport	1	HARI	x	2	ORG	x	1	KALI	x	1	OK	450.000	900.000	
6843.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga														251.250.000
6843.QIC.001	Pengawasan Masa Kampanye														251.250.000
301	Publikasi dan dokumentasi pengawasan masa kampanye (Kab./Kota)														40.770.000
	A) Peliputan Kegiatan Internal dan Eksternal														7.680.000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota														7.680.000
	- Uang Transport	3	ORG	x	8	KALI	x	1	K/K		24	OK	170.000	4.080.000	
	- Uang Harian Lebih dari 8 Jam	3	ORG	x	8	KALI	x	1	K/K		24	OK	150.000	3.600.000	
	B) Publikasi Kinerja Bawaslu di Tahapan Masa Kampanye														9.000.000
522191	Belanja Jasa Lainnya														9.000.000
	- Iklan di Media Radio/Televisi	1	KALI	x	20	SPOT	x	1	K/K		20	OB	200.000	4.000.000	
	- Talkshow di Radio (Blocking Time)	1	KALI	x	1	RADIO	x	1	K/K		1	PKT	5.000.000	5.000.000	
	C) Konsultasi Kehumasan ke Bawaslu Provinsi														5.370.000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa														5.370.000
	> Perjadin biasa														
	- Penginapan	1	HARI	x	3	ORG	x	1	KALI	x	1	OH	600.000	1.800.000	
	- Uang Harian	2	HARI	x	3	ORG	x	1	KALI	x	1	OH	370.000	2.220.000	
	- Transport	1	KALI	x	3	ORG	x	1	K/K		3	OK	450.000	1.350.000	
	D) Supervisi Kehumasan ke Kecamatan														960.000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota														960.000
	- Uang Transport	3	ORG	x	1	KALI	x	1	K/K		3	OK	170.000	510.000	
	- Uang Harian Lebih dari 8 Jam	3	ORG	x	1	KALI	x	1	K/K		3	OK	150.000	450.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ KOMPONEN INPUT/AKUN/ RINCIAN BELANJA	DETAIL								VOL. KEG	BIAYA SATUAN	JUMLAH
	E) Penerbitan Buletin											13.110.000
521211	Belanja Bahan											11.650.000
	- Pencetakan Buletin Bawaslu Jateng	1	TBT	x	300	EKS	x	1	K/K	300	EKS	9.600.000
	- Belanja ATK	1	TBT	x	1	PAKET	x	1	K/K	1	PKT	500.000
	- Komputer Supply	1	TBT	x	1	PAKET	x	1	K/K	1	PKT	500.000
	> Rapat Penyusunan Buletin											
	- Konsumsi dan Snack	1	KALI	x	15	ORG	x	1	K/K	15	OK	1.050.000
521213	Honor Output Kegiatan											1.460.000
	> Honorarium Tim Penyusunan Buletin											
	- Penanggung Jawab	1	TBT	x	1	ORG	x	1	K/K	1	OTER	400.000
	- Redaktur	1	TBT	x	1	ORG	x	1	K/K	1	OTER	300.000
	- Editor	1	TBT	x	1	ORG	x	1	K/K	1	OTER	250.000
	- Desain Grafis	1	TBT	x	1	ORG	x	1	K/K	1	OTER	180.000
	- Fotografer	1	TBT	x	1	ORG	x	1	K/K	1	OTER	180.000
	- Sekretariat	1	TBT	x	1	ORG	x	1	K/K	1	OTER	150.000
	F) Rakor Kehumasan dengan Panwascam dan Media											4.650.000
	> Rapat di Kantor dengan Eksternal											
521211	Belanja Bahan											2.000.000
	- Penggandaan/Fotocopy	1	KALI	x	1	PAKET	x	1	K/K	1	PKT	200.000
	- Belanja ATK	1	KALI	x	1	PAKET		1	K/K	1	PKT	200.000
	- Komputer Supply	1	KALI	x	1	PAKET		1	K/K	1	PKT	200.000
	- Konsumsi dan snack	1	KALI	x	20	ORG		1	K/K	20	PKT	1.400.000
522151	Belanja Jasa Profesi											1.800.000
	- Narasumber	1	KALI	x	2	JAM	x	1	ORG x	2	OJ	900.000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota											850.000
	- Uang Transport	5	ORG	x	1	KALI	x	1	K/K	5	OK	850.000
302	Pengawasan masa kampanye (Kab./Kota)											110.200.000
	A) Rapat Persiapan Pengawasan Tahapan Kampanye dan Laporan Dana Kampanye											3.600.000
	>> RAPAT BIASA (1)											
521211	Belanja Bahan											3.600.000
	- Penggandaan/Fotocopy	1	KALI	x	1	PAKET	x	1	KK	1	PKT	700.000
	- Belanja ATK	1	KALI	x	1	PAKET	x	1	KK	1	PKT	400.000
	- Komputer Supply	1	KALI	x	1	PAKET	x	1	KK	1	PKT	400.000
	- Konsumsi dan Snack	1	KALI	x	25	ORG	x	1	KK	25	OK	2.100.000
	B) Pengawasan Laporan Dana Kampanye											5.100.000
	>> Pengawasan Laporan Dana Kampanye											
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota											
	- Uang Transport	6	KALI	x	5	ORG	x	1	KK	30	OK	5.100.000
	C) Rapat Koordinasi Pengawasan Kampanye dengan Stakeholder dan Peserta Pemilu											24.310.000
	>> Halfday (1)											
521211	Belanja Bahan											1.200.000
	- Penggandaan/Fotocopy	1	Kali	x	1	Paket	x	1	KK	1	PKT	300.000
	- Spanduk	1	Kali	x	1	Paket	x	1	KK	1	PKT	300.000
	- ATK	1	Kali	x	1	Paket	x	1	KK	1	PKT	300.000
	- Komputer Supply	1	Kali	x	1	Paket	x	1	KK	1	PKT	300.000
522151	Belanja Jasa Profesi											2.500.000
	- Narasumber Eselon III (Eksternal)	1	Kali	x	2	Jam	x	1	Org x	2	OJ	900.000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ KOMPONEN INPUT/AKUN/ RINCIAN BELANJA	DETAIL								VOL. KEG		BIAYA SATUAN	JUMLAH
	- Moderator (Eksternal)	1	Kali	x	1	Org	x	1	KK	1	OK	700.000	700.000
524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota												20.610.000
	- Paket Rapat Halfday Panitia, Narasumber Es III, Moderator	1	Kali	x	2	Org	x	1	KK	2	OH	205.000	410.000
	- Paket Rapat Halfday Peserta	1	Kali	x	50	Org	x	1	KK	50	OH	205.000	10.250.000
	- Uang Harian Halfday Peserta	1	Kali	x	50	Org	x	1	KK	50	OH	95.000	4.750.000
	- Uang Transport	1	Kali	x	52	Org	x	1	KK	52	OK	100.000	5.200.000
	D) Rapat Koordinasi dan Konsolidasi Pengawasan Kampanye dan Laporan Dana Kampanye												6.500.000
	>> RAPAT BIASA (2)												
521211	Belanja Bahan												6.500.000
	- Penggandaan/Fotocopy	2	KALI	x	1	PAKET	x	1	KK	2	PKT	700.000	1.400.000
	- Belanja ATK	2	KALI	x	1	PAKET	x	1	KK	2	PKT	400.000	800.000
	- Komputer Supply	2	KALI	x	1	PAKET	x	1	KK	2	PKT	400.000	800.000
	- Konsumsi dan Snack	2	KALI	x	25	ORG	x	1	KK	50	OK	70.000	3.500.000
	E) Rapat Evaluasi Pengawasan Kampanye dan Laporan Dana Kampanye												2.800.000
	>> RAPAT BIASA												
521211	Belanja Bahan												2.800.000
	- Penggandaan/Fotocopy	1	KALI	x	1	PAKET	x	1	KK	1	PKT	300.000	300.000
	- Belanja ATK	1	KALI	x	1	PAKET	x	1	KK	1	PKT	350.000	350.000
	- Komputer Supply	1	KALI	x	1	PAKET	x	1	KK	1	PKT	400.000	400.000
	- Konsumsi dan Snack	1	KALI	x	25	ORG	x	1	KK	25	OK	70.000	1.750.000
	F) Supervisi dan Monitoring Pengawasan Kampanye												2.550.000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota												
	- Supervisi dan Monitoring	3	KALI	x	5	ORG	x	1	KK	15	OK	170.000	2.550.000
	G) Fasilitas Penertiban Alat Peraga Kampanye dengan Stakeholder terkait												65.340.000
	> Rapat di Kantor dengan Eksternal												
521211	Belanja Bahan												2.000.000
	- Penggandaan/Fotocopy	1	KALI	x	1	PAKET	x	1	KK	1	PKT	200.000	200.000
	- Belanja ATK	1	KALI	x	1	PAKET	x	1	KK	1	PKT	200.000	200.000
	- Komputer Supply	1	KALI	x	1	PAKET	x	1	KK	1	PKT	200.000	200.000
	- Konsumsi dan snack	1	KALI	x	20	ORG	x	1	KK	20	PKT	70.000	1.400.000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya												840.000
	- BBM Kendaraan Penertiban APK	2	UNIT	x	30	LITER	x	1	KK	60	LITER	14.000	840.000
522141	Belanja Sewa												42.000.000
	- Sewa Sarana Penertiban APK	2	UNIT	x	3	KALI	x	1	KK	6	OK	7.000.000	42.000.000
522151	Belanja Jasa Profesi												1.800.000
	- Narasumber	1	KALI	x	2	JAM	x	1	ORG x 1 KK	2	OJ	900.000	1.800.000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota												18.700.000
	- Uang Transport peserta eksternal	1	KALI	x	10	ORG	x	1	KK	10	OK	170.000	1.700.000
	- Uang Transport penertiban APK	10	KALI	x	10	ORG	x	1	KK	100	OK	170.000	17.000.000
303	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan masa kampanye (Kab./Kota)												19.250.000
	A) Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu pada Tahapan Kampanye Pemilu												8.750.000
521211	Belanja Bahan												8.750.000
	- Konsumsi dan Snack	5	KALI	x	25	ORG	x	1	KK	125	OK	70.000	8.750.000
	B) Supervisi Pendampingan Sentra Gakkumdu dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu pada Tahapan Kampanye Pemilu												10.500.000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota												10.500.000
	- Uang Transport	7	KALI	x	10	ORG	x	1	KK	70	OK	150.000	10.500.000
402	Pengawasan masa kampanye (Kecamatan)												54.480.000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ KOMPONEN INPUT/AKUN/ RINCIAN BELANJA	DETAIL										VOL. KEG		BIAYA SATUAN	JUMLAH
	A) Rapat Pengawasan Tahapan Kampanye														35.280.000
521211	Belanja Bahan														35.280.000
	- Konsumsi dan Snack	3	KALI	x	15	ORG	x	16	KEC		720	OK	49.000	35.280.000	
	B) Supervisi dan Monitoring Pengawasan Kampanye														19.200.000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota														19.200.000
	- Supervisi dan Monitoring	4	KALI	x	3	ORG	x	16	KEC		192	OK	100.000	19.200.000	
	- Supervisi dan Monitoring (Karimun Jawa dan Kampung Laut)	4	KALI	x	3	ORG	x	0	KEC		-	OK	800.000	-	
501	Pengawasan masa kampanye (Kelurahan/Desa)														26.550.000
	A) Supervisi dan Monitoring Pengawasan Tahapan Kampanye														26.550.000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota														26.550.000
	- Supervisi dan Monitoring	2	KALI	x	1	ORG	x	177	D/K		354	OK	75.000	26.550.000	
6845	PENGAWASAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA														1.245.678.000
6845.QCE	Penanganan Perkara														10.720.000
6845.QCE.001	Penanganan Pelanggaran Pemungutan dan Penghitungan Suara														10.720.000
301	Pengelolaan data penanganan pelanggaran pemungutan dan penghitungan suara (Kab./Kota)														2.380.000
	A) Validasi Data Penanganan Pelanggaran Pemungutan dan Penghitungan														2.380.000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota														2.380.000
	- Uang Transport	2	KALI	x	7	ORG	x	1	K/K		14	OK	170.000	2.380.000	
302	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran pemungutan dan penghitungan suara (Kab./Kota)														5.960.000
	A) Pemetaan Potensi Pelanggaran Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara														2.380.000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota														2.380.000
	- Uang Transport	2	KALI	x	7	ORG	x	1	K/K		14	OK	170.000	2.380.000	
	B) Konsultasi ke Provinsi														3.580.000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa														3.580.000
	- Penginapan Eselon III	1	HARI	x	1	ORG	x	1	KALI	x	1	OH	600.000	600.000	
	- Penginapan Staf	1	HARI	x	1	ORG	x	1	KALI	x	1	OH	600.000	600.000	
	- Uang Harian Eselon III	2	HARI	x	1	ORG	x	1	KALI	x	1	OH	370.000	740.000	
	- Uang Harian Staf	2	HARI	x	1	ORG	x	1	KALI	x	1	OH	370.000	740.000	
	- Transport Eselon III	1	HARI	x	1	ORG	x	1	KALI	x	1	OK	450.000	450.000	
	- Transport Staf	1	HARI	x	1	ORG	x	1	KALI	x	1	OK	450.000	450.000	
303	Pengelolaan barang dugaan pelanggaran pemungutan dan penghitungan suara (Kab./Kota)														2.380.000
	A) Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara														2.380.000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota														2.380.000
	- Uang Transport	2	KALI	x	7	ORG	x	1	K/K		14	OK	170.000	2.380.000	
6845.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga														1.234.958.000
6845.QIC.001	Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara														1.234.958.000
301	Publikasi dan dokumentasi pengawasan pemungutan dan penghitungan suara (Kab./Kota)														18.340.000
	A) Peliputan Kegiatan Internal dan Eksternal														3.840.000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota														3.840.000
	- Uang Transport	3	ORG	x	4	KALI	x	1	K/K		12	OK	170.000	2.040.000	
	- Uang Harian Lebih dari 8 Jam	3	ORG	x	4	KALI	x	1	K/K		12	OK	150.000	1.800.000	
	B) Publikasi Kinerja Bawaslu di Tahapan pemungutan dan penghitungan suara														9.000.000
522191	Belanja Jasa Lainnya														9.000.000
	- Iklan di Media Radio/Televisi	1	KALI	x	20	SPOT	x	1	K/K		20	OB	200.000	4.000.000	
	- Talkshow di Radio (Blocking Time)	1	KALI	x	1	RADIO	x	1	K/K		1	PKT	5.000.000	5.000.000	
	C) Konsultasi Kehumasan ke Bawaslu Provinsi														3.580.000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa														3.580.000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ KOMPONEN INPUT/AKUN/ RINCIAN BELANJA	DETAIL										VOL. KEG		BIAYA SATUAN	JUMLAH
	> Perjadin biasa														
	- Penginapan	1	HARI	x	2	ORG	x	1	KALI	x	1 K/K	2	OH	600.000	1.200.000
	- Uang Harian	2	HARI	x	2	ORG	x	1	KALI	x	1 K/K	4	OH	370.000	1.480.000
	- Transport	1	KALI	x	2	ORG	x	1	K/K			2	OK	450.000	900.000
	D) Supervisi Kehumasan ke Kecamatan														1.920.000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota														1.920.000
	- Uang Transport	3	ORG	x	2	KALI	x	1	K/K			6	OK	170.000	1.020.000
	- Uang Harian Lebih dari 8 Jam	3	ORG	x	2	KALI	x	1	K/K			6	OK	150.000	900.000
302	Pengawasan pemungutan dan penghitungan suara (Kab./Kota)														37.750.000
	A) Rapat Persiapan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara														2.650.000
	>> RAPAT BIASA (1)														
521211	Belanja Bahan														2.650.000
	- Penggandaan/Fotocopy	1	KALI	x	1	PAKET	x	1	KK			1	PKT	300.000	300.000
	- Belanja ATK	1	KALI	x	1	PAKET	x	1	KK			1	PKT	300.000	300.000
	- Komputer Supply	1	KALI	x	1	PAKET	x	1	KK			1	PKT	300.000	300.000
	- Konsumsi dan Snack	1	KALI	x	25	ORG	x	1	KK			25	OK	70.000	1.750.000
	B) Rapat Koordinasi Pengawasan Pemungutan Suara dengan PANWASLU Kecamatan														2.800.000
	>> RAPAT BIASA (2)														
521211	Belanja Bahan														2.800.000
	- Penggandaan/Fotocopy	1	KALI	x	1	PAKET	x	1	KK			1	PKT	300.000	300.000
	- Belanja ATK	1	KALI	x	1	PAKET	x	1	KK			1	PKT	350.000	350.000
	- Komputer Supply	1	KALI	x	1	PAKET	x	1	KK			1	PKT	400.000	400.000
	- Konsumsi dan Snack	1	KALI	x	25	ORG	x	1	KK			25	OK	70.000	1.750.000
	C) Rapat Koordinasi Pengawasan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan Peserta Pemilu, Stakeholder dan Pemantau														22.700.000
	>> HALFDAY (1)														
521211	Belanja Bahan														1.200.000
	- Penggandaan/Fotocopy	1	Kali	x	1	Paket	x	1	KK			1	PKT	300.000	300.000
	- Spanduk	1	Kali	x	1	Paket	x	1	KK			1	PKT	300.000	300.000
	- ATK	1	Kali	x	1	Paket	x	1	KK			1	PKT	300.000	300.000
	- Komputer Supply	1	Kali	x	1	Paket	x	1	KK			1	PKT	300.000	300.000
522151	Belanja Jasa Profesi														2.500.000
	- Narasumber Eselon III (Eksternal)	1	Kali	x	2	Jam	x	1	Org	x	1 KK	2	OJ	900.000	1.800.000
	- Moderator (Eksternal)	1	Kali	x	1	Org	x	1	KK			1	OK	700.000	700.000
524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota														19.000.000
	- Paket Rapat Halfday Panitia, Narasumber Es III, Moderator	1	Kali	x	7	Org	x	1	KK			7	OH	150.000	1.050.000
	- Paket Rapat Halfday Peserta	1	Kali	x	50	Org	x	1	KK			50	OH	150.000	7.500.000
	- Uang Harian Halfday Peserta	1	Kali	x	50	Org	x	1	KK			50	OH	95.000	4.750.000
	- Uang Transport	1	Kali	x	57	Org	x	1	KK			57	OK	100.000	5.700.000
	D) Supervisi dan Monitoring Pengawasan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara														6.800.000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota														
	- Transport	2	KALI	x	10	ORG	x	1	KK			20	OK	170.000	3.400.000
	- Uang Harian Lebih dari 8 Jam	2	KALI	x	10	ORG	x	1	KK			20	OK	170.000	3.400.000
	E) Rapat Evaluasi Pengawasan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara														2.800.000
	>> RAPAT BIASA (1)														
521211	Belanja Bahan														2.800.000
	- Penggandaan/Fotocopy	1	KALI	x	1	PAKET	x	1	KK			1	PKT	300.000	300.000
	- Belanja ATK	1	KALI	x	1	PAKET	x	1	KK			1	PKT	350.000	350.000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ KOMPONEN INPUT/AKUN/ RINCIAN BELANJA	DETAIL								VOL. KEG	BIAYA SATUAN	JUMLAH		
	- Komputer Supply	1	KALI	x	1	PAKET	x	1	KK	1	PKT	400.000	400.000	
	- Konsumsi dan Snack	1	KALI	x	25	ORG	x	1	KK	25	OK	70.000	1.750.000	
F) Supervisi dan Monitoring Pengawasan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara PSS Demak														-
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota													
	- Transport	1	KALI	x	10	ORG	x	-	KK	-	OK	170.000	-	
	- Uang Harian Lebih dari 8 Jam	1	KALI	x	10	ORG	x	-	KK	-	OK	170.000	-	
303	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan pemungutan dan penghitungan suara (Kab./Kota)													12.100.000
A) Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu pada Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara														7.000.000
521211	Belanja Bahan													7.000.000
	- Konsumsi dan Snack	4	KALI	x	25	ORG	x	1	KK	100	OK	70.000	7.000.000	
B) Supervisi Pendampingan Sentra Gakkumdu dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu pada Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara														5.100.000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota													5.100.000
	- Uang Transport	3	KALI	x	10	ORG	x	1	KK	30	OK	170.000	5.100.000	
401	Publikasi dan dokumentasi pengawasan pemungutan dan penghitungan suara (Kecamatan)													0
A) Publikasi Kinerja Bawaslu di Tahapan pemungutan dan penghitungan suara														0
521211	Belanja Bahan													0
	> Cetak bahan Publikasi													
	- Sticker Publikasi													
402	Pengawasan pemungutan dan penghitungan suara (Kecamatan)													72.000.000
A) Rapat Persiapan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara														12.000.000
521211	Belanja Bahan													12.000.000
	- Konsumsi dan Snack	1	KALI	x	15	ORG	x	16	KEC	240	OK	50.000	12.000.000	
B) Supervisi dan Monitoring Pengawasan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara														48.000.000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota													
	- Supervisi dan Monitoring	3	KALI	x	10	ORG	x	16	KEC	480	OK	100.000	48.000.000	
C) Rapat Evaluasi Pengawasan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara														12.000.000
521211	Belanja Bahan													12.000.000
	- Konsumsi dan Snack	1	KALI	x	15	ORG	x	16	KEC	240	OK	50.000	12.000.000	
D) Supervisi dan Monitoring Pengawasan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara PSS Demak														0
521211	Belanja Bahan													0
	- Supervisi dan Monitoring Demak	2	KALI	x	10	ORG	x	-	KEC	-	OK	100.000	-	
E) Rapat Persiapan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara PSS Demak														0
521211	Belanja Bahan													0
	- Konsumsi dan Snack	1	KALI	x	15	ORG	x	-	KEC	-	OK	50.000	0	
403	Pelatihan saksi partai politik (Kecamatan)													287.690.000
B) ToT Pelatihan Saksi Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota														278.910.000
>> Tot di 5 titik														
521211	Belanja Bahan													-
	- Belanja ATK	5	KALI	x	1	PAKET	x	0	KK	0	PAKET	200.000	-	
	- Spanduk	5	KALI	x	1	PAKET	x	0	KK	0	PAKET	200.000	-	
522151	Belanja Jasa Profesi													-
	- Narasumber	5	KALI	x	2	JAM	x	2	ORG x 0	0	OJ	900.000	-	
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota													-
	- Paket Rapat Fullday Panitia	1	KALI	x	50	Org	x	0	KK	0	OH	200.000	-	
	- Paket Rapat Fullday Peserta Pemilu Kab/Kot	1	KALI	x	0	Org				0	OH	200.000	-	
	- Paket Rapat Fullday Peserta Pemilu Kecamatan	1	KALI	x	0	Org				0	OH	200.000	-	
	- Uang Harian Fullday	1	KALI	x	0	Org				0	OH	95.000	-	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ KOMPONEN INPUT/AKUN/ RINCIAN BELANJA	DETAIL										VOL. KEG	BIAYA SATUAN	JUMLAH		
	- Uang Transport	1	KALI	x	0	Org						0	OK	170.000	-	
	>> Tot di 4 titik															
521211	Belanja Bahan														-	
	- Belanja ATK	4	KALI	x	1	PAKET	x	0	KK			0	PAKET	200.000	-	
	- Spanduk	4	KALI	x	1	PAKET	x	0	KK			0	PAKET	200.000	-	
522151	Belanja Jasa Profesi														-	
	- Narasumber	4	KALI	x	2	JAM	x	2	ORG	x	0	KK	0	OJ	900.000	-
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota														-	
	- Paket Rapat Fullday Panitia	1	KALI	x	40	Org	x	0	KK			0	OH	200.000	-	
	- Paket Rapat Fullday Peserta Pemilu Kab/Kot	1	KALI	x	0	Org						0	OH	200.000	-	
	- Paket Rapat Fullday Peserta Kecamatan	1	KALI	x	0	Org						0	OH	200.000	-	
	- Uang Harian Fullday	1	KALI	x	0	Org						0	OH	95.000	-	
	- Uang Transport	1	KALI	x	0	Org						0	OK	170.000	-	
	>> Tot di 3 titik															
521211	Belanja Bahan														1.200.000	
	- Belanja ATK	3	KALI	x	1	PAKET	x	1	KK			3	PAKET	200.000	600.000	
	- Spanduk	3	KALI	x	1	PAKET	x	1	KK			3	PAKET	200.000	600.000	
522151	Belanja Jasa Profesi														10.800.000	
	- Narasumber	3	KALI	x	2	JAM	x	2	ORG	x	1	KK	12	OJ	900.000	10.800.000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota														266.910.000	
	- Paket Rapat Fullday Panitia	1	KALI	x	30	Org	x	1	KK			30	OH	200.000	6.000.000	
	- Paket Rapat Fullday Peserta Pemilu Kab/Kot	1	KALI	x	32	Org						32	OH	200.000	6.400.000	
	- Paket Rapat Fullday Peserta Kecamatan	1	KALI	x	512	Org						512	OH	200.000	102.400.000	
	- Uang Harian Fullday	1	KALI	x	574	Org						574	OH	95.000	54.530.000	
	- Uang Transport	1	KALI	x	574	Org						574	OK	170.000	97.580.000	
	>> Tot di 2 titik															
521211	Belanja Bahan														-	
	- Belanja ATK	2	KALI	x	1	PAKET	x	0	KK			0	PAKET	200.000	-	
	- Spanduk	2	KALI	x	1	PAKET	x	0	KK			0	PAKET	200.000	-	
522151	Belanja Jasa Profesi														-	
	- Narasumber	2	KALI	x	2	JAM	x	2	ORG	x	0	KK	0	OJ	900.000	-
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota														-	
	- Paket Rapat Fullday Panitia	1	KALI	x	20	Org	x	0	KK			0	OH	200.000	-	
	- Paket Rapat Fullday Peserta Pemilu Kab/Kot	1	KALI	x	0	Org						0	OH	200.000	-	
	- Paket Rapat Fullday Peserta Kecamatan	1	KALI	x	0	Org						0	OH	200.000	-	
	- Uang Harian Fullday	1	KALI	x	0	Org						0	OH	95.000	-	
	- Uang Transport	1	KALI	x	0	Org						0	OK	170.000	-	
	>> Tot di 1 titik															
521211	Belanja Bahan														-	
	- Belanja ATK	1	KALI	x	1	PAKET	x	0	KK			0	PAKET	200.000	-	
	- Spanduk	1	KALI	x	1	PAKET	x	0	KK			0	PAKET	200.000	-	
522151	Belanja Jasa Profesi														-	
	- Narasumber	1	KALI	x	2	JAM	x	2	ORG	x	0	KK	0	OJ	900.000	-
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota														-	
	- Paket Rapat Fullday Panitia	1	KALI	x	10	Org	x	0	KK			0	OH	200.000	-	
	- Paket Rapat Fullday Peserta Pemilu Kab/Kot	1	KALI	x	0	Org						0	OH	200.000	-	
	- Paket Rapat Fullday Peserta Kecamatan	1	KALI	x	0	Org						0	OH	200.000	-	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ KOMPONEN INPUT/AKUN/ RINCIAN BELANJA	DETAIL									VOL. KEG	BIAYA SATUAN	JUMLAH			
	- Uang Harian Fullday	1	KALI	x	0	Org					0	OH	95.000	-		
	- Uang Transport	1	KALI	x	0	Org					0	OK	170.000	-		
	C) Rapat Persiapan Pelaksanaan Bimtek Saksi Peserta Pemilu													8.780.000		
521211	Belanja Bahan													3.340.000		
	- Belanja ATK	1	KALI	x	1	PAKET	x		X	1	KK	1	PAKET	200.000	200.000	
	- Spanduk	1	KALI	x	1	PAKET	x		X	1	KK	1	PAKET	200.000	200.000	
	- Konsumsi dan Snack	1	KALI	x	1	PAKET	x	42	ORG	X	1	KK	42	PAKET	70.000	2.940.000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota													5.440.000		
	- Uang Transport	1	KALI	x	32	ORG	x	1	KK			32	OJ	170.000	5.440.000	
501	Pengawasan pemungutan dan penghitungan suara (Kelurahan/Desa)													26.550.000		
	A) Supervisi dan Monitoring Pengawasan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara													26.550.000		
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota															
	- Supervisi dan Monitoring	2	KALI	x	1	ORG	x	177	D/K			354	OK	75.000	26.550.000	
	B) Supervisi dan Monitoring Pengawasan Pemungutan Suara Ulang													-		
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota															
	- Supervisi dan Monitoring 14 Kab/Kota	1	KALI	x	1	ORG	x	-	D/K			-	OK	75.000	-	
	C) Supervisi dan Monitoring Pengawasan Pemungutan Suara Susulan Demak													-		
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota															
	- Supervisi dan Monitoring Demak	1	KALI	x	1	ORG	x	-	D/K			-	OK	75.000	-	
601	Pengawasan pemungutan dan penghitungan suara (TPS)													780.528.000		
	A) Pengganti Uang Makan PTPS													780.528.000		
521211	Belanja Bahan													780.528.000		
	- Pengganti Uang Makan PTPS	2	KALI	x	1	ORG	x	4646	TPS			9292	OK	84.000	780.528.000	
	B) Pengawasan Pemungutan Suara Ulang PTPS													0		
521211	Belanja Bahan													0		
	- Pengganti Uang Makan PTPS 14 Kab/Kota	2	KALI	x	1	ORG	x	0	TPS			0	OK	84.000	0	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota													-		
	- Uang Transport PTPS 14 Kab/Kota	1	KALI	x	1	ORG	x	-	TPS			0	OK	50.000	-	
	C) Pengawasan Pemungutan Suara Susulan PTPS Demak													-		
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota													-		
	- Uang Transport PTPS Demak	1	KALI	x	1	ORG	x	-	TPS			-	OK	50.000	-	
6848	PENGAWASAN LOGISTIK													360.460.000		
6848.QCE	Penanganan Perkara													4.760.000		
6848.QCE.001	Penanganan Pelanggaran Logistik													4.760.000		
301	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran logistik (Kab./Kota)													2.380.000		
	A) Pemetaan Potensi Pelanggaran Tahapan Logistik													2.380.000		
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota													2.380.000		
	- Uang Transport	2	KALI	x	7	ORG				x	1	k/k	14	OK	170.000	2.380.000
302	Fasilitasi dan pengelolaan barang dugaan pelanggaran logistik (Kab./Kota)													2.380.000		
	A) Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu Tahapan Logistik													2.380.000		
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota													2.380.000		
	- Uang Transport	2	KALI	x	7	ORG				x	1	k/k	14	OK	170.000	2.380.000
6848.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga													355.700.000		
6848.QIC.001	Pengawasan Logistik													355.700.000		
301	Publikasi dan dokumentasi pengawasan logistik (Kab./Kota)													21.090.000		
	A) Peliputan Kegiatan Internal dan Eksternal													2.880.000		
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota													2.880.000		

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ KOMPONEN INPUT/AKUN/ RINCIAN BELANJA	DETAIL								VOL. KEG		BIAYA SATUAN	JUMLAH
	- Uang Transport	3	ORG	x	3	KALI	x	1	K/K	9	OK	170.000	1.530.000
	- Uang Harian Lebih dari 8 Jam	3	ORG	x	3	KALI	x	1	K/K	9	OK	150.000	1.350.000
B) Publikasi Kinerja Bawaslu di Tahapan Pengawasan Logistik												9.000.000	
522191	Belanja Jasa Lainnya												9.000.000
	- Iklan di Media Radio/Televisi	1	KALI	x	20	SPOT	x	1	K/K	20	OB	200.000	4.000.000
	- Talkshow di Radio (Blocking Time)	1	KALI	x	1	RADIO	x	1	K/K	1	PKT	5.000.000	5.000.000
C) Konsultasi Kehumasan ke Bawaslu Provinsi												5.370.000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa												5.370.000
	> Perjadin biasa												
	- Penginapan	1	HARI	x	3	ORG	x	1	KALI x 1 K/K	3	OH	600.000	1.800.000
	- Uang Harian	2	HARI	x	3	ORG	x	1	KALI x 1 K/K	6	OH	370.000	2.220.000
	- Transport	1	KALI	x	3	ORG	x	1	K/K	3	OK	450.000	1.350.000
D) Supervisi Kehumasan ke Kecamatan												3.840.000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota												3.840.000
	- Uang Transport	3	ORG	x	4	KALI	x	1	K/K	12	OK	170.000	2.040.000
	- Uang Harian Lebih dari 8 Jam	3	ORG	x	4	KALI	x	1	K/K	12	OK	150.000	1.800.000
302	Pengawasan logistik (Kab./Kota)												28.485.000
A) Pengawasan Logistik Bawaslu Kabupaten/Kota												28.485.000	
521211	Belanja Bahan												1.200.000
	- Penggandaan/Fotocopy	1	KALI	x	1	PAKET	x	1	K/K	1	PAKET	300.000	300.000
	- Belanja ATK	1	KALI	x	1	PAKET	x	1	K/K	1	PAKET	300.000	300.000
	- Komputer Supply	1	KALI	x	1	PKT	x	1	K/K	1	PAKET	300.000	300.000
	- Spanduk	1	KALI	x	1	PKT	x	1	K/K	1	PAKET	300.000	300.000
522151	Belanja Jasa Profesi												1.800.000
	- Narasumber	1	KALI	x	2	JAM	x	1	ORG x 1 K/K	2	OJ	900.000	1.800.000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa												7.160.000
	> Pengawasan Logistik												
	- Penginapan	1	KALI	x	4	ORG	x	1	HARI x 1 K/K	4	OH	600.000	2.400.000
	- Uang Harian	1	KALI	x	4	ORG	x	2	HARI x 1 K/K	8	OH	370.000	2.960.000
	- Transport Eselon III	1	KALI	x	4	ORG	x	1	HARI x 1 K/K	4	OK	450.000	1.800.000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota												4.500.000
	> Pengawasan Logistik												
	- Transport	5	KALI	x	3	ORG	x	1	KK	15	OK	150.000	2.250.000
	- Uang Harian Lebih dari 8 Jam	5	KALI	x	3	ORG	x	1	KK	15	OH	150.000	2.250.000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota												13.825.000
	- Paket Rapat Halfday Panitia, Narasumber Es III, Moderator	1	KALI	x	10	Org	x	1	KK	10	OH	200.000	2.000.000
	- Paket Rapat Halfday Peserta	1	KALI	x	25	Org	x	1	KK	25	OH	200.000	5.000.000
	- Uang Harian Halfday Panitia	1	KALI	x	10	Org	x	1	KK	10	OH	95.000	950.000
	- Uang Harian Halfday Peserta	1	KALI	x	25	Org	x	1	KK	25	OH	95.000	2.375.000
	- Uang Transport	1	KALI	x	35	Org	x	1	KK	35	OK	100.000	3.500.000
303	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan logistik (Kab./Kota)												5.200.000
A) Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu pada Tahapan Logistik												3.500.000	
521211	Belanja Bahan												3.500.000
	- Konsumsi dan Snack	2	KALI	x	25	ORG	x	1	KK	50	OK	70.000	3.500.000
B) Supervisi Pendampingan Sentra Gakkumdu dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu pada Tahapan Logistik												1.700.000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota												1.700.000
	- Uang Transport	1	KALI	x	10	ORG			x 1 k/k	10	OK	170.000	1.700.000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ KOMPONEN INPUT/AKUN/ RINCIAN BELANJA	DETAIL										VOL. KEG	BIAYA SATUAN	JUMLAH
401	Publikasi dan dokumentasi pengawasan logistik (Kecamatan)													14.400.000
A)	Publikasi dan dokumentasi pengawasan logistik (Kecamatan)													14.400.000
524113	Perjalanan Dinas Dalam Kota													14.400.000
	Pengawasan/Supervisi/ Monitoring	3	Kali	x	3	Org	x	16	Kec			144	OK	100.000
	Pengawasan/Supervisi/ Monitoring (Karimun Jawa dan Kampung laut)	3	Kali	x	3	Org	x	-	Kec			-	OK	1.000.000
402	Pengawasan logistik (Kecamatan)													14.400.000
A)	Pengawasan logistik (Kecamatan)													14.400.000
524113	Perjalanan Dinas Dalam Kota													14.400.000
	Supervisi/ Monitoring	3	Kali	x	3	Org	x	16	Kec			144	OK	100.000
	Pengawasan/Supervisi/ Monitoring (Karimun Jawa dan Kampung laut)	3	Kali	x	3	Org	x	-	Kec			-	OK	1.000.000
501	Pengawasan logistik (Kelurahan/Desa)													39.825.000
A)	Pengawasan logistik (Kelurahan/Desa)													39.825.000
524113	Perjalanan Dinas Dalam Kota													39.825.000
	Supervisi/ Monitoring	3	Kali	x	1	Org	x	177	D/K			531	OK	75.000
601	Pengawasan logistik (TPS)													232.300.000
B)	Pengawasan logistik													232.300.000
524113	Perjalanan Dinas Dalam Kota													232.300.000
	Supervisi/ Monitoring	1	Kali	x	1	Org	x	4.646	PTPS			4.646	OK	50.000
6844	PENGAWASAN MASA TENANG													928.204.000
6844.QCE	Penanganan Perkara													12.344.000
6844.QCE.001	Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Masa Tenang													12.344.000
301	Pengelolaan data penanganan pelanggaran masa tenang (Kab./Kota)													5.960.000
A)	Validasi Data Penanganan Pelanggaran Masa Tenang													2.380.000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota													2.380.000
	- Uang Transport	2	KALI	x	7	ORG				x	1	k/k	14	OK
B)	Konsultasi ke Provinsi													3.580.000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa													3.580.000
	- Penginapan Eselon III	1	HARI	x	1	ORG	x	1	KALI	x	1	k/k	1	OH
	- Penginapan Staf	1	HARI	x	1	ORG	x	1	KALI	x	1	k/k	1	OH
	- Uang Harian Eselon III	2	HARI	x	1	ORG	x	1	KALI	x	1	k/k	2	OH
	- Uang Harian Staf	2	HARI	x	1	ORG	x	1	KALI	x	1	k/k	2	OH
	- Transport Eselon III	1	HARI	x	1	ORG	x	1	KALI	x	1	k/k	1	OK
	- Transport Staf	1	HARI	x	1	ORG	x	1	KALI	x	1	k/k	1	OK
302	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran masa tenang (Kab./Kota)													1.190.000
A)	Pemetaan Potensi Pelanggaran Tahapan Masa Tenang													1.190.000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota													1.190.000
	- Uang Transport	1	KALI	x	7	ORG	x	1				k/k	7	OK
303	Pengelolaan barang dugaan pelanggaran masa tenang (Kab./Kota)													1.190.000
A)	Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu Tahapan Masa Tenang													1.190.000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota													1.190.000
	- Uang Transport	1	KALI	x	7	ORG				x	1	k/k	7	OK
304	Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses masa tenang (Kab./Kota)													4.004.000
A)	Konsultasi ke Provinsi													4.004.000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa													4.004.000
	- Penginapan Eselon III	1	HARI	x	1	ORG	x	1	KALI	x	1	KK	1	OH

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ KOMPONEN INPUT/AKUN/ RINCIAN BELANJA	DETAIL										VOL. KEG		BIAYA SATUAN	JUMLAH	
	- Penginapan	1	HARI	x	1	ORG	x	1	KALI	x	1	KK	1	OH	600.000	600.000
	- Uang Harian	2	HARI	x	2	ORG	x	1	KALI	x	1	KK	4	OH	370.000	1.480.000
	- Transport	1	HARI	x	2	ORG	x	1	KALI	x	1	KK	2	OK	450.000	900.000
6844.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga															915.860.000
6844.QIC.001	Pengawasan Masa Tenang															915.860.000
301	Publikasi dan dokumentasi pengawasan masa tenang (Kab./Kota)															10.920.000
A)	Peliputan Kegiatan Internal dan Eksternal															640.000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota															640.000
	- Uang Transport	2	ORG	x	1	KALI	x	1	K/K				2	OK	170.000	340.000
	- Uang Harian Lebih dari 8 Jam	2	ORG	x	1	KALI	x	1	K/K				2	OK	150.000	300.000
B)	Publikasi Kinerja Bawaslu di Tahapan Masa Tenang															9.000.000
522191	Belanja Jasa Lainnya															9.000.000
	- Iklan di Media Radio/Televisi	1	KALI	x	20	SPOT	x	1	K/K				20	OB	200.000	4.000.000
	- Talkshow di Radio (Blocking Time)	1	KALI	x	1	RADIO	x	1	K/K				1	PKT	5.000.000	5.000.000
C)	Supervisi Kehumasan ke Kecamatan															1.280.000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota															1.280.000
	- Uang Transport	2	ORG	x	2	KALI	x	1	K/K				4	OK	170.000	680.000
	- Uang Harian Lebih dari 8 Jam	2	ORG	x	2	KALI	x	1	K/K				4	OK	150.000	600.000
302	Pengawasan masa tenang (Kab./Kota)															144.615.000
A)	Rapat Koordinasi Persiapan Pengawasan Masa Tenang dengan Bawaslu Kab/Kota															2.650.000
521211	Belanja Bahan															2.650.000
	- Penggandaan/Fotocopy	1	KALI	x	1	PAKET	x	1	KK				1	PKT	300.000	300.000
	- Belanja ATK	1	KALI	x	1	PAKET	x	1	KK				1	PKT	300.000	300.000
	- Komputer Supply	1	KALI	x	1	PAKET	x	1	KK				1	PKT	300.000	300.000
	- Konsumsi dan Snack	1	KALI	x	25	ORG	x	1	KK				25	OK	70.000	1.750.000
B)	Rapat Koordinasi dan Konsolidasi Pengawasan Persiapan Pengawasan Masa Tenang dengan Peserta Pemilu dan Stakeholder															33.215.000
521211	Belanja Bahan															1.850.000
	- Penggandaan/Fotocopy	1	Kali	x	1	Paket	x	1	KK				1	PKT	500.000	500.000
	- Spanduk	1	Kali	x	1	Paket	x	1	KK				1	PKT	350.000	350.000
	- ATK	1	Kali	x	1	Paket	x	1	KK				1	PKT	500.000	500.000
	- Komputer Supply	1	Kali	x	1	Paket	x	1	KK				1	PKT	500.000	500.000
522151	Belanja Jasa Profesi															2.500.000
	- Narasumber Eselon III (Eksternal)	1	Kali	x	2	Jam	x	1	Org	x	1	KK	2	OJ	900.000	1.800.000
	- Moderator (Eksternal)	1	Kali	x	1	Org	x	1	KK				1	OK	700.000	700.000
524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota															28.865.000
	- Paket Rapat Halfday Eselon II	1	Kali	x	8	Org	x	1	KK				8	OH	200.000	1.600.000
	- Paket Rapat Halfday Panitia, Narasumber Es III, Moderator	1	Kali	x	7	Org	x	1	KK				7	OH	200.000	1.400.000
	- Paket Rapat Halfday Peserta	1	Kali	x	50	Org	x	1	KK				50	OH	200.000	10.000.000
	- Uang Harian Halfday Peserta	1	Kali	x	65	Org	x	1	KK				65	OH	95.000	6.175.000
	- Uang Transport	1	Kali	x	57	Org	x	1	KK				57	OK	170.000	9.690.000
C)	Apel Siaga Tahapan Pengawasan Pemilu 2024															103.650.000
521211	Belanja Bahan															20.450.000
	- Penggandaan/Fotocopy	1	Kali	x	1	Paket	x	1	KK				1	PKT	300.000	300.000
	- Spanduk	1	Kali	x	1	Paket	x	1	KK				1	PKT	300.000	300.000
	- Belanja ATK	1	Kali	x	1	Paket	x	1	KK				1	PKT	300.000	300.000
	- Komputer Supply	1	Kali	x	1	Paket	x	1	KK				1	PKT	300.000	300.000
	- Konsumsi dan Snack Panwascam	1	Kali	x	3	ORG	x	16	KEC				48	PKT	70.000	3.360.000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ KOMPONEN INPUT/AKUN/ RINCIAN BELANJA	DETAIL								VOL. KEG	BIAYA SATUAN	JUMLAH
	- Konsumsi dan Snack PPD/K	1	Kali	x	1	ORG	x	177	D/K	177	PKT	12.390.000
	- Konsumsi dan Snack Peserta Eksternal	1	Kali	x	30	ORG	x	1	KK	30	PKT	2.100.000
	- Konsumsi dan Snack Internal	1	Kali	x	20	ORG	x	1	KK	20	PKT	1.400.000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya											1.000.000
	- Biaya Kebersihan	1	Kali	x	1	Paket	x	1	KK	1	PKT	1.000.000
522141	Belanja Sewa											47.000.000
	- Sewa Panggung	1	KALI	x	1	PAKET	x	1	KK	1	PKT	15.000.000
	- Sewa Tempat	1	KALI	x	1	PAKET	x	1	KK	1	OJ	20.000.000
	- Sewa Peralatan	1	KALI	x	1	PAKET	x	1	KK	1	OJ	12.000.000
522151	Belanja Jasa Profesi											4.300.000
	- Narasumber Eselon III (Eksternal)	1	Kali	x	2	Jam	x	2	Org x 1 KK	4	OJ	900.000
	- Moderator (Eksternal)	1	KALI	x	1	ORG	x	1	KK	1	OK	700.000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota											30.900.000
	- Transport Internal	1	KALI	x	20	ORG	x	1	KK	20	OK	170.000
	Transport Panwascam	1	Kali	x	3	ORG	x	16	KEC	48	OK	100.000
	Transport PPD/K	1	Kali	x	1	ORG	x	177	D/K	177	OK	100.000
	Transport Peserta Eksternal	1	Kali	x	30	ORG	x	1	KK	30	OK	100.000
	Transport Internal	1	Kali	x	20	ORG	x	1	KK	20	OK	100.000
D) Patroli Pengawasan Pengawasan Masa Tenang												5.100.000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota											
	- Supervisi dan Monitoring	3	KALI	x	10	ORG	x	1	KK	30	OK	170.000
303	Facilitasi sentra gakkumdu tahapan masa tenang (Kab./Kota)											3.450.000
A) Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu pada Tahapan Masa Tenang												1.750.000
521211	Belanja Bahan											1.750.000
	- Konsumsi dan Snack	1	KALI	x	25	ORG			x 1 k/k	25	OK	70.000
B) Supervisi Pendampingan Sentra Gakkumdu dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu pada Tahapan Masa Tenang												1.700.000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota											1.700.000
	- Uang Transport	1	KALI	x	10	ORG			x 1 k/k	10	OK	170.000
401	Publikasi dan dokumentasi pengawasan masa tenang (Kecamatan)											0
A) Publikasi Kinerja Bawaslu di Tahapan Masa Tenang												0
521211	Belanja Bahan											0
	> Cetak bahan Publikasi											
	- Sticker Publikasi											
402	Pengawasan masa tenang (Kecamatan)											730.325.000
A) Patroli Pengawasan Pengawasan Masa Tenang												48.000.000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota											48.000.000
	- Supervisi dan Monitoring	3	KALI	x	10	ORG	x	16	KEC	480	OK	100.000
B) Apel Siaga Tahapan Pengawasan Pemilu 2024												640.725.000
521211	Belanja Bahan											223.000.000
	- Spanduk	1	Kali	x	2	Paket	x	16	KEC	32	PKT	9.600.000
	Konsumsi dan Snack Internal Panwascam	1	Kali	x	12	ORG	x	16	KEC	192	PKT	40.000
	Konsumsi dan Snack Eksternal Panwascam	1	Kali	x	20	ORG	x	16	KEC	320	PKT	40.000
	Konsumsi dan Snack PPD/K	1	Kali	x	1	ORG	x	177	D/K	177	PKT	40.000
	Konsumsi dan Snack PTPS	1	Kali	x	1	ORG	x	4646	TPS	4646	PKT	40.000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya											4.800.000
	- Biaya Kebersihan	1	Kali	x	1	Paket	x	16	KEC	16	PKT	300.000
522141	Belanja Sewa											12.800.000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ KOMPONEN INPUT/AKUN/ RINCIAN BELANJA	DETAIL								VOL. KEG		BIAYA SATUAN	JUMLAH		
	- Sewa Peralatan (sound system, dll)	1	Kali	x	1	PAKET	x	16	KEC	16	OJ	800.000	12.800.000		
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota									1			400.125.000		
	Transport Internal Panwascam	1	Kali	x	12	ORG	x	16	KEC	192	OK	75.000	14.400.000		
	Transport Eksternal Panwascam	1	Kali	x	20	ORG	x	16	KEC	320	OK	75.000	24.000.000		
	Transport PPD/K	1	Kali	x	1	ORG	x	177	D/K	177	OK	75.000	13.275.000		
	Transport PTPS	1	Kali	x	1	ORG	x	4646	TPS	4646	OK	75.000	348.450.000		
C) Koordinasi Penertiban APK													41.600.000		
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota												41.600.000		
	- Uang Transport Peserta Eksternal	2	KALI	x	8	ORG	x	16	KEC	256	OK	100.000	25.600.000		
	- Uang Transport Penertiban APK	2	KALI	x	5	ORG	x	16	KEC	160	OK	100.000	16.000.000		
501	Pengawasan masa tenang (Kelurahan/Desa)												26.550.000		
A) Patroli Pengawasan Pengawasan Masa Tenang													26.550.000		
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota												26.550.000		
	- Supervisi dan Monitoring	2	KALI	x	1	ORG	x	177	D/K	354	OK	75.000	26.550.000		
6846	PENGAWASAN PENETAPAN HASIL PEMILU												409.472.000		
6846.QCE	Penanganan Perkara												5.960.000		
6846.QCE.001	Penanganan Pelanggaran Penetapan Hasil Pemilu												5.960.000		
301	Pengelolaan data penanganan pelanggaran penetapan hasil pemilu (Kab./Kota)												4.770.000		
A) Validasi Data Penanganan Pelanggaran Penetapan Hasil Pemilu													1.190.000		
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota												1.190.000		
	- Uang Transport	1	KALI	x	7	ORG			x	1	k/k	7 OK	170.000	1.190.000	
B) Konsultasi ke Provinsi													3.580.000		
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa												3.580.000		
	- Penginapan Eselon III	1	HARI	x	1	ORG	x	1	KALI	x	1	k/k	1 OH	600.000	600.000
	- Penginapan Staf	1	HARI	x	1	ORG	x	1	KALI	x	1	k/k	1 OH	600.000	600.000
	- Uang Harian Eselon III	2	HARI	x	1	ORG	x	1	KALI	x	1	k/k	2 OH	370.000	740.000
	- Uang Harian Staf	2	HARI	x	1	ORG	x	1	KALI	x	1	k/k	2 OH	370.000	740.000
	- Transport Eselon III	1	HARI	x	1	ORG	x	1	KALI	x	1	k/k	1 OK	450.000	450.000
	- Transport Staf	1	HARI	x	1	ORG	x	1	KALI	x	1	k/k	1 OK	450.000	450.000
302	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran penetapan hasil pemilu (Kab./Kota)												1.190.000		
A) Pemetaan Potensi Pelanggaran Tahapan Penetapan Hasil Pemilu													1.190.000		
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota												1.190.000		
	- Uang Transport	1	KALI	x	7	ORG			x	1	k/k	7 OK	170.000	1.190.000	
6846.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga												403.512.000		
6846.QIC.001	Pengawasan Penetapan Hasil Pemilu												403.512.000		
301	Publikasi dan dokumentasi pengawasan penetapan hasil pemilu (Kab./Kota)												16.290.000		
A) Peliputan Kegiatan Internal dan Eksternal													1.920.000		
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota												1.920.000		
	- Uang Transport	3	ORG	x	2	KALI	x	1	K/K	6	OK	170.000	1.020.000		
	- Uang Harian Lebih dari 8 Jam	3	ORG	x	2	KALI	x	1	K/K	6	OK	150.000	900.000		
B) Publikasi Kinerja Bawaslu di Tahapan Penetapan Hasil Pemilu													9.000.000		
522191	Belanja Jasa Lainnya												9.000.000		
	- Iklan di Media Radio/Televisi	1	KALI	x	20	SPOT	x	1	K/K	20	OB	200.000	4.000.000		
	- Talkshow di Radio (Blocking Time)	1	KALI	x	1	RADIO	x	1	K/K	1	PKT	5.000.000	5.000.000		
C) Konsultasi Kehumasan ke Bawaslu Provinsi													5.370.000		
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa												5.370.000		
	> Perjadin biasa														

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ KOMPONEN INPUT/AKUN/ RINCIAN BELANJA	DETAIL										VOL. KEG		BIAYA SATUAN	JUMLAH
	- Penginapan	1	HARI	x	3	ORG	x	1	KALI	x	1 K/K	3	OH	600.000	1.800.000
	- Uang Harian	2	HARI	x	3	ORG	x	1	KALI	x	1 K/K	6	OH	370.000	2.220.000
	- Transport	1	KALI	x	3	ORG	x	1	K/K			3	OK	450.000	1.350.000
302	Pengawasan penetapan hasil pemilu (Kab./Kota)														25.440.000
	A) Pengawasan Penetapan Hasil Bawaslu Kabupaten/Kota														25.440.000
521211	Belanja Bahan														1.200.000
	- Penggandaan/Fotocopy	1	KALI	x	1	PAKET	x	1	K/K			1	PAKET	300.000	300.000
	- Belanja ATK	1	KALI	x	1	PAKET	x	1	K/K			1	PAKET	300.000	300.000
	- Komputer Supply	1	KALI	x	1	PKT	x	1	K/K			1	PAKET	300.000	300.000
	- Spanduk	1	KALI	x	1	PKT	x	1	K/K			1	PAKET	300.000	300.000
522151	Belanja Jasa Profesi														1.800.000
	- Narasumber	1	KALI	x	2	JAM	x	1	ORG	x	1 K/K	2	OJ	900.000	1.800.000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota														3.840.000
	> Pengawasan														
	- Transport	4	KALI	x	3	ORG	x	1	KK			12	OK	170.000	2.040.000
	- Uang Harian Lebih dari 8 Jam	4	KALI	x	3	ORG	x	1	KK			12	OH	150.000	1.800.000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota														18.600.000
	- Paket Rapat Halfday Panitia, Narasumber Es III, Moderator	1	KALI	x	10	Org	x	1	KK			10	OH	200.000	2.000.000
	- Paket Rapat Halfday Peserta	1	KALI	x	30	Org	x	1	KK			30	OH	200.000	6.000.000
	- Uang Harian Halfday Panitia	1	KALI	x	10	Org	x	1	KK			10	OH	95.000	950.000
	- Uang Harian Halfday Peserta	1	KALI	x	30	Org	x	1	KK			30	OH	95.000	2.850.000
	- Uang Transport	1	KALI	x	40	Org	x	1	KK			40	OK	170.000	6.800.000
303	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan penetapan hasil pemilu (Kab./Kota)														3.450.000
	A) Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu pada Tahapan Penetapan Hasil Pemilu														1.750.000
521211	Belanja Bahan														1.750.000
	- Konsumsi dan Snack	1	KALI	x	25	ORG	x	1	KK			25	OK	70.000	1.750.000
	B) Supervisi Pendampingan Sentra Gakkumdu dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu pada Tahapan Penetapan Hasil Pemilu														1.700.000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota														1.700.000
	- Uang Transport	1	KALI	x	10	ORG				x	1 k/k	10	OK	170.000	1.700.000
304	Fasilitasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (Kab./Kota)														343.932.000
	A) Rapat Koordinasi Persiapan Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum														7.900.000
	- Penggandaan/Fotocopy	2	KALI	x	1	PAKET	x	1	K/K			2	PKT	400.000	800.000
	- Belanja ATK	2	KALI	x	1	PAKET	x	1	K/K			2	PKT	250.000	500.000
	- Komputer Supply	2	KALI	x	1	PAKET	x	1	K/K			2	PKT	500.000	1.000.000
	- Konsumsi dan Snack	2	KALI	x	40	ORG	x	1	K/K			80	OK	70.000	5.600.000
	B) Fasilitas Perjalanan Dinas Menghadiri Sidang PHPU														329.032.000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa														329.032.000
	> Perjalanan Dinas														
	- Penginapan Eselon III	4	HARI	x	6	ORG	x	4	KALI	x	1 K/K	96	OH	992.000	95.232.000
	- Penginapan	3	HARI	x	7	ORG	x	3	KALI	x	1 K/K	63	OH	730.000	45.990.000
	- Uang Harian	4	HARI	x	10	ORG	x	4	KALI	x	1 K/K	160	OH	530.000	84.800.000
	- Tiket Pesawat PP	3	KALI	x	13	ORG				x	1 K/K	39	OK	2.182.000	85.098.000
	- Transport	4	KALI	x	10	ORG				x	1 K/K	40	OK	447.800	17.912.000
	> Perjalanan Dinas Klaten														0
	- Penginapan Eselon III	4	HARI	x	6	ORG	x	3	KALI	x	0 K/K	0	OH	992.000	0
	- Penginapan	3	HARI	x	7	ORG	x	3	KALI	x	0 K/K	0	OH	730.000	0
	- Uang Harian	4	HARI	x	10	ORG	x	4	KALI	x	0 K/K	0	OH	530.000	0

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ KOMPONEN INPUT/AKUN/ RINCIAN BELANJA	DETAIL									VOL. KEG		BIAYA SATUAN	JUMLAH
	- Tiket Pesawat PP	3	KALI	x	13	ORG		x	0	K/K	0	OK	2.182.000	0
	- Transport	4	KALI	x	10	ORG		x	0	K/K	0	OK	343.000	0
	> Perjalanan Dinas Sukoharjo													0
	- Penginapan Eselon III	4	HARI	x	6	ORG	x	4	KALI	x	0	K/K	992.000	0
	- Penginapan	3	HARI	x	7	ORG	x	3	KALI	x	0	K/K	730.000	0
	- Uang Harian	4	HARI	x	10	ORG	x	4	KALI	x	0	K/K	530.000	0
	- Tiket Pesawat PP	3	KALI	x	13	ORG		x	0	K/K	0	OK	2.182.000	0
	- Transport	3	KALI	x	9	ORG		x	0	K/K	0	OK	441.186	0
	> Perjalanan Dinas Kab. Magelang													0
	- Penginapan Eselon III	4	HARI	x	6	ORG	x	4	KALI	x	0	K/K	992.000	0
	- Penginapan	3	HARI	x	7	ORG	x	3	KALI	x	0	K/K	730.000	0
	- Uang Harian	4	HARI	x	10	ORG	x	4	KALI	x	0	K/K	530.000	0
	- Tiket Pesawat PP	3	KALI	x	13	ORG		x	0	K/K	0	OK	2.182.000	0
	- Transport	4	KALI	x	6	ORG		x	0	K/K	0	OK	413.000	0
	C) Fasilitas Perselisihan Hasil Pemilihan Umum													7.000.000
521211	Belanja Bahan													7.000.000
	- Keperluan Administrasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum	2	KALI	x	2	PAKET	x	1	K/K		4	PKT	1.750.000	7.000.000
	- Keperluan Administrasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Klaten	2	KALI	x	2	PAKET	x	0	K/K		0	PKT	8.750.000	0
	- Keperluan Administrasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Sukoharjo	2	KALI	x	2	PAKET	x	0	K/K		0	PKT	3.250.000	0
	- Keperluan Administrasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kab. Magelang	2	KALI	x	2	PAKET	x	0	K/K		0	PKT	3.750.000	0
401	Fasilitas Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (Kecamatan)													14.400.000
	A) Pengawasan Penetapan Hasil Pemilu (Kecamatan)													14.400.000
524113	Perjalanan Dinas Dalam Kota													14.400.000
	Supervisi/ Monitoring	3	Kali	x	3	Org	x	16	Kec		144	OK	100.000	14.400.000
	Pengawasan/Supervisi/ Monitoring (Karimun Jawa dan Kampung laut)	3	Kali	x	3	Org	x	-	Kec		-	OK	800.000	-
6847	PENGAWASAN PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SERTA ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI, DAN DPRD KABUPATEN/KOTA													11.920.000
6847.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga													11.920.000
6847.QIC.001	Publikasi Pengawasan Sumpah Janji													5.960.000
301	Publikasi dan dokumentasi pengawasan pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wapres serta Anggota DPR, DPD dan DPRD (Kab./Kota)													5.960.000
	A) Peliputan Kegiatan Internal dan Eksternal													960.000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota													960.000
	- Uang Transport	3	ORG	x	1	KALI	x	1	K/K		3	OK	170.000	510.000
	- Uang Harian Lebih dari 8 Jam	3	ORG	x	1	KALI	x	1	K/K		3	OK	150.000	450.000
	B) Publikasi dan dokumentasi pengawasan pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wapres serta Anggota DPR, DPD dan DPRD (Kab./Kota)													5.000.000
522191	Belanja Jasa Lainnya													5.000.000
	- Talkshow di Radio (Blocking Time)	1	KALI	x	1	RADIO	x	1	K/K		1	PKT	5.000.000	5.000.000
6847.QIC.002	Pengawasan Pengucapan Sumpah Janji													5.960.000
301	Pengawasan pengawasan pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wapres serta Anggota DPR, DPD dan DPRD (Kab./Kota)													5.960.000
	A) Peliputan Kegiatan Internal dan Eksternal													960.000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota													960.000
	- Uang Transport	3	ORG	x	1	KALI	x	1	K/K		3	OK	170.000	510.000
	- Uang Harian Lebih dari 8 Jam	3	ORG	x	1	KALI	x	1	K/K		3	OK	150.000	450.000
	B) Publikasi Kinerja Bawaslu di Tahapan Pengawasan Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, dan DPRD													5.000.000
522191	Belanja Jasa Lainnya													5.000.000
	- Talkshow di Radio (Blocking Time)	1	KALI	x	1	RADIO	x	1	K/K		1	PKT	5.000.000	5.000.000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ KOMPONEN INPUT/AKUN/ RINCIAN BELANJA	DETAIL	VOL. KEG	BIAYA SATUAN	JUMLAH
115.WA	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN				1.639.654.000
4355	PEMERIKSAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN INTERNAL				3.200.000
4355.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal				3.200.000
4355.EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja				3.200.000
301	Implementasi reformasi birokrasi Bawaslu dan Bawaslu Kabupaten/Kota				3.200.000
A)	Rapat Koordinasi Reformasi birokrasi Bawaslu Kabupaten/Kota				3.200.000
521211	Belanja Bahan				1.400.000
	> Rapat Biasa				
	- Konsumsi	1 KALI x 20 ORG x 1 K/K	20 OK	70.000	1.400.000
522151	Belanja Jasa Profesi				1.800.000
	- Narasumber	1 KALI x 2 JAM x 1 ORG x 1 K/K	2 OJ	900.000	1.800.000
4356	PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI				7.430.000
4356.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal				7.430.000
4356.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Bawaslu				3.840.000
301	Pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi serta informasi publik Bawaslu Kabupaten/Kota				3.840.000
A)	Peliputan Kegiatan Internal dan Eksternal				3.840.000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				3.840.000
	- Uang Transport	2 ORG x 6 KALI x 1 K/K	12 OH	170.000	2.040.000
	- Uang Harian Lebih dari 8 Jam	2 ORG x 6 KALI x 1 K/K	12 OH	150.000	1.800.000
4356.EBA.963	Layanan Data dan Informasi				3.590.000
301	Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik Bawaslu Kabupaten/Kota				3.590.000
A)	Pengelolaan PPID Bawaslu Kabupaten/Kota				3.590.000
521211	Belanja Bahan				1.790.000
	> Rapat di Kantor				
	- Pencetakan Buku Seputar PPID	1 TBT x 10 EKS x 1 K/K	10 PKT	60.000	600.000
	- Belanja ATK	1 KALI x 1 PAKET x 1 K/K	1 PKT	100.000	100.000
	- Komputer Supply	1 KALI x 1 PAKET x 1 K/K	1 PKT	100.000	100.000
	- Konsumsi dan Snack	1 KALI x 15 ORG x 1 K/K	15 OK	66.000	990.000
522151	Belanja Jasa Profesi				1.800.000
	- Narasumber	1 KALI x 1 JAM x 2 ORG x 1 K/K	2 OJ	900.000	1.800.000
6849	PENGELOLAAN KEUANGAN, BMN, DAN UMUM				1.606.634.000
6849.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal				1.594.032.000
6849.EBA.956	Layanan BMN				1.920.000
301	Pengelolaan BMN Bawaslu Kabupaten/Kota				1.920.000
A)	Pengelolaan BMN Bawaslu Kabupaten/Kota				1.920.000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				-
	> KOORDINASI KE PROVINSI				-
	- Penginapan	1 KALI x 2 ORG x 1 HARI x 0 KK	0 OH	600.000	-
	- Uang Harian	1 KALI x 2 ORG x 2 HARI x 0 KK	0 OH	370.000	-
	- Transport	1 KALI x 2 ORG x 0 KK	0 OK	450.000	-
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				1.920.000
	> Bawaslu Kota Semarang				1.920.000
	- Uang Harian	3 KALI x 2 ORG x 1 KK	6 OH	170.000	1.020.000
	- Transport	3 KALI x 2 ORG x 1 KK	6 OK	150.000	900.000
6849.EBA.994	Layanan Perkantoran				1.592.112.000
001	Gaji dan Tunjangan				741.812.000
C)	Gaji dan Tunjangan Bawaslu Kabupaten/Kota				741.812.000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ KOMPONEN INPUT/AKUN/ RINCIAN BELANJA	DETAIL								VOL. KEG		BIAYA SATUAN	JUMLAH
511332	Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara												741.812.000
	-- Tipe A												
	Ketua	1	ORG	x	12	BLN	x	1	K/K	12	OB	11.541.000	138.492.000
	Anggota	2	ORG	x	12	BLN	x	0	K/K	0	OB	10.416.000	-
	Anggota	4	ORG	x	12	BLN	x	1	K/K	48	OB	10.416.000	499.968.000
	-- Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas												
	Ketua	1	ORG	x	2	BLN	x	1	K/K	2	OB	10.335.050	20.671.000
	Anggota	2	ORG	x	2	BLN	x	0	K/K	0	OB	10.335.050	-
	Anggota	4	ORG	x	2	BLN	x	1	K/K	8	OB	10.335.050	82.681.000
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor												850.300.000
B)	Operasional dan Pemeliharaan Kantor Bawaslu Kabupaten/Kota												850.300.000
521111	Belanja Keperluan Perkantoran												597.150.000
	- Honorarium Non PNS												496.350.000
	Honor Pelaksana Teknis	9	ORG	x	14	BLN	x	1	K/K	126	OB	2.600.000	327.600.000
	Inkin Pelaksana Teknis	9	ORG	x	12	BLN	x	1	K/K	108	OB	750.000	81.000.000
	Satpam	2	ORG	x	13	BLN	x	1	K/K	26	OB	2.300.000	59.800.000
	Pramubakti	1	ORG	x	13	BLN	x	1	K/K	13	OB	2.150.000	27.950.000
	- Keperluan Sehari-hari Perkantoran												30.000.000
	Keperluan Sehari-hari Perkantoran	1	PAKET	x	1	THN	x	1	K/K	1	PAKET	30.000.000	30.000.000
	Keperluan Sehari-hari Perkantoran Karanganyar	1	PAKET	x	1	THN	x	0	K/K	0	PAKET	45.000.000	-
	- Jamuan Tamu												40.800.000
	Jamuan Tamu (Konsumsi dan Snack)	5	ORG	x	10	KALI	x	12	BLN x 1 K/K	600	OB	68.000	40.800.000
	Jamuan Tamu (Konsumsi dan Snack) Karanganyar	5	ORG	x	10	KALI	x	12	BLN x 0 K/K	0	OB	60.000	-
	Jamuan Tamu (Konsumsi dan Snack) Kendal	5	ORG	x	10	KALI	x	12	BLN x 0 K/K	0	OB	65.834	-
	- Langganan Internet												24.000.000
	Langganan Internet	1	PAKET	x	12	BLN	x	1	K/K	12	BLN	2.000.000	24.000.000
	Langganan Internet Kota Tegal dan Karanganyar	1	PAKET	x	12	BLN	x	0	K/K	0	BLN	1.000.000	-
	- Langganan Aplikasi Video Conference												6.000.000
	Pengadaan Lisensi Aplikasi Video Conference	1	AKUN	x	12	BLN	x	1	K/K	12	AKUN	500.000	6.000.000
	Pengadaan Lisensi Aplikasi Video Conference Demak	1	AKUN	x	12	BLN	x	0	K/K	0	AKUN	300.000	-
	Pengadaan Lisensi Aplikasi Video Conference Kota Tegal	1	AKUN	x	12	BLN	x	0	K/K	0	AKUN	250.000	-
521114	Belanja pengiriman surat dinas pos pusat												6.006.000
	Jasa Pengiriman Surat	1	PAKET	x	12	BLN	x	1	K/K	12	BLN	500.508	6.006.000
	Jasa Pengiriman Surat Demak	1	PAKET	x	12	BLN	x	0	K/K	0	BLN	150.000	-
	Jasa Pengiriman Surat Kota Tegal	1	PAKET	x	12	BLN	x	0	K/K	0	BLN	250.000	-
521115	Honor Operasional Satuan Kerja												17.904.000
	- Honorarium Pengelola Keuangan Non Satker Mandiri												
	Pejabat Pembuat Komitmen	1	ORG	x	12	BLN	x	0	K/K	0	OB	884.000	-
	Pejabat Pembuat Komitmen	1	ORG	x	12	BLN	x	0	K/K	0	OB	1.008.000	-
	Pejabat Pembuat Komitmen	1	ORG	x	12	BLN	x	1	K/K	12	OB	1.168.000	14.016.000
	Bendahara Pengeluaran Pembantu	1	ORG	x	12	BLN	x	0	K/K	0	OB	228.000	-
	Bendahara Pengeluaran Pembantu	1	ORG	x	12	BLN	x	0	K/K	0	OB	256.000	-
	Bendahara Pengeluaran Pembantu	1	ORG	x	12	BLN	x	1	K/K	12	OB	324.000	3.888.000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya												22.800.000
	Pakaian Dinas (Tipe A)												

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ KOMPONEN INPUT/AKUN/ RINCIAN BELANJA	DETAIL								VOL. KEG		BIAYA SATUAN	JUMLAH
	Ketua/Anggota (5 Orang)	5	ORG	x	2	STEL	x	1	K/K	10	STEL	600.000	6.000.000
	Ketua/Anggota (3 Orang)	3	ORG	x	2	STEL	x	0	K/K	0	STEL	600.000	-
	Kepala Sekretariat/Koordinator Sekretariat	1	ORG	x	2	STEL	x	1	K/K	2	STEL	600.000	1.200.000
	Staf Teknis PNS	1	ORG	x	2	STEL	x	1	K/K	2	STEL	600.000	1.200.000
	Staf Teknis Non PNS	9	ORG	x	2	STEL				18	STEL	600.000	10.800.000
	Satpam	2	ORG	x	2	STEL				4	STEL	600.000	2.400.000
	Petugas Kebersihan	1	ORG	x	2	STEL				2	STEL	600.000	1.200.000
522111	Belanja Langganan Listrik												48.000.000
	Langganan Listrik	1	PKT	x	12	BLN	x	0	K/K	0	OB	2.500.000	-
	Langganan Listrik Kudus, Pati, Pemalang, Kota Semarang	1	PKT	x	12	BLN	x	1	K/K	12	OB	4.000.000	48.000.000
	Langganan Listrik Demak	1	PKT	x	12	BLN	x	0	K/K	0	OB	5.075.500	-
	Langganan Listrik Kota Tegal	1	PKT	x	12	BLN	x	0	K/K	0	OB	5.900.500	-
	Langganan Listrik Karanganyar	1	PKT	x	12	BLN	x	0	K/K	0	OB	3.500.000	-
522112	Belanja Langganan Telepon												6.000.000
	Langganan Telepon	1	PKT	x	12	BLN	x	1	K/K	12	OB	500.000	6.000.000
	Langganan Telepon Demak	1	PKT	x	12	BLN	x	0	K/K	0	OB	75.000	-
	Langganan Telepon Kota Tegal	1	PKT	x	12	BLN	x	0	K/K	0	OB	100.000	-
522113	Belanja Langganan Air												8.400.000
	Air PAM	1	PKT	x	12	BLN	x	1	K/K	12	OB	700.000	8.400.000
	Air PAM Demak	1	PKT	x	12	BLN	x	0	K/K	0	OB	600.000	-
	Air PAM Karanganyar	1	PKT	x	12	BLN	x	0	K/K	0	OB	350.000	-
522141	Belanja Sewa												-
	Sewa Gedung kantor	1	UNIT	x	1	THN	x	0	K/K	0	UNIT	150.000.000	-
523111	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan												36.450.000
	Pemeliharaan Gedung Kantor	350	m2	x	1	THN	x	1	K/K	350	M2	97.000	33.950.000
	Pemeliharaan Halaman Kantor	250	m2	x	1	THN	x	1	K/K	250	M2	10.000	2.500.000
	Pemeliharaan Halaman Kantor Kendal	2750	m2	x	1	THN	x	0	K/K	0	M2	10.000	-
523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin												107.590.000
	- Kendaraan Operasional/Pejabat												78.010.000
	Kendaraan Dinas Operasional Pinjam Pakai Roda 4	2	UNIT	x	1	THN	x	1	K/K	2	UT	34.880.000	69.760.000
	Kendaraan Dinas Operasional Pinjam Pakai Roda 2	1	UNIT	x	1	THN	x	1	K/K	1	UT	3.950.000	3.950.000
	Pajak Kendaraan Roda 4	2	UNIT	x	1	THN	x	1	K/K	2	UT	2.000.000	4.000.000
	Pajak Kendaraan Roda 2	1	UNIT	x	1	THN	x	1	K/K	1	UT	300.000	300.000
	- Pemeliharaan Inventaris Kantor												29.580.000
	PC/Laptop	13	UNIT	x	1	THN	x	1	K/K	13	UT	730.000	9.490.000
	Printer	10	UNIT	x	1	THN	x	1	K/K	10	UT	690.000	6.900.000
	AC	8	UNIT	x	1	THN	x	1	K/K	8	UT	610.000	4.880.000
	BBM Genset	1	UNIT	x	1	THN	x	1	K/K	1	UT	7.190.000	7.190.000
	Inventaris Kantor	14	Peg	x	1	THN	x	1	K/K	14	UT	80.000	1.120.000
6849.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal												12.602.000
6849.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran												3.020.000
301	Penyusunan rencana kerja dan anggaran Bawaslu Kabupaten/Kota												3.020.000
	A) Rapat Pembahasan Anggaran APBN												3.020.000
521211	Belanja Bahan												1.220.000
	- Penggandaan/Fotocopy	1	KALI	x	1	PAKET	x	1	K/K	1	PAKET	245.000	245.000
	- Belanja ATK	1	KALI	x	1	PAKET	x	1	K/K	1	PAKET	300.000	300.000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ KOMPONEN INPUT/AKUN/ RINCIAN BELANJA	DETAIL										VOL. KEG		BIAYA SATUAN	JUMLAH	
	- Komputer Supply	1	KALI	x	1	PKT	x	1	K/K			1	PAKET	300.000	300.000	
	- Snack	1	KALI	x	25	ORG	x	1	K/K			25	OK	15.000	375.000	
522151	Belanja Jasa Profesi														1.800.000	
	- Narasumber	1	KALI	x	2	JAM	x	1	ORG	x	1	K/K	2	OJ	900.000	1.800.000
6849.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi														1.920.000	
301	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Bawaslu Kabupaten/Kota														1.920.000	
	A) Konsultasi dan Koordinasi Laporan Pelaksanaan Program/Kegiatan dan Anggaran														1.920.000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa														-	
	> KOORDINASI KE PROVINSI														-	
	- Penginapan	1	KALI	x	2	ORG	x	1	HARI	x	0	KK	0	OH	600.000	-
	- Uang Harian	1	KALI	x	2	ORG	x	2	HARI	x	0	KK	0	OH	370.000	-
	- Transport	1	KALI	x	2	ORG	x	0	KK			0	OK	450.000	-	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota														1.920.000	
	> Bawaslu Kota Semarang														1.920.000	
	- Uang Harian	3	KALI	x	2	ORG	x	1	KK			6	OH	170.000	1.020.000	
	- Transport	3	KALI	x	2	ORG	x	1	KK			6	OK	150.000	900.000	
6849.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan														3.450.000	
301	Pengelolaan administrasi keuangan Bawaslu Kabupaten/Kota														3.450.000	
	A) Pengelolaan administrasi keuangan Bawaslu Kabupaten/Kota														3.450.000	
521211	Belanja Bahan														900.000	
	- Konsumsi dan Snack Rapat Biasa	1	KALI	x	20	ORG	x	1	K/K			20	PAKET	45.000	900.000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota														2.550.000	
	- Transport Koordinasi	1	KALI	x	3	ORG	x	5	KALI	x	1	K/K	15	OK	170.000	2.550.000
6849.EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan Bawaslu														4.212.000	
301	Pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan Bawaslu Kabupaten/Kota														4.212.000	
	A) Pengelolaan Kearsipan Bawaslu Kabupaten/Kota														4.212.000	
521211	Belanja Bahan														1.732.000	
	- Belanja ATK	1	KALI	x	1	PAKET	x	1	K/K			1	PAKET	271.000	271.000	
	- Komputer Supply	1	KALI	x	1	PAKET	x	1	K/K			1	PAKET	271.000	271.000	
	- Konsumsi dan Snack Rapat Biasa	1	KALI	x	17	ORG	x	1	K/K			17	PAKET	70.000	1.190.000	
522151	Belanja Jasa Profesi														1.800.000	
	- Narasumber	1	KALI	x	2	JAM	x	1	ORG	x	1	K/K	2	OJ	900.000	1.800.000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota														680.000	
	- Transport	2	KALI	x	2	ORG	x	1	K/K			4	OK	170.000	680.000	
6850	PENGLOLAAN ORGANISASI DAN SDM														22.390.000	
6850.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal														17.280.000	
6850.EBA.957	Layanan Hukum														9.080.000	
301	Fasilitasi pengelolaan layanan hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota														4.800.000	
	A) Rapat pengelolaan layanan hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota														4.800.000	
521211	Belanja Bahan														3.000.000	
	- Penggandaan/Fotocopy	1	KALI	x	1	PAKET	x	1	K/K			1	PKT	300.000	300.000	
	- Belanja ATK	1	KALI	x	1	PAKET	x	1	K/K			1	PKT	250.000	250.000	
	- Komputer Supply	1	KALI	x	1	PAKET	x	1	K/K			1	PKT	350.000	350.000	
	- Konsumsi dan Snack	1	KALI	x	30	ORG	x	1	K/K			30	OK	70.000	2.100.000	
522151	Belanja Jasa Profesi														1.800.000	
	- Narasumber	1	KALI	x	2	JAM	x	1	ORG	x	1	K/K	2	OJ	900.000	1.800.000
302	Kajian hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota														4.280.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ KOMPONEN INPUT/AKUN/ RINCIAN BELANJA	DETAIL	VOL. KEG	BIAYA SATUAN	JUMLAH
	A) Rapat Identifikasi Permasalahan Perbawaslu/Produk Hukum Non Perbawaslu				4.280.000
521211	Belanja Bahan				2.480.000
	- Penggandaan/Fotocopy	1 KALI x 1 PAKET x 1 K/K	1 PKT	300.000	300.000
	- Belanja ATK	1 KALI x 1 PAKET x 1 K/K	1 PKT	430.172	430.000
	- Komputer Supply	1 KALI x 1 PAKET x 1 K/K	1 PKT	350.000	350.000
	- Konsumsi dan Snack	1 KALI x 20 ORG x 1 K/K	20 OK	70.000	1.400.000
522151	Belanja Jasa Profesi				1.800.000
	- Narasumber	1 KALI x 2 JAM x 1 ORG x 1 K/K	2 OJ	900.000	1.800.000
6850.EBA.962	Layanan Umum				3.200.000
301	Fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu Kabupaten/Kota				3.200.000
	A) Fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu Kabupaten/Kota				3.200.000
521211	Belanja Bahan				1.400.000
	> Rapat Biasa				
	- Konsumsi dan snack	1 KALI x 20 ORG x 1 K/K	20 OK	70.000	1.400.000
522151	Belanja Jasa Profesi				1.800.000
	- Narasumber	1 KALI x 2 JAM x 1 ORG x 1 K/K	2 OJ	900.000	1.800.000
6850.EBA.969	Layanan Bantuan Hukum				5.000.000
301	Bantuan Hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota				5.000.000
	A) Jasa Konsultan (Advokat)				5.000.000
522151	Belanja Jasa Profesi				5.000.000
	- Jasa Konsultan Advokat	1 KALI x 1 PAKET x 1 K/K	1 PKT	5.000.000	5.000.000
6850.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal				5.110.000
6850.EBC.954	Layanan Manajemen SDM				5.110.000
301	Manajemen SDM pengawas dan kesekretariatan Bawaslu Kabupaten/Kota				5.110.000
	A) Peningkatan Kapasitas dan SDM Bawaslu Kabupaten/Kota				3.200.000
521211	Belanja Bahan				1.400.000
	> Rapat Biasa				
	- Konsumsi	1 KALI x 20 ORG x 1 K/K	20 OK	70.000	1.400.000
522151	Belanja Jasa Profesi				1.800.000
	- Narasumber	1 KALI x 2 JAM x 1 ORG x 1 K/K	2 OJ	900.000	1.800.000
	B) Pembinaan Kode Etik bagi Pengawas Ad-hoc				1.910.000
521211	Belanja Bahan				1.400.000
	> RAPAT BIASA				
	- Konsumsi	1 KALI x 20 Orang x 1 K/K	20 OK	70.000	1.400.000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				510.000
	- Transport Koordinasi	1 KALI x 3 ORG x 1 KALI x 1 K/K	3 OK	170.000	510.000
TOTAL ANGGARAN 2024					15.899.373.000

Semarang, Juni 2024
Pit. KEPALA SEKRETARIAT,

ttd.

Tri Adiyanto Baay, S.STP., M.Ec.Dev.

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/ LEMBAGA
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN ANGGARAN 2024**

Revisi ke-5

13,737,726,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ KOMPONEN INPUT/AKUN/ RINCIAN BELANJA	JUMLAH
1	2	6 = 4 * 5
115.CQ	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI	12,193,282,000
5245	TEKNIS PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PEMILU OLEH BAWASLU PROVINSI DAN BAWASLU KABUPATEN	106,003,000
5245.BAH	Pelayanan Publik Lainnya	41,276,000
5245.BAH.001	Layanan Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten	41,276,000
301	Koordinasi Penanganan Pelanggaran (Kabupaten/Kota)	3,580,000
A)	Koordinasi Penanganan Pelanggaran	3,580,000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3,580,000
	- Penginapan Eselon III	600,000
	- Penginapan Staf	600,000
	- Uang Harian Eselon III	740,000
	- Uang Harian Staf	740,000
	- Transport Eselon III	450,000
	- Transport Staf	450,000
302	Koordinasi Penyelesaian Sengketa Proses	37,696,000
A)	Supervisi Penyelesaian Sengketa Antar Peserta Pemilu (PSAP) ke Kecamatan	3,840,000
524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,840,000
	- Uang Harian	1,800,000
	- Transport	2,040,000
B)	Koordinasi Evaluasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Tahun 2024	4,004,000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4,004,000
	- Penginapan Eselon III	1,024,000
	- Penginapan	600,000
	- Uang Harian	1,480,000
	- Transport	900,000
C)	Koordinasi Wilayah Penyusunan Laporan Akhir Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu 2024	4,004,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ KOMPONEN INPUT/AKUN/ RINCIAN BELANJA	JUMLAH
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4,004,000
	- Penginapan Eselon III	1,024,000
	- Penginapan	600,000
	- Uang Harian	1,480,000
	- Transport	900,000
	D) Koordinasi Wilayah Penyusunan Buku Inovasi Penyelesaian Sengketa Proses	4,004,000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4,004,000
	- Penginapan Eselon III	1,024,000
	- Penginapan	600,000
	- Uang Harian	1,480,000
	- Transport	900,000
	E) Penyusunan Buku Evaluasi Penyelesaian Sengketa Proses	8,186,000
521211	Belanja Bahan	6,386,000
	> Rapat di Kantor	
	- Penggandaan/Fotocopy	750,000
	- Belanja ATK	586,000
	- Komputer Supply	500,000
	- Konsumsi dan Snack	1,050,000
	- Percetakan Buku	3,500,000
522151	Belanja Jasa Profesi	1,800,000
	- Narasumber	1,800,000
	F) Rapat Kerja Teknis Penyelesaian Sengketa Antar Peserta Pemilu dengan Panwaslu Kecamatan dan Stakeholder	8,538,000
521211	Belanja Bahan	3,338,000
	> Rapat di Kantor	
	- Penggandaan/Fotocopy	750,000
	- Belanja ATK	688,000
	- Komputer Supply	500,000
	- Konsumsi dan Snack	1,400,000
522151	Belanja Jasa Profesi	1,800,000
	- Narasumber	1,800,000
524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,400,000
	- Transport	3,400,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ KOMPONEN INPUT/AKUN/ RINCIAN BELANJA	JUMLAH
G)	Supervisi dan Monitoring Sengketa Proses Pemilu	5,120,000
524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	5,120,000
	- Uang Harian	2,400,000
	- Transport	2,720,000
5245.BKC	Pemantauan Lembaga	64,727,000
5245.BKC.001	Laporan Hasil Pencegahan/ Pengawasan Pemilu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	64,727,000
301	Pengawasan pemilu partisipatif (Kab/Kota)	32,800,000
A)	Sosialisasi Masyarakat Pinggiran/ Marginal di Bawaslu Kabupaten/Kota	22,400,000
521211	Belanja Bahan	8,400,000
	- Konsumsi dan Snack	8,400,000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	14,000,000
	- Transport peserta dan panitia	14,000,000
B)	Bawaslu Goes to School / Campus	10,400,000
521211	Belanja Bahan	8,400,000
	- Konsumsi dan Snack	8,400,000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,000,000
	- Transport Panitia	2,000,000
302	Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan Bawaslu Kabupaten/Kota	17,610,000
A)	Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan (Kab./Kota)	17,610,000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	17,610,000
	> KOORDINASI KE PUSAT/LUAR PROVINSI	14,030,000
	- Transport Provinsi - Jakarta/Luar Daerah	6,546,000
	- Taxi	1,384,000
	- Penginapan	2,920,000
	- Uang Harian	3,180,000
	> KOORDINASI KE PROVINSI	3,580,000
	- Penginapan	1,200,000
	- Uang Harian	1,480,000
	- Transport	900,000
	> BAWASLU KOTA SEMARANG	-
	- Penginapan	-
	- Uang Harian	-

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ KOMPONEN INPUT/AKUN/ RINCIAN BELANJA	JUMLAH
	- Transport	-
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	-
	> Bawaslu Kota Semarang	-
	- Uang Harian	-
	- Transport	-
303	Evaluasi pelaksanaan pengawasan (Kab./Kota)	4,800,000
	A) Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Pemilu Partisipatif	4,800,000
521211	Belanja Bahan	3,400,000
	- Belanja ATK	600,000
	- Konsumsi dan Snack	2,800,000
524113	Transport Peserta	1,400,000
	Transport Peserta Luar	1,400,000
304	Pemutakhiran data pemilih tetap berkelanjutan (Kab./Kota)	4,100,000
	A) Rapat Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten/Kota	4,100,000
521211	Belanja Bahan	4,100,000
	- Penggandaan/Fotocopy	600,000
	- ATK	800,000
	- Komputer Supply	600,000
	- Konsumsi dan Snack	2,100,000
305	Fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas	5,417,000
	A) Fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas (Kab./Kota)	5,417,000
521211	Belanja Bahan	3,417,000
	- Penggandaan/Fotocopy	417,000
	- Belanja ATK	400,000
	- Komputer Supply	500,000
	- Konsumsi dan snack	2,100,000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,000,000
	- Uang Transport Pihak Luar	2,000,000
6661	PERENCANAAN, PROGRAM DAN ANGGARAN SERTA PENYUSUNAN PERATURAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILU	3,691,590,000
6661.QIC	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	3,691,590,000
6661.QIC.001	Fasilitasi dan Pembinaan Perencanaan, Program dan Anggaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu	2,292,482,000
301	Perencanaan program dan anggaran pengawasan penyelenggaraan pemilu (Kab./Kota)	158,356,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ KOMPONEN INPUT/AKUN/ RINCIAN BELANJA	JUMLAH
A)	Rapat Pembahasan Perencanaan program dan anggaran pengawasan penyelenggaraan pemilu	36,316,000
521211	Belanja Bahan	1,392,000
	- Penggandaan/Fotocopy	367,000
	- Belanja ATK	350,000
	- Komputer Supply	300,000
	- Snack (Rapat Persiapan)	375,000
522151	Belanja Jasa Profesi	1,800,000
	- Narasumber	1,800,000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	17,324,000
	> KOORDINASI KE PROVINSI	
	- Penginapan Eselon III	4,804,000
	- Penginapan	3,000,000
	- Uang Harian	5,920,000
	- Transport	3,600,000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	15,800,000
	- Paket Rapat Halfday Panitia, Narasumber Es III, Moderator	2,000,000
	- Paket Rapat Halfday Peserta	6,000,000
	- Uang Harian Halfday Panitia	950,000
	- Uang Harian Halfday Peserta	2,850,000
	- Uang Transport	4,000,000
B)	Pelaporan Keuangan ke Bawaslu Provinsi	64,440,000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	64,440,000
	> Pelaporan Keuangan ke Bawaslu Provinsi	64,440,000
	- Penginapan	21,600,000
	- Uang Harian	26,640,000
	- Transport	16,200,000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	-
	> Bawaslu Kota Semarang	-
	- Transport	-
	- Uang Harian Lebih dari 8 Jam	-
C)	Supervisi Keuangan ke Kecamatan	57,600,000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	57,600,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ KOMPONEN INPUT/AKUN/ RINCIAN BELANJA	JUMLAH
	> Perjadiin Dalam Kota	57,600,000
	- Transport	30,600,000
	- Uang Harian Lebih dari 8 Jam	27,000,000
302	Sosialisasi dan implementasi peraturan dan non peraturan Bawaslu (Kab./Kota)	33,025,000
A)	Sosialisasi Peraturan Bawaslu dan Produk Hukum Non Perbawaslu	28,025,000
	> Rapat Fullday dalam kota	
521211	Belanja Bahan	1,500,000
	- Penggandaan/Fotocopy	300,000
	- Belanja ATK	300,000
	- Komputer Supply	300,000
	- Spanduk	600,000
522151	Belanja Jasa Profesi	3,600,000
	- Narasumber Eselon III	3,600,000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	22,925,000
	- Paket Rapat Fullday	12,000,000
	- Uang Harian Fullday Peserta	4,750,000
	- Uang Harian Fullday Panitia	475,000
	- Uang Transport Peserta	5,000,000
	- Uang Transport Panitia	500,000
	- Uang Transport Narasumber	200,000
B)	Rapat Penyusunan Kajian Hukum Perbawaslu/Produk Hukum Non Perbawaslu	5,000,000
521211	Belanja Bahan	3,000,000
	- Penggandaan/Fotocopy	300,000
	- Belanja ATK	250,000
	- Komputer Supply	350,000
	- Konsumsi dan Snack	2,100,000
522151	Belanja Jasa Profesi	2,000,000
	- Narasumber	2,000,000
303	Fasilitasi dan pembinaan aparatur pengawas pemilu (Kab./Kota)	472,237,000
A)	Fasilitasi pembinaan aparatur administrasi dan konsolidasi sekretariat	29,745,000
521211	Belanja Bahan	1,200,000
	- Penggandaan/Fotocopy	300,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ KOMPONEN INPUT/AKUN/ RINCIAN BELANJA	JUMLAH
	- Spanduk	300,000
	- Belanja ATK	300,000
	- Komputer Supply	300,000
522151	Belanja Jasa Profesi	3,600,000
	- Narasumber Eselon III	3,600,000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	850,000
	> Supervisi, Monitoring dan Evaluasi	850,000
	- Supervisi/ Monev ke Kecamatan	850,000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	24,095,000
	- Paket Rapat Halfday Panitia, Narasumber Es III, Moderator	2,000,000
	- Paket Rapat Halfday Peserta	10,200,000
	- Uang Harian Halfday Panitia	950,000
	- Uang Harian Halfday Peserta	4,845,000
	- Uang Transport	6,100,000
	B) Koordinasi pembentukan pengawas Ad-hoc	32,045,000
521211	Belanja Bahan	2,650,000
	- Konsumsi dan Snack	1,750,000
	- Penggandaan/Fotocopy	300,000
	- Belanja ATK	300,000
	- Komputer Supply	300,000
522151	Belanja Jasa Profesi	3,600,000
	- Narasumber Eselon III	3,600,000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,700,000
	> Supervisi, Monitoring dan Evaluasi	1,700,000
	- Supervisi/ Monev ke Kecamatan	1,700,000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	24,095,000
	- Paket Rapat Halfday Panitia, Narasumber Es III, Moderator	2,000,000
	- Paket Rapat Halfday Peserta	10,200,000
	- Uang Harian Halfday Panitia	950,000
	- Uang Harian Halfday Peserta	4,845,000
	- Uang Transport	6,100,000
	C) Bimtek pengelolaan administrasi kesekretariatan (Keuangan dan Kearsipan)	57,884,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ KOMPONEN INPUT/AKUN/ RINCIAN BELANJA	JUMLAH
521211	Belanja Bahan	2,494,000
	- Penggandaan/Fotocopy	694,000
	- Spanduk	600,000
	- Belanja ATK	600,000
	- Komputer Supply	600,000
522151	Belanja Jasa Profesi	7,200,000
	- Narasumber Eselon III	7,200,000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	48,190,000
	- Paket Rapat Halfday Panitia, Narasumber Es III, Moderator	4,000,000
	- Paket Rapat Halfday Peserta	20,400,000
	- Uang Harian Halfday Panitia	1,900,000
	- Uang Harian Halfday Peserta	9,690,000
	- Uang Transport	12,200,000
	D) Peningkatan Soliditas SDM Bawaslu Kabupaten/Kota	39,120,000
521211	Belanja Bahan	1,380,000
	- Penggandaan/Fotocopy	380,000
	- Belanja ATK	400,000
	- Komputer Supply	400,000
	- Spanduk	200,000
522151	Belanja Jasa Profesi	5,400,000
	- Narasumber	5,400,000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	32,340,000
	- Paket Rapat Fullboard Narasumber dan Peserta	19,440,000
	- Uang Harian Fullboard Peserta	7,800,000
	- Uang Transport	5,100,000
	E) Peningkatan Kapasitas dan Soliditas Bawaslu Kab/Kota dan Panwaslu Kecamatan Pemilu/Pemilihan	60,500,000
521211	Belanja Bahan	1,200,000
	- Penggandaan/Fotocopy	300,000
	- Belanja ATK	300,000
	- Komputer Supply	300,000
	- Spanduk	300,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ KOMPONEN INPUT/AKUN/ RINCIAN BELANJA	JUMLAH
522151	Belanja Jasa Profesi	3,600,000
	- Narasumber	3,600,000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	55,700,000
	- Paket Rapat Fullboard Panitia, Narasumber Es III, Moderator	10,000,000
	- Paket Rapat Fullboard Peserta	25,500,000
	- Uang Harian Fullboard Panitia	3,600,000
	- Uang Harian Fullboard Peserta	10,200,000
	- Uang Transport Panitia	1,300,000
	- Uang Transport Peserta	5,100,000
	F) Penerbitan Buku SDM Hasil Pengolahan Basis Data Pengawas Ad Hoc Pemilu 2024 di seluruh kab/kota se-Jawa	39,000,000
521211	Belanja Bahan	22,500,000
	> Rapat di Kantor	
	- Penggandaan/Fotocopy	300,000
	- Belanja ATK	300,000
	- Komputer Supply	300,000
	- Konsumsi dan Snack	2,800,000
	- Pencetakan Buku Panduan	15,000,000
	> Launching dan Bedah Buku	
	- Spanduk	300,000
	- Konsumsi dan Snack	3,500,000
522151	Belanja Jasa Profesi	16,500,000
	- Narasumber Penyusunan Buku	10,800,000
	- Narasumber Launching Buku	3,600,000
	- Moderator	2,100,000
	G) Sosialisasi Keberadaan SDM Pengawas TPS pada Pemilu 2024	7,200,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	4,000,000
	- Talkshow di Radio (Blocking Time)	4,000,000
522151	Belanja Jasa Profesi	3,200,000
	- Narasumber	1,800,000
	- Moderator	1,400,000
	H) Rapat Evaluasi SDM Pengawas Pemilu 2024 Bersama Panwaslu Kecamatan	92,080,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ KOMPONEN INPUT/AKUN/ RINCIAN BELANJA	JUMLAH
521211	Belanja Bahan	800,000
	- Penggandaan/Fotocopy	200,000
	- Belanja ATK	200,000
	- Komputer Supply	200,000
	- Spanduk	200,000
522151	Belanja Jasa Profesi	3,600,000
	- Narasumber	3,600,000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	82,900,000
	- Paket Rapat Fullboard Panitia, Narasumber Es III, Moderator	10,000,000
	- Paket Rapat Fullboard Peserta	42,500,000
	- Uang Harian Fullboard Panitia	3,600,000
	- Uang Harian Fullboard Peserta	17,000,000
	- Uang Transport Panitia	1,300,000
	- Uang Transport Peserta	8,500,000
524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	2,740,000
	> Undangan/Konsultasi ke Provinsi	
	- Penginapan	1,200,000
	- Uang Harian	740,000
	- Transport	800,000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,040,000
	- Transport	2,040,000
I)	Bantuan Penambah Daya Tahan Tubuh Masa Penghitungan dan Rekapitulasi Suara	90,117,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	90,117,000
	Penambah Daya Tahan Tubuh Kabupaten/Kota	7,125,000
	Penambah Daya Tahan Tubuh Kecamatan	42,636,000
	Penambah Daya Tahan Tubuh Kelurahan/Desa	40,356,000
	Penambah Daya Tahan Tubuh PTPS PSS Demak	-
	Penambah Daya Tahan Tubuh PTPS PSU Salatiga	-
	Penambah Daya Tahan Tubuh PTPS PSU Boyolali	-
	Penambah Daya Tahan Tubuh PTPS PSU Kab.Magelang	-
J)	Rapat Evaluasi Pengawas Pemilu Kecamatan Bawaslu Kabupaten/Kota	24,546,000
521211	Belanja Bahan	13,176,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ KOMPONEN INPUT/AKUN/ RINCIAN BELANJA	JUMLAH
	- Penggandaan/Fotocopy/Spanduk	2,000,000
	- Belanja ATK	2,000,000
	- Komputer Supply	4,000,000
	- Konsumsi dan Snack Rapat	4,200,000
	>> Tes Tertulis	
	- Snack Panitia	160,000
	- Snack Peserta	816,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	1,000,000
	>> Pengumuman Hasil Evaluasi	
	- Pengumuman Hasil Evaluasi di Media Cetak/elektronik/online	1,000,000
522141	Belanja Sewa	5,000,000
	>> Sewa Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan	
	- Tes Tertulis	5,000,000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5,370,000
	> Konsultasi ke Bawaslu Provinsi	
	- Penginapan	1,800,000
	- Uang Harian	2,220,000
	- Transport	1,350,000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0
	> Konsultasi ke Bawaslu Provinsi	
	- Perjalanan Dinas Dalam Kota	0
304	Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif (Kab/Kota)	27,360,000
A)	Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif	27,360,000
521211	Belanja Bahan	1,200,000
	- Penggandaan/Fotocopy	300,000
	- Spanduk	300,000
	- ATK	300,000
	- Komputer Supply	300,000
522151	Belanja Jasa Profesi	2,500,000
	- Narasumber Eselon III (Eksternal)	1,800,000
	- Moderator (Eksternal)	700,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ KOMPONEN INPUT/AKUN/ RINCIAN BELANJA	JUMLAH
524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	23,660,000
	- Paket Rapat Halfday Panitia, Narasumber Es III, Moderator	2,460,000
	- Paket Rapat Halfday Peserta	10,250,000
	- Uang Harian Halfday Peserta	4,750,000
	- Uang Transport	6,200,000
305	Fasilitasi dan Pembinaan Penanganan Pelanggaran (Kabupaten/Kota)	475,088,000
	A) Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu	316,700,000
521211	Belanja Bahan	21,000,000
	- Konsumsi dan Snack	21,000,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	16,200,000
	Pemeliharaan Kendaraan Operasional	16,200,000
521213	Honor Output Kegiatan	279,500,000
	> Honorarium Pokja Gakkumdu	
	- Penasihat	48,000,000
	- Pembina	43,500,000
	- Koordinator	36,000,000
	- Anggota	152,000,000
	B) Supervisi Pendampingan dan Pembinaan Penanganan Pelanggaran ke Kecamatan	8,640,000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8,640,000
	- Uang Harian	4,050,000
	- Transport	4,590,000
	C) Rapat Koordinasi Penanganan Pelanggaran	12,900,000
521211	Belanja Bahan	12,900,000
	- Penggandaan/Fotocopy	1,500,000
	- Belanja ATK	1,500,000
	- Komputer Supply	1,500,000
	- Konsumsi dan Snack	8,400,000
	D) Koordinasi Penanganan Pelanggaran	3,580,000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3,580,000
	- Penginapan Eselon III	600,000
	- Penginapan Staf	600,000
	- Uang Harian Eselon III	740,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ KOMPONEN INPUT/AKUN/ RINCIAN BELANJA	JUMLAH
	- Uang Harian Staf	740,000
	- Transport Eselon III	450,000
	- Transport Staf	450,000
	E) Piket Gakkumdu	93,000,000
521211	Belanja Bahan	8,000,000
	- Snack	8,000,000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	85,000,000
	- Uang Transport	85,000,000
	F) Saksi Ahli	32,400,000
522151	Belanja Jasa Profesi	32,400,000
	- Saksi Ahli	0
	- Saksi Ahli Kabupaten Karanganyar	32,400,000
	- Saksi Ahli Kabupaten Purworejo	0
	G) Koordinasi Penanganan Pelanggaran Pemilu	7,868,000
	>> Validasi Data Penanganan Pelanggaran Persiapan PHPU Pemilu	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3,934,000
	- Penginapan Eselon III	954,000
	- Penginapan	600,000
	- Uang Harian	1,480,000
	- Transport	900,000
	>> Teknik Penyusunan Putusan Pelanggaran Administratif Pemilu	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3,934,000
	- Penginapan Eselon III	954,000
	- Penginapan	600,000
	- Uang Harian	1,480,000
	- Transport	900,000
306	Fasilitasi dan pembinaan penyelesaian sengketa	11,942,000
	A) Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	8,008,000
	> <i>Konsultasi/Laporan Penyelesaian Sengketa ke Provinsi</i>	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	8,008,000
	- Penginapan Eselon III	2,048,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ KOMPONEN INPUT/AKUN/ RINCIAN BELANJA	JUMLAH
	- Penginapan	1,200,000
	- Uang Harian	2,960,000
	- Transport	1,800,000
	B) Konsolidasi Data Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Tahun 2024	3,934,000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3,934,000
	- Penginapan Eselon III	954,000
	- Penginapan	600,000
	- Uang Harian	1,480,000
	- Transport	900,000
307	Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan (Kab/Kota)	760,542,000
	A) Fasilitasi, Koordinasi dan Pelaporan Bawaslu Kabupaten/Kota	760,542,000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	170,010,000
	> KOORDINASI KE PUSAT/LUAR PROVINSI	89,460,000
	- Transport Provinsi - Jakarta/Luar Daerah	32,730,000
	- Taxi	10,380,000
	- Penginapan	22,500,000
	- Uang Harian	23,850,000
	> KOORDINASI KE PROVINSI	80,550,000
	- Penginapan	27,000,000
	- Uang Harian	33,300,000
	- Transport	20,250,000
	> BAWASLU KOTA SEMARANG	-
	- Penginapan	-
	- Uang Harian	-
	- Transport	-
524119	Belanja Perjalanan Paket Meeting Luar Kota	590,532,000
	> KOORDINASI KE PUSAT/LUAR PROVINSI	375,732,000
	- Transport Provinsi - Jakarta/Luar Daerah	137,466,000
	- Taxi	43,596,000
	- Penginapan	94,500,000
	- Uang Harian	100,170,000
	> KOORDINASI KE PROVINSI	214,800,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ KOMPONEN INPUT/AKUN/ RINCIAN BELANJA	JUMLAH
	- Penginapan	72,000,000
	- Uang Harian	88,800,000
	- Transport	54,000,000
	> BAWASLU KOTA SEMARANG	-
	- Penginapan	-
	- Uang Harian	-
	- Transport	-
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	-
	> Bawaslu Kota Semarang	-
	- Uang Harian	-
	- Transport	-
308	Fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu (Kab./Kota)	31,442,000
A)	Konsolidasi Kebijakan Bawaslu Kab/Kota dan Panwascam	31,442,000
521211	Belanja Bahan	1,097,000
	- Penggandaan/Fotocopy	297,000
	- Spanduk	200,000
	- Belanja ATK	300,000
	- Komputer Supply	300,000
522151	Belanja Jasa Profesi	3,600,000
	- Narasumber Eselon III	3,600,000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,700,000
	> Supervisi, Monitoring dan Evaluasi	1,700,000
	- Supervisi/ Investigasi/ Monev ke Desa/ Kelurahan	1,700,000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	25,045,000
	- Paket Rapat Halfday Panitia, Narasumber Es III, Moderator	2,000,000
	- Paket Rapat Halfday Peserta	10,200,000
	- Uang Harian Halfday Panitia	1,900,000
	- Uang Harian Halfday Peserta	4,845,000
	- Uang Transport	6,100,000
401	Fasilitasi dan pembinaan aparatur pengawas pemilu (Kecamatan)	98,090,000
A)	Fasilitasi pembinaan aparatur administrasi dan konsolidasi sekretariat dan Komisioner Panwascam dan	29,995,000
521211	Belanja Bahan	29,995,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ KOMPONEN INPUT/AKUN/ RINCIAN BELANJA	JUMLAH
	- Penggandaan/Fotocopy	5,100,000
	- Spanduk	2,550,000
	- ATK	5,100,000
	- Komputer Supply	5,100,000
	- Konsumsi rapat (panitia)	5,950,000
	- Konsumsi rapat (D/K)	6,195,000
	B) Bimtek teknis pengawasan	68,095,000
521211	Belanja Bahan	24,895,000
	- Pelatihan/Bimtek Pengawas Pemilu (Desa/Kelurahan)	24,895,000
	ATK & Komputer Supply	5,100,000
	Konsumsi rapat (panitia)	5,950,000
	Konsumsi rapat (D/K)	6,195,000
	Spanduk	2,550,000
	Fotocopy/penggandaan	5,100,000
	Modul	-
522141	Belanja Sewa	12,750,000
	- Pelatihan/Bimtek Pengawas Pemilu (Desa/Kelurahan)	12,750,000
	Sewa ruang rapat	12,750,000
524113	Perjalanan Dinas Dalam Kota	30,450,000
	- Pelatihan/Bimtek Pengawas Pemilu (Desa/Kelurahan)	
	Transport rapat (panitia)	12,750,000
	Transport rapat (D/K)	17,700,000
402	Fasilitas, koordinasi, dan pelaporan (Kecamatan)	224,400,000
	A) Fasilitas, Koordinasi, Pelaporan dan Pengawasan Tahapan Pemilu (Kecamatan)	
524113	Perjalanan Dinas Dalam Kota	224,400,000
	Konsultasi/ Undangan ke Kab/Kota	112,200,000
	Konsultasi/ Undangan ke Kab/Kota (Karimun Jawa dan Kampung Laut)	-
	Supervisi/ Investigasi/ Monev ke Desa/ Kelurahan	112,200,000
	Supervisi/ Investigasi/ Monev ke Desa/ Kelurahan (Karimun Jawa)	-
6661.QIC.003	Seleksi Anggota Badan Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilu Ad-Hoc	1,399,108,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ KOMPONEN INPUT/AKUN/ RINCIAN BELANJA	JUMLAH
402	Rekrutmen Pengawas TPS (Kecamatan)	1,399,108,000
A)	Rekrutmen Pengawas TPS (Kecamatan)	998,523,000
521211	Belanja Bahan	496,283,000
	> PERSIAPAN PELAKSANAAN	
		-
	- ATK dan Komputer Supply	5,100,000
	- Penggandaan	17,000,000
	> Rapat Persiapan dan Pelaksanaan	
	- Konsumsi	11,900,000
	> TES WAWANCARA	
	- Konsumsi Panitia	26,775,000
	> PELANTIKAN DAN PEMBEKALAN	
	- ATK dan Komputer Supply	3,400,000
	- Spanduk	5,100,000
	- Konsumsi dan Snack Panitia	17,408,000
	- Konsumsi dan Snack PTPS	409,600,000
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	27,200,000
	> PELANTIKAN DAN PEMBEKALAN	
	- Rohaniwan	27,200,000
522141	Belanja Sewa	85,000,000
	> TES WAWANCARA	
	- Sewa Ruangan	17,000,000
	> PELANTIKAN DAN PEMBEKALAN	
	- Sewa Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan	68,000,000
522151	Belanja Jasa Profesi	30,600,000
	> NARASUMBER PELANTIKAN DAN PEMBEKALAN	
	- Narasumber Eselon III ke bawah/disetarakan	30,600,000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	359,440,000
	> PELANTIKAN DAN PEMBEKALAN	
	- Uang Harian (Panitia)	25,840,000
	- Transport (Panitia dan PTPS)	333,600,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ KOMPONEN INPUT/AKUN/ RINCIAN BELANJA	JUMLAH
B)	Pelantikan PAW Panwaslu Kecamatan	2,425,000
521211	Belanja Bahan	825,000
	> PELANTIKAN DAN PEMBEKALAN	
	- Spanduk	300,000
	- Konsumsi dan Snack	525,000
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	1,600,000
	> PELANTIKAN DAN PEMBEKALAN	
	- Rohaniwan	1,600,000
C)	Pembekalan Pengawas TPS (Kecamatan)	398,160,000
521211	Belanja Bahan	136,840,000
	> Pembekalan	
	- ATK dan Komputer Supply	1,700,000
	- Spanduk	1,700,000
	- Konsumsi dan Snack Panitia Panwascam	5,440,000
	- Konsumsi dan Snack PTPS	128,000,000
522141	Belanja Sewa	51,000,000
	> Pembekalan	
	- Sewa Ruangan	17,000,000
	- Sewa Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan	34,000,000
522151	Belanja Jasa Profesi	30,600,000
	> NARASUMBER PEMBEKALAN	
	- Narasumber Eselon III ke bawah/disetarakan	30,600,000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	179,720,000
	> PEMBEKALAN	
	- Uang Harian (Panitia)	12,920,000
	- Transport (Panitia dan Peserta)	166,800,000
6838	PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILU OLEH LEMBAGA AD-HOC	5,618,524,000
6838.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	5,618,524,000
6838.QIC.001	Honorarium Pengawas Ad-Hoc	5,123,704,000
401	Honorarium (Kecamatan)	1,144,904,000
A)	Honorarium Panwaslu	408,000,000
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ KOMPONEN INPUT/AKUN/ RINCIAN BELANJA	JUMLAH
	Ketua	149,600,000
	Anggota	258,400,000
B)	Honorarium Kesekretariatan	669,800,000
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	
	Kepala sekretariat	105,400,000
	Pelaksana PNS	122,400,000
	Pelaksana Non PNS	306,000,000
	Tenaga pendukung (Satpam/ Pramukbakti)	136,000,000
C)	Honorarium Korsek dan Staf PNS (Kab/Kota)	67,104,000
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	
	Honorarium Korsek	40,224,000
	Honorarium Staf PNS Non Organik	26,880,000
D)	Honorarium Panwaslu Bawaslu Kota Pekalongan (Tunggakan)	-
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	
	Ketua (Kota Pekalongan)	-
	Anggota (Kota Pekalongan)	-
E)	Honorarium Kesekretariatan Bawaslu Kota Pekalongan (Tunggakan)	-
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	
	Kepala sekretariat (Kota Pekalongan)	-
	Pelaksana PNS (Kota Pekalongan)	-
	Pelaksana Non PNS (Kota Pekalongan)	-
	Tenaga pendukung (Satpam/ Pramukbakti) (Kota Pekalongan)	-
501	Honorarium Panwaslu	778,800,000
A)	Honorarium Panwaslu	778,800,000
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	
	PPD/K	778,800,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ KOMPONEN INPUT/AKUN/ RINCIAN BELANJA	JUMLAH
	<i>B) Honorarium Panwaslu Bawaslu Kota Pekalongan (Tunggakan)</i>	-
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	
	PPD/K (Kota Pekalongan)	-
601	Honorarium TPS	3,200,000,000
	<i>A) Honorarium PTPS</i>	3,200,000,000
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	
	PTPS	3,200,000,000
6838.QIC.002	Operasional Pengawas Ad-Hoc	494,820,000
301	Sewa kendaraan operasional (Kab/Kota)	97,200,000
	<i>A) tanpa sub komponen</i>	97,200,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	97,200,000
	Pemeliharaan Kendaraan Operasional	97,200,000
	Pemeliharaan Kendaraan Operasional	-
302	Sewa gedung/ peralatan/ meubelair (Kab/Kota)	24,000,000
	<i>A) tanpa sub komponen</i>	24,000,000
	Sewa gedung gakkumdu	16,000,000
	Sewa peralatan gakkumdu	4,000,000
	Sewa meubelair gakkumdu	4,000,000
402	Sewa gedung/ peralatan/ meubelair (Kecamatan)	144,000,000
	<i>A) tanpa sub komponen</i>	144,000,000
	Sewa gedung	8,000,000
	Sewa peralatan	68,000,000
	Sewa meubelair	68,000,000
403	Pemeliharaan gedung/ meubelair/ peralatan (Kecamatan)	51,000,000
	<i>A) tanpa sub komponen</i>	51,000,000
523111	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	51,000,000
	Pemeliharaan gedung kantor	51,000,000
404	Pelayanan operasional perkantoran (Kecamatan)	178,620,000
	<i>A) tanpa sub komponen</i>	178,620,000
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	20,400,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ KOMPONEN INPUT/AKUN/ RINCIAN BELANJA	JUMLAH
	Keperluan Sehari-hari	20,400,000
521211	Belanja Bahan	123,420,000
	Alat Tulis Kantor	20,400,000
	Komputer Supply	20,400,000
	Snack rapat biasa	36,720,000
	Jamuan tamu	15,300,000
	Fotocopy/penggandaan	20,400,000
	Fotocopy/penggandaan form A/AKP/berkas Siwaslu	5,100,000
	Papan Nama Kantor Kecamatan	5,100,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	34,800,000
	Langganan Listrik	-
	Langganan Telepon/Faximile	-
	Langganan Air	800,000
	Langganan Internet	34,000,000
6843	PENGAWASAN MASA KAMPANYE PEMILU	269,379,000
6843.QCE	Penanganan Perkara	14,724,000
6843.QCE.001	Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Masa Kampanye	14,724,000
301	Pengelolaan data penanganan pelanggaran masa kampanye (Kab./Kota)	2,380,000
A)	Validasi Data Penanganan Pelanggaran Masa Kampanye	2,380,000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,380,000
	- Uang Transport	2,380,000
302	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran masa kampanye (Kab./Kota)	5,960,000
A)	Pemetaan Potensi Pelanggaran Tahapan Kampanye Pemilu	2,380,000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,380,000
	- Uang Transport	2,380,000
B)	Konsultasi ke Provinsi terkait Penanganan Pelanggaran Kampanye	3,580,000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3,580,000
	- Penginapan Eselon III	600,000
	- Penginapan Staf	600,000
	- Uang Harian Eselon III	740,000
	- Uang Harian Staf	740,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ KOMPONEN INPUT/AKUN/ RINCIAN BELANJA	JUMLAH
	- Transport Eselon III	450,000
	- Transport Staf	450,000
303	Pengelolaan barang dugaan pelanggaran masa kampanye (Kab./Kota)	2,380,000
A)	Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu Tahapan Kampanye Pemilu	2,380,000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,380,000
	- Uang Transport	2,380,000
304	Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses masa kampanye (Kab./Kota)	4,004,000
A)	Konsultasi ke Provinsi terkait Penanganan Pelanggaran Kampanye	4,004,000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4,004,000
	- Penginapan Eselon III	1,024,000
	- Penginapan	600,000
	- Uang Harian	1,480,000
	- Transport	900,000
6843.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	254,655,000
6843.QIC.001	Pengawasan Masa Kampanye	254,655,000
301	Publikasi dan dokumentasi pengawasan masa kampanye (Kab./Kota)	40,770,000
A)	Peliputan Kegiatan Internal dan Eksternal	7,680,000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7,680,000
	- Uang Transport	4,080,000
	- Uang Harian Lebih dari 8 Jam	3,600,000
B)	Publikasi Kinerja Bawaslu di Tahapan Masa Kampanye	9,000,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	9,000,000
	- Iklan di Media Radio/Televisi	4,000,000
	- Talkshow di Radio (Blocking Time)	5,000,000
C)	Konsultasi Kehumasan ke Bawaslu Provinsi	5,370,000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5,370,000
	> Perjadin biasa	
	- Penginapan	1,800,000
	- Uang Harian	2,220,000
	- Transport	1,350,000
D)	Supervisi Kehumasan ke Kecamatan	960,000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	960,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ KOMPONEN INPUT/AKUN/ RINCIAN BELANJA	JUMLAH
	- Uang Transport	510,000
	- Uang Harian Lebih dari 8 Jam	450,000
	E) Penerbitan Buletin	13,110,000
521211	Belanja Bahan	11,650,000
	- Pencetakan Buletin Bawaslu Jateng	9,600,000
	- Belanja ATK	500,000
	- Komputer Supply	500,000
	> Rapat Penyusunan Buletin	
	- Konsumsi dan Snack	1,050,000
521213	Honor Output Kegiatan	1,460,000
	> Honorarium Tim Penyusunan Buletin	
	- Penanggung Jawab	400,000
	- Redaktur	300,000
	- Editor	250,000
	- Desain Grafis	180,000
	- Fotografer	180,000
	- Sekretariat	150,000
	F) Rakor Kehumasan dengan Panwascam dan Media	4,650,000
	> Rapat di Kantor dengan Eksternal	
521211	Belanja Bahan	2,000,000
	- Penggandaan/Fotocopy	200,000
	- Belanja ATK	200,000
	- Komputer Supply	200,000
	- Konsumsi dan snack	1,400,000
522151	Belanja Jasa Profesi	1,800,000
	- Narasumber	1,800,000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	850,000
	- Uang Transport	850,000
302	Pengawasan masa kampanye (Kab./Kota)	110,200,000
	A) Rapat Persiapan Pengawasan Tahapan Kampanye dan Laporan Dana Kampanye	3,600,000
	>> RAPAT BIASA (1)	
521211	Belanja Bahan	3,600,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ KOMPONEN INPUT/AKUN/ RINCIAN BELANJA	JUMLAH
	- Penggandaan/Fotocopy	700,000
	- Belanja ATK	400,000
	- Komputer Supply	400,000
	- Konsumsi dan Snack	2,100,000
	B) Pengawasan Laporan Dana Kampanye	5,100,000
	>> Pengawasan Laporan Dana Kampanye	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	
	- Uang Transport	5,100,000
	C) Rapat Koordinasi Pengawasan Kampanye dengan Stakeholder dan Peserta Pemilu	24,310,000
	>> Halfday (1)	
521211	Belanja Bahan	1,200,000
	- Penggandaan/Fotocopy	300,000
	- Spanduk	300,000
	- ATK	300,000
	- Komputer Supply	300,000
522151	Belanja Jasa Profesi	2,500,000
	- Narasumber Eselon III (Eksternal)	1,800,000
	- Moderator (Eksternal)	700,000
524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	20,610,000
	- Paket Rapat Halfday Panitia, Narasumber Es III, Moderator	410,000
	- Paket Rapat Halfday Peserta	10,250,000
	- Uang Harian Halfday Peserta	4,750,000
	- Uang Transport	5,200,000
	D) Rapat Koordinasi dan Konsolidasi Pengawasan Kampanye dan Laporan Dana Kampanye	6,500,000
	>> RAPAT BIASA (2)	
521211	Belanja Bahan	6,500,000
	- Penggandaan/Fotocopy	1,400,000
	- Belanja ATK	800,000
	- Komputer Supply	800,000
	- Konsumsi dan Snack	3,500,000
	E) Rapat Evaluasi Pengawasan Kampanye dan Laporan Dana Kampanye	2,800,000
	>> RAPAT BIASA	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ KOMPONEN INPUT/AKUN/ RINCIAN BELANJA	JUMLAH
521211	Belanja Bahan	2,800,000
	- Penggandaan/Fotocopy	300,000
	- Belanja ATK	350,000
	- Komputer Supply	400,000
	- Konsumsi dan Snack	1,750,000
F) Supervisi dan Monitoring Pengawasan Kampanye		2,550,000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	
	- Supervisi dan Monitoring	2,550,000
G) Fasilitas Penertiban Alat Peraga Kampanye dengan Stakeholder terkait		65,340,000
	> Rapat di Kantor dengan Eksternal	
521211	Belanja Bahan	2,000,000
	- Penggandaan/Fotocopy	200,000
	- Belanja ATK	200,000
	- Komputer Supply	200,000
	- Konsumsi dan snack	1,400,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	840,000
	- BBM Kendaraan Penertiban APK	840,000
522141	Belanja Sewa	42,000,000
	- Sewa Sarana Penertiban APK	42,000,000
522151	Belanja Jasa Profesi	1,800,000
	- Narasumber	1,800,000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	18,700,000
	- Uang Transport peserta eksternal	1,700,000
	- Uang Transport penertiban APK	17,000,000
303	Fasilitas sentra gakkumdu tahapan masa kampanye (Kab./Kota)	19,250,000
A) Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu pada Tahapan Kampanye Pemilu		8,750,000
521211	Belanja Bahan	8,750,000
	- Konsumsi dan Snack	8,750,000
B) Supervisi Pendampingan Sentra Gakkumdu dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu pada Tahapan Kampanye		10,500,000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10,500,000
	- Uang Transport	10,500,000
402	Pengawasan masa kampanye (Kecamatan)	57,885,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ KOMPONEN INPUT/AKUN/ RINCIAN BELANJA	JUMLAH
A)	Rapat Pengawasan Tahapan Kampanye	37,485,000
521211	Belanja Bahan	37,485,000
	- Konsumsi dan Snack	37,485,000
B)	Supervisi dan Monitoring Pengawasan Kampanye	20,400,000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	20,400,000
	- Supervisi dan Monitoring	20,400,000
	- Supervisi dan Monitoring (Karimun Jawa dan Kampung Laut)	-
501	Pengawasan masa kampanye (Kelurahan/Desa)	26,550,000
A)	Supervisi dan Monitoring Pengawasan Tahapan Kampanye	26,550,000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	26,550,000
	- Supervisi dan Monitoring	26,550,000
6845	PENGAWASAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA	1,022,130,000
6845.QCE	Penanganan Perkara	10,720,000
6845.QCE.001	Penanganan Pelanggaran Pemungutan dan Penghitungan Suara	10,720,000
301	Pengelolaan data penanganan pelanggaran pemungutan dan penghitungan suara (Kab./Kota)	2,380,000
A)	Validasi Data Penanganan Pelanggaran Pemungutan dan Penghitungan	2,380,000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,380,000
	- Uang Transport	2,380,000
302	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran pemungutan dan penghitungan suara (Kab./Kota)	5,960,000
A)	Pemetaan Potensi Pelanggaran Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	2,380,000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,380,000
	- Uang Transport	2,380,000
B)	Konsultasi ke Provinsi	3,580,000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3,580,000
	- Penginapan Eselon III	600,000
	- Penginapan Staf	600,000
	- Uang Harian Eselon III	740,000
	- Uang Harian Staf	740,000
	- Transport Eselon III	450,000
	- Transport Staf	450,000
303	Pengelolaan barang dugaan pelanggaran pemungutan dan penghitungan suara (Kab./Kota)	2,380,000
A)	Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	2,380,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ KOMPONEN INPUT/AKUN/ RINCIAN BELANJA	JUMLAH
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,380,000
	- Uang Transport	2,380,000
6845.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	1,011,410,000
6845.QIC.001	Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara	1,011,410,000
301	Publikasi dan dokumentasi pengawasan pemungutan dan penghitungan suara (Kab./Kota)	18,340,000
A)	Peliputan Kegiatan Internal dan Eksternal	3,840,000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,840,000
	- Uang Transport	2,040,000
	- Uang Harian Lebih dari 8 Jam	1,800,000
B)	Publikasi Kinerja Bawaslu di Tahapan pemungutan dan penghitungan suara	9,000,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	9,000,000
	- Iklan di Media Radio/Televisi	4,000,000
	- Talkshow di Radio (Blocking Time)	5,000,000
C)	Konsultasi Kehumasan ke Bawaslu Provinsi	3,580,000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3,580,000
	> Perjadin biasa	
	- Penginapan	1,200,000
	- Uang Harian	1,480,000
	- Transport	900,000
D)	Supervisi Kehumasan ke Kecamatan	1,920,000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,920,000
	- Uang Transport	1,020,000
	- Uang Harian Lebih dari 8 Jam	900,000
302	Pengawasan pemungutan dan penghitungan suara (Kab./Kota)	37,750,000
A)	Rapat Persiapan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara	2,650,000
	>> RAPAT BIASA (1)	
521211	Belanja Bahan	2,650,000
	- Penggandaan/Fotocopy	300,000
	- Belanja ATK	300,000
	- Komputer Supply	300,000
	- Konsumsi dan Snack	1,750,000
B)	Rapat Koordinasi Pengawasan Pemungutan Suara dengan PANWASLU Kecamatan	2,800,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ KOMPONEN INPUT/AKUN/ RINCIAN BELANJA	JUMLAH
	>> RAPAT BIASA (2)	
521211	Belanja Bahan	2,800,000
	- Penggandaan/Fotocopy	300,000
	- Belanja ATK	350,000
	- Komputer Supply	400,000
	- Konsumsi dan Snack	1,750,000
	C) Rapat Koordinasi Pengawasan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan	22,700,000
	>> HALFDAY (1)	
521211	Belanja Bahan	1,200,000
	- Penggandaan/Fotocopy	300,000
	- Spanduk	300,000
	- ATK	300,000
	- Komputer Supply	300,000
522151	Belanja Jasa Profesi	2,500,000
	- Narasumber Eselon III (Eksternal)	1,800,000
	- Moderator (Eksternal)	700,000
524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	19,000,000
	- Paket Rapat Halfday Panitia, Narasumber Es III, Moderator	1,050,000
	- Paket Rapat Halfday Peserta	7,500,000
	- Uang Harian Halfday Peserta	4,750,000
	- Uang Transport	5,700,000
	D) Supervisi dan Monitoring Pengawasan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara	6,800,000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	
	- Transport	3,400,000
	- Uang Harian Lebih dari 8 Jam	3,400,000
	E) Rapat Evaluasi Pengawasan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara	2,800,000
	>> RAPAT BIASA (1)	
521211	Belanja Bahan	2,800,000
	- Penggandaan/Fotocopy	300,000
	- Belanja ATK	350,000
	- Komputer Supply	400,000
	- Konsumsi dan Snack	1,750,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ KOMPONEN INPUT/AKUN/ RINCIAN BELANJA	JUMLAH
	F) Supervisi dan Monitoring Pengawasan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara	-
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	
	- Transport	-
	- Uang Harian Lebih dari 8 Jam	-
303	Facilitasi sentra gakkumdu tahapan pemungutan dan penghitungan suara (Kab./Kota)	12,100,000
	A) Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu pada Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	7,000,000
521211	Belanja Bahan	7,000,000
	- Konsumsi dan Snack	7,000,000
	B) Supervisi Pendampingan Sentra Gakkumdu dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu pada Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	5,100,000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5,100,000
	- Uang Transport	5,100,000
401	Publikasi dan dokumentasi pengawasan pemungutan dan penghitungan suara (Kecamatan)	0
	A) Publikasi Kinerja Bawaslu di Tahapan pemungutan dan penghitungan suara	0
521211	Belanja Bahan	0
	> Cetak bahan Publikasi	
	- Sticker Publikasi	DIHAPUS
402	Pengawasan pemungutan dan penghitungan suara (Kecamatan)	76,500,000
	A) Rapat Persiapan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara	12,750,000
521211	Belanja Bahan	12,750,000
	- Konsumsi dan Snack	12,750,000
	B) Supervisi dan Monitoring Pengawasan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara	51,000,000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	
	- Supervisi dan Monitoring	51,000,000
	C) Rapat Evaluasi Pengawasan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara	12,750,000
521211	Belanja Bahan	12,750,000
	- Konsumsi dan Snack	12,750,000
	D) Supervisi dan Monitoring Pengawasan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara	0
521211	Belanja Bahan	0
	- Supervisi dan Monitoring Demak	-
	E) Rapat Persiapan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara PSS Demak	0
521211	Belanja Bahan	0
	- Konsumsi dan Snack	0

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ KOMPONEN INPUT/AKUN/ RINCIAN BELANJA	JUMLAH
403	Pelatihan saksi partai politik (Kecamatan)	302,570,000
B)	ToT Pelatihan Saksi Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota	293,790,000
>>	Tot di 5 titik	
521211	Belanja Bahan	-
	- Belanja ATK	-
	- Spanduk	-
522151	Belanja Jasa Profesi	-
	- Narasumber	-
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-
	- Paket Rapat Fullday Panitia	-
	- Paket Rapat Fullday Peserta Pemilu Kab/Kot	-
	- Paket Rapat Fullday Peserta Pemilu Kecamatan	-
	- Uang Harian Fullday	-
	- Uang Transport	-
>>	Tot di 4 titik	
521211	Belanja Bahan	-
	- Belanja ATK	-
	- Spanduk	-
522151	Belanja Jasa Profesi	-
	- Narasumber	-
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-
	- Paket Rapat Fullday Panitia	-
	- Paket Rapat Fullday Peserta Pemilu Kab/Kot	-
	- Paket Rapat Fullday Peserta Kecamatan	-
	- Uang Harian Fullday	-
	- Uang Transport	-
>>	Tot di 3 titik	
521211	Belanja Bahan	1,200,000
	- Belanja ATK	600,000
	- Spanduk	600,000
522151	Belanja Jasa Profesi	10,800,000
	- Narasumber	10,800,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ KOMPONEN INPUT/AKUN/ RINCIAN BELANJA	JUMLAH
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	281,790,000
	- Paket Rapat Fullday Panitia	6,000,000
	- Paket Rapat Fullday Peserta Pemilu Kab/Kot	6,400,000
	- Paket Rapat Fullday Peserta Kecamatan	108,800,000
	- Uang Harian Fullday	57,570,000
	- Uang Transport	103,020,000
>>	Tot di 2 titik	
521211	Belanja Bahan	-
	- Belanja ATK	-
	- Spanduk	-
522151	Belanja Jasa Profesi	-
	- Narasumber	-
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-
	- Paket Rapat Fullday Panitia	-
	- Paket Rapat Fullday Peserta Pemilu Kab/Kot	-
	- Paket Rapat Fullday Peserta Kecamatan	-
	- Uang Harian Fullday	-
	- Uang Transport	-
>>	Tot di 1 titik	
521211	Belanja Bahan	-
	- Belanja ATK	-
	- Spanduk	-
522151	Belanja Jasa Profesi	-
	- Narasumber	-
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-
	- Paket Rapat Fullday Panitia	-
	- Paket Rapat Fullday Peserta Pemilu Kab/Kot	-
	- Paket Rapat Fullday Peserta Kecamatan	-
	- Uang Harian Fullday	-
	- Uang Transport	-
C)	Rapat Persiapan Pelaksanaan Bimtek Saksi Peserta Pemilu	8,780,000
521211	Belanja Bahan	3,340,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ KOMPONEN INPUT/AKUN/ RINCIAN BELANJA	JUMLAH
	- Belanja ATK	200,000
	- Spanduk	200,000
	- Konsumsi dan Snack	2,940,000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5,440,000
	- Uang Transport	5,440,000
501	Pengawasan pemungutan dan penghitungan suara (Kelurahan/Desa)	26,550,000
	A) Supervisi dan Monitoring Pengawasan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara	26,550,000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	
	- Supervisi dan Monitoring	26,550,000
	B) Supervisi dan Monitoring Pengawasan Pemungutan Suara Ulang	-
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	
	- Supervisi dan Monitoring 14 Kab/Kota	-
	C) Supervisi dan Monitoring Pengawasan Pemungutan Suara Susulan Demak	-
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	
	- Supervisi dan Monitoring Demak	-
601	Pengawasan pemungutan dan penghitungan suara (TPS)	537,600,000
	A) Pengganti Uang Makan PTPS	537,600,000
521211	Belanja Bahan	537,600,000
	- Pengganti Uang Makan PTPS	537,600,000
	B) Pengawasan Pemungutan Suara Ulang PTPS	0
521211	Belanja Bahan	0
	- Pengganti Uang Makan PTPS 14 Kab/Kota	0
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	-
	- Uang Transport PTPS 14 Kab/Kota	-
	C) Pengawasan Pemungutan Suara Susulan PTPS Demak	-
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	-
	- Uang Transport PTPS Demak	-
6848	PENGAWASAN LOGISTIK	289,960,000
6848.QCE	Penanganan Perkara	4,760,000
6848.QCE.001	Penanganan Pelanggaran Logistik	4,760,000
301	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran logistik (Kab./Kota)	2,380,000
	A) Pemetaan Potensi Pelanggaran Tahapan Logistik	2,380,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ KOMPONEN INPUT/AKUN/ RINCIAN BELANJA	JUMLAH
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,380,000
	- Uang Transport	2,380,000
302	Fasilitasi dan pengelolaan barang dugaan pelanggaran logistik (Kab./Kota)	2,380,000
A)	Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu Tahapan Logistik	2,380,000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,380,000
	- Uang Transport	2,380,000
6848.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	285,200,000
6848.QIC.001	Pengawasan Logistik	285,200,000
301	Publikasi dan dokumentasi pengawasan logistik (Kab./Kota)	21,090,000
A)	Peliputan Kegiatan Internal dan Eksternal	2,880,000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,880,000
	- Uang Transport	1,530,000
	- Uang Harian Lebih dari 8 Jam	1,350,000
B)	Publikasi Kinerja Bawaslu di Tahapan Pengawasan Logistik	9,000,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	9,000,000
	- Iklan di Media Radio/Televisi	4,000,000
	- Talkshow di Radio (Blocking Time)	5,000,000
C)	Konsultasi Kehumasan ke Bawaslu Provinsi	5,370,000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5,370,000
	> Perjadiin biasa	
	- Penginapan	1,800,000
	- Uang Harian	2,220,000
	- Transport	1,350,000
D)	Supervisi Kehumasan ke Kecamatan	3,840,000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,840,000
	- Uang Transport	2,040,000
	- Uang Harian Lebih dari 8 Jam	1,800,000
302	Pengawasan logistik (Kab./Kota)	28,485,000
A)	Pengawasan Logistik Bawaslu Kabupaten/Kota	28,485,000
521211	Belanja Bahan	1,200,000
	- Penggandaan/Fotocopy	300,000
	- Belanja ATK	300,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ KOMPONEN INPUT/AKUN/ RINCIAN BELANJA	JUMLAH
	- Komputer Supply	300,000
	- Spanduk	300,000
522151	Belanja Jasa Profesi	1,800,000
	- Narasumber	1,800,000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7,160,000
	> Pengawasan Logistik	
	- Penginapan	2,400,000
	- Uang Harian	2,960,000
	- Transport Eselon III	1,800,000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4,500,000
	> Pengawasan Logistik	
	- Transport	2,250,000
	- Uang Harian Lebih dari 8 Jam	2,250,000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	13,825,000
	- Paket Rapat Halfday Panitia, Narasumber Es III, Moderator	2,000,000
	- Paket Rapat Halfday Peserta	5,000,000
	- Uang Harian Halfday Panitia	950,000
	- Uang Harian Halfday Peserta	2,375,000
	- Uang Transport	3,500,000
303	Fasilitas sentra gakkumdu tahapan logistik (Kab./Kota)	5,200,000
	A) Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu pada Tahapan Logistik	3,500,000
521211	Belanja Bahan	3,500,000
	- Konsumsi dan Snack	3,500,000
	B) Supervisi Pendampingan Sentra Gakkumdu dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu pada Tahapan Logistik	1,700,000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,700,000
	- Uang Transport	1,700,000
401	Publikasi dan dokumentasi pengawasan logistik (Kecamatan)	15,300,000
	A) Publikasi dan dokumentasi pengawasan logistik (Kecamatan)	15,300,000
524113	Perjalanan Dinas Dalam Kota	15,300,000
	Pengawasan/Supervisi/ Monitoring	15,300,000
	Pengawasan/Supervisi/ Monitoring (Karimun Jawa dan Kampung laut)	-

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ KOMPONEN INPUT/AKUN/ RINCIAN BELANJA	JUMLAH
402	Pengawasan logistik (Kecamatan)	15,300,000
A)	Pengawasan logistik (Kecamatan)	15,300,000
524113	Perjalanan Dinas Dalam Kota	15,300,000
	Supervisi/ Monitoring	15,300,000
	Pengawasan/Supervisi/ Monitoring (Karimun Jawa dan Kampung laut)	-
501	Pengawasan logistik (Kelurahan/Desa)	39,825,000
A)	Pengawasan logistik (Kelurahan/Desa)	39,825,000
524113	Perjalanan Dinas Dalam Kota	39,825,000
	Supervisi/ Monitoring	39,825,000
601	Pengawasan logistik (TPS)	160,000,000
B)	Pengawasan logistik	160,000,000
524113	Perjalanan Dinas Dalam Kota	160,000,000
	Supervisi/ Monitoring	160,000,000
6844	PENGAWASAN MASA TENANG	773,404,000
6844.QCE	Penanganan Perkara	12,344,000
6844.QCE.001	Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Masa Tenang	12,344,000
301	Pengelolaan data penanganan pelanggaran masa tenang (Kab./Kota)	5,960,000
A)	Validasi Data Penanganan Pelanggaran Masa Tenang	2,380,000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,380,000
	- Uang Transport	2,380,000
B)	Konsultasi ke Provinsi	3,580,000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3,580,000
	- Penginapan Eselon III	600,000
	- Penginapan Staf	600,000
	- Uang Harian Eselon III	740,000
	- Uang Harian Staf	740,000
	- Transport Eselon III	450,000
	- Transport Staf	450,000
302	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran masa tenang (Kab./Kota)	1,190,000
A)	Pemetaan Potensi Pelanggaran Tahapan Masa Tenang	1,190,000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,190,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ KOMPONEN INPUT/AKUN/ RINCIAN BELANJA	JUMLAH
	- Uang Transport	1,190,000
303	Pengelolaan barang dugaan pelanggaran masa tenang (Kab./Kota)	1,190,000
A)	Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu Tahapan Masa Tenang	1,190,000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,190,000
	- Uang Transport	1,190,000
304	Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses masa tenang (Kab./Kota)	4,004,000
A)	Konsultasi ke Provinsi	4,004,000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4,004,000
	- Penginapan Eselon III	1,024,000
	- Penginapan	600,000
	- Uang Harian	1,480,000
	- Transport	900,000
6844.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	761,060,000
6844.QIC.001	Pengawasan Masa Tenang	761,060,000
301	Publikasi dan dokumentasi pengawasan masa tenang (Kab./Kota)	10,920,000
A)	Peliputan Kegiatan Internal dan Eksternal	640,000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	640,000
	- Uang Transport	340,000
	- Uang Harian Lebih dari 8 Jam	300,000
B)	Publikasi Kinerja Bawaslu di Tahapan Masa Tenang	9,000,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	9,000,000
	- Iklan di Media Radio/Televisi	4,000,000
	- Talkshow di Radio (Blocking Time)	5,000,000
C)	Supervisi Kehumasan ke Kecamatan	1,280,000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,280,000
	- Uang Transport	680,000
	- Uang Harian Lebih dari 8 Jam	600,000
302	Pengawasan masa tenang (Kab./Kota)	145,125,000
A)	Rapat Koordinasi Persiapan Pengawasan Masa Tenang dengan Bawaslu Kab/Kota	2,650,000
521211	Belanja Bahan	2,650,000
	- Penggandaan/Fotocopy	300,000
	- Belanja ATK	300,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ KOMPONEN INPUT/AKUN/ RINCIAN BELANJA	JUMLAH
	- Komputer Supply	300,000
	- Konsumsi dan Snack	1,750,000
	B) Rapat Koordinasi dan Konsolidasi Pengawasan Persiapan Pengawasan Masa Tenang dengan Peserta Pemilu d	33,215,000
521211	Belanja Bahan	1,850,000
	- Penggandaan/Fotocopy	500,000
	- Spanduk	350,000
	- ATK	500,000
	- Komputer Supply	500,000
522151	Belanja Jasa Profesi	2,500,000
	- Narasumber Eselon III (Eksternal)	1,800,000
	- Moderator (Eksternal)	700,000
524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	28,865,000
	- Paket Rapat Halfday Eselon II	1,600,000
	- Paket Rapat Halfday Panitia, Narasumber Es III, Moderator	1,400,000
	- Paket Rapat Halfday Peserta	10,000,000
	- Uang Harian Halfday Peserta	6,175,000
	- Uang Transport	9,690,000
	C) Apel Siaga Tahapan Pengawasan Pemilu 2024	104,160,000
521211	Belanja Bahan	20,660,000
	- Penggandaan/Fotocopy	300,000
	- Spanduk	300,000
	- Belanja ATK	300,000
	- Komputer Supply	300,000
	- Konsumsi dan Snack Panwascam	3,570,000
	- Konsumsi dan Snack PPD/K	12,390,000
	- Konsumsi dan Snack Peserta Eksternal	2,100,000
	- Konsumsi dan Snack Internal	1,400,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1,000,000
	- Biaya Kebersihan	1,000,000
522141	Belanja Sewa	47,000,000
	- Sewa Panggung	15,000,000
	- Sewa Tempat	20,000,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ KOMPONEN INPUT/AKUN/ RINCIAN BELANJA	JUMLAH
	- Sewa Peralatan	12,000,000
522151	Belanja Jasa Profesi	4,300,000
	- Narasumber Eselon III (Eksternal)	3,600,000
	- Moderator (Eksternal)	700,000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	31,200,000
	- Transport Internal	3,400,000
	Transport Panwascam	5,100,000
	Transport PPD/K	17,700,000
	Transport Peserta Eksternal	3,000,000
	Transport Internal	2,000,000
D) Patroli Pengawasan Pengawasan Masa Tenang		5,100,000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	
	- Supervisi dan Monitoring	5,100,000
303	Fasilitas sentra gakkumdu tahapan masa tenang (Kab./Kota)	3,450,000
A) Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu pada Tahapan Masa Tenang		1,750,000
521211	Belanja Bahan	1,750,000
	- Konsumsi dan Snack	1,750,000
B) Supervisi Pendampingan Sentra Gakkumdu dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu pada Tahapan Masa Tenang		1,700,000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,700,000
	- Uang Transport	1,700,000
401	Publikasi dan dokumentasi pengawasan masa tenang (Kecamatan)	0
A) Publikasi Kinerja Bawaslu di Tahapan Masa Tenang		0
521211	Belanja Bahan	0
	> Cetak bahan Publikasi	
	- Sticker Publikasi	DIHAPUS
402	Pengawasan masa tenang (Kecamatan)	575,015,000
A) Patroli Pengawasan Pengawasan Masa Tenang		51,000,000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	51,000,000
	- Supervisi dan Monitoring	51,000,000
B) Apel Siaga Tahapan Pengawasan Pemilu 2024		479,815,000
521211	Belanja Bahan	167,040,000
	- Spanduk	10,200,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ KOMPONEN INPUT/AKUN/ RINCIAN BELANJA	JUMLAH
	Konsumsi dan Snack Internal Panwascam	8,160,000
	Konsumsi dan Snack Eksternal Panwascam	13,600,000
	Konsumsi dan Snack PPD/K	7,080,000
	Konsumsi dan Snack PTPS	128,000,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	5,100,000
	- Biaya Kebersihan	5,100,000
522141	Belanja Sewa	13,600,000
	- Sewa Peralatan (sound system, dll)	13,600,000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	294,075,000
	Transport Internal Panwascam	15,300,000
	Transport Eksternal Panwascam	25,500,000
	Transport PPD/K	13,275,000
	Transport PTPS	240,000,000
C) Koordinasi Penertiban APK		44,200,000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	44,200,000
	- Uang Transport Peserta Eksternal	27,200,000
	- Uang Transport Penertiban APK	17,000,000
501	Pengawasan masa tenang (Kelurahan/Desa)	26,550,000
A) Patroli Pengawasan Pengawasan Masa Tenang		26,550,000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	26,550,000
	- Supervisi dan Monitoring	26,550,000
6846	PENGAWASAN PENETAPAN HASIL PEMILU	410,372,000
6846.QCE	Penanganan Perkara	5,960,000
6846.QCE.001	Penanganan Pelanggaran Penetapan Hasil Pemilu	5,960,000
301	Pengelolaan data penanganan pelanggaran penetapan hasil pemilu (Kab./Kota)	4,770,000
A) Validasi Data Penanganan Pelanggaran Penetapan Hasil Pemilu		1,190,000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,190,000
	- Uang Transport	1,190,000
B) Konsultasi ke Provinsi		3,580,000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3,580,000
	- Penginapan Eselon III	600,000
	- Penginapan Staf	600,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ KOMPONEN INPUT/AKUN/ RINCIAN BELANJA	JUMLAH
	- Uang Harian Eselon III	740,000
	- Uang Harian Staf	740,000
	- Transport Eselon III	450,000
	- Transport Staf	450,000
302	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran penetapan hasil pemilu (Kab./Kota)	1,190,000
A)	Pemetaan Potensi Pelanggaran Tahapan Penetapan Hasil Pemilu	1,190,000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,190,000
	- Uang Transport	1,190,000
6846.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	404,412,000
6846.QIC.001	Pengawasan Penetapan Hasil Pemilu	404,412,000
301	Publikasi dan dokumentasi pengawasan penetapan hasil pemilu (Kab./Kota)	16,290,000
A)	Peliputan Kegiatan Internal dan Eksternal	1,920,000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,920,000
	- Uang Transport	1,020,000
	- Uang Harian Lebih dari 8 Jam	900,000
B)	Publikasi Kinerja Bawaslu di Tahapan Penetapan Hasil Pemilu	9,000,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	9,000,000
	- Iklan di Media Radio/Televisi	4,000,000
	- Talkshow di Radio (Blocking Time)	5,000,000
C)	Konsultasi Kehumasan ke Bawaslu Provinsi	5,370,000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5,370,000
	> Perjadin biasa	
	- Penginapan	1,800,000
	- Uang Harian	2,220,000
	- Transport	1,350,000
302	Pengawasan penetapan hasil pemilu (Kab./Kota)	25,440,000
A)	Pengawasan Penetapan Hasil Bawaslu Kabupaten/Kota	25,440,000
521211	Belanja Bahan	1,200,000
	- Penggandaan/Fotocopy	300,000
	- Belanja ATK	300,000
	- Komputer Supply	300,000
	- Spanduk	300,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ KOMPONEN INPUT/AKUN/ RINCIAN BELANJA	JUMLAH
522151	Belanja Jasa Profesi	1,800,000
	- Narasumber	1,800,000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,840,000
	> Pengawasan	
	- Transport	2,040,000
	- Uang Harian Lebih dari 8 Jam	1,800,000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	18,600,000
	- Paket Rapat Halfday Panitia, Narasumber Es III, Moderator	2,000,000
	- Paket Rapat Halfday Peserta	6,000,000
	- Uang Harian Halfday Panitia	950,000
	- Uang Harian Halfday Peserta	2,850,000
	- Uang Transport	6,800,000
303	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan penetapan hasil pemilu (Kab./Kota)	3,450,000
	A) Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu pada Tahapan Penetapan Hasil Pemilu	1,750,000
521211	Belanja Bahan	1,750,000
	- Konsumsi dan Snack	1,750,000
	B) Supervisi Pendampingan Sentra Gakkumdu dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu pada Tahapan Penetapa	1,700,000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,700,000
	- Uang Transport	1,700,000
304	Fasilitasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (Kab./Kota)	343,932,000
	A) Rapat Koordinasi Persiapan Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum	7,900,000
	- Penggandaan/Fotocopy	800,000
	- Belanja ATK	500,000
	- Komputer Supply	1,000,000
	- Konsumsi dan Snack	5,600,000
	B) Fasilitasi Perjalanan Dinas Menghadiri Sidang PHPU	329,032,000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	329,032,000
	> Perjalanan Dinas	
	- Penginapan Eselon III	95,232,000
	- Penginapan	45,990,000
	- Uang Harian	84,800,000
	- Tiket Pesawat PP	85,098,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ KOMPONEN INPUT/AKUN/ RINCIAN BELANJA	JUMLAH
	- Transport	17,912,000
	> Perjalanan Dinas Klaten	0
	- Penginapan Eselon III	0
	- Penginapan	0
	- Uang Harian	0
	- Tiket Pesawat PP	0
	- Transport	0
	> Perjalanan Dinas Sukoharjo	0
	- Penginapan Eselon III	0
	- Penginapan	0
	- Uang Harian	0
	- Tiket Pesawat PP	0
	- Transport	0
	> Perjalanan Dinas Kab. Magelang	0
	- Penginapan Eselon III	0
	- Penginapan	0
	- Uang Harian	0
	- Tiket Pesawat PP	0
	- Transport	0
	C) Fasilitas Perselisihan Hasil Pemilihan Umum	7,000,000
521211	Belanja Bahan	7,000,000
	- Keperluan Administrasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum	7,000,000
	- Keperluan Administrasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Klaten	0
	- Keperluan Administrasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Sukoharjo	0
	- Keperluan Administrasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kab. Magelang	0
401	Fasilitas Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (Kecamatan)	15,300,000
	A) Pengawasan Penetapan Hasil Pemilu (Kecamatan)	15,300,000
524113	Perjalanan Dinas Dalam Kota	15,300,000
	Supervisi/ Monitoring	15,300,000
	Pengawasan/Supervisi/ Monitoring (Karimun Jawa dan Kampung laut)	-

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ KOMPONEN INPUT/AKUN/ RINCIAN BELANJA	JUMLAH
6847	PENGAWASAN PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SERTA ANGGOTA DPR, DP	11,920,000
6847.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	11,920,000
6847.QIC.001	Publikasi Pengawasan Sumpah Janji	5,960,000
301	Publikasi dan dokumentasi pengawasan pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wapres serta Anggota DPR, D	5,960,000
A)	Peliputan Kegiatan Internal dan Eksternal	960,000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	960,000
	- Uang Transport	510,000
	- Uang Harian Lebih dari 8 Jam	450,000
B)	Publikasi dan dokumentasi pengawasan pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wapres serta Anggota DPR, D	5,000,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	5,000,000
	- Talkshow di Radio (Blocking Time)	5,000,000
6847.QIC.002	Pengawasan Pengucapan Sumpah Janji	5,960,000
301	Pengawasan pengawasan pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wapres serta Anggota DPR, DPD dan DPRD	5,960,000
A)	Peliputan Kegiatan Internal dan Eksternal	960,000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	960,000
	- Uang Transport	510,000
	- Uang Harian Lebih dari 8 Jam	450,000
B)	Publikasi Kinerja Bawaslu di Tahapan Pengawasan Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden se	5,000,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	5,000,000
	- Talkshow di Radio (Blocking Time)	5,000,000
115.WA	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	1,544,444,000
4355	PEMERIKSAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN INTERNAL	3,200,000
4355.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	3,200,000
4355.EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja	3,200,000
301	Implementasi reformasi birokrasi Bawaslu dan Bawaslu Kabupaten/Kota	3,200,000
A)	Rapat Koordinasi Reformasi birokrasi Bawaslu Kabupaten/Kota	3,200,000
521211	Belanja Bahan	1,400,000
	> Rapat Biasa	
	- Konsumsi	1,400,000
522151	Belanja Jasa Profesi	1,800,000
	- Narasumber	1,800,000
4356	PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI	7,430,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ KOMPONEN INPUT/AKUN/ RINCIAN BELANJA	JUMLAH
4356.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	7,430,000
4356.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Bawaslu	3,840,000
301	Pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi serta informasi publik Bawaslu Kabupaten/Kota	3,840,000
A)	Peliputan Kegiatan Internal dan Eksternal	3,840,000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,840,000
	- Uang Transport	2,040,000
	- Uang Harian Lebih dari 8 Jam	1,800,000
4356.EBA.963	Layanan Data dan Informasi	3,590,000
301	Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik Bawaslu Kabupaten/Kota	3,590,000
A)	Pengelolaan PPID Bawaslu Kabupaten/Kota	3,590,000
521211	Belanja Bahan	1,790,000
	> Rapat di Kantor	
	- Pencetakan Buku Seputar PPID	600,000
	- Belanja ATK	100,000
	- Komputer Supply	100,000
	- Konsumsi dan Snack	990,000
522151	Belanja Jasa Profesi	1,800,000
	- Narasumber	1,800,000
6849	PENGELOLAAN KEUANGAN, BMN, DAN UMUM	1,511,424,000
6849.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1,497,162,000
6849.EBA.956	Layanan BMN	3,580,000
301	Pengelolaan BMN Bawaslu Kabupaten/Kota	3,580,000
A)	Pengelolaan BMN Bawaslu Kabupaten/Kota	3,580,000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3,580,000
	> KOORDINASI KE PROVINSI	3,580,000
	- Penginapan	1,200,000
	- Uang Harian	1,480,000
	- Transport	900,000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	-
	> Bawaslu Kota Semarang	-
	- Uang Harian	-
	- Transport	-

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ KOMPONEN INPUT/AKUN/ RINCIAN BELANJA	JUMLAH
6849.EBA.994	Layanan Perkantoran	1,493,582,000
001	Gaji dan Tunjangan	741,812,000
C)	Gaji dan Tunjangan Bawaslu Kabupaten/Kota	741,812,000
511332	Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	741,812,000
	-- Tipe A	
	Ketua	138,492,000
	Anggota	-
	Anggota	499,968,000
	-- Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas	
	Ketua	20,671,000
	Anggota	-
	Anggota	82,681,000
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	751,770,000
B)	Operasional dan Pemeliharaan Kantor Bawaslu Kabupaten/Kota	751,770,000
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	549,950,000
	- Honorarium Non PNS	450,950,000
	Honor Pelaksana Teknis	291,200,000
	Inkin Pelaksana Teknis	72,000,000
	Satpam	59,800,000
	Pramubakti	27,950,000
	- Keperluan Sehari-hari Perkantoran	45,000,000
	Keperluan Sehari-hari Perkantoran	-
	Keperluan Sehari-hari Perkantoran Karanganyar	45,000,000
	- Jamuan Tamu	36,000,000
	Jamuan Tamu (Konsumsi dan Snack)	-
	Jamuan Tamu (Konsumsi dan Snack) Karanganyar	36,000,000
	Jamuan Tamu (Konsumsi dan Snack) Kendal	-
	- Langganan Internet	12,000,000
	Langganan Internet	-
	Langganan Internet Kota Tegal dan Karanganyar	12,000,000
	- Langganan Aplikasi Video Conference	6,000,000
	Pengadaan Lisensi Aplikasi Video Conference	6,000,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ KOMPONEN INPUT/AKUN/ RINCIAN BELANJA	JUMLAH
	Pengadaan Lisensi Aplikasi Video Conference Demak	-
	Pengadaan Lisensi Aplikasi Video Conference Kota Tegal	-
521114	Belanja pengiriman surat dinas pos pusat	6,006,000
	Jasa Pengiriman Surat	6,006,000
	Jasa Pengiriman Surat Demak	-
	Jasa Pengiriman Surat Kota Tegal	-
521115	Honor Operasional Satuan Kerja	17,904,000
	- Honorarium Pengelola Keuangan Non Satker Mandiri	
	Pejabat Pembuat Komitmen	-
	Pejabat Pembuat Komitmen	-
	Pejabat Pembuat Komitmen	14,016,000
	Bendahara Pengeluaran Pembantu	-
	Bendahara Pengeluaran Pembantu	-
	Bendahara Pengeluaran Pembantu	3,888,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	22,800,000
	Pakaian Dinas (Tipe A)	
	Ketua/Anggota (5 Orang)	6,000,000
	Ketua/Anggota (3 Orang)	-
	Kepala Sekretariat/Koordinator Sekretariat	1,200,000
	Staf Teknis PNS	2,400,000
	Staf Teknis Non PNS	9,600,000
	Satpam	2,400,000
	Petugas Kebersihan	1,200,000
522111	Belanja Langganan Listrik	42,000,000
	Langganan Listrik	-
	Langganan Listrik Kudus, Pati, Pemalang, Kota Semarang	-
	Langganan Listrik Demak	-
	Langganan Listrik Kota Tegal	-
	Langganan Listrik Karanganyar	42,000,000
522112	Belanja Langganan Telepon	6,000,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ KOMPONEN INPUT/AKUN/ RINCIAN BELANJA	JUMLAH
	Langganan Telepon	6,000,000
	Langganan Telepon Demak	-
	Langganan Telepon Kota Tegal	-
522113	Belanja Langganan Air	4,200,000
	Air PAM	-
	Air PAM Demak	-
	Air PAM Karanganyar	4,200,000
522141	Belanja Sewa	-
	Sewa Gedung kantor	-
523111	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	36,450,000
	Pemeliharaan Gedung Kantor	33,950,000
	Pemeliharaan Halaman Kantor	2,500,000
	Pemeliharaan Halaman Kantor Kendal	-
523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	66,460,000
	- Kendaraan Operasional/Pejabat	36,880,000
	Kendaraan Dinas Operasional Pinjam Pakai Roda 4	34,880,000
	Kendaraan Dinas Operasional Pinjam Pakai Roda 2	-
	Pajak Kendaraan Roda 4	2,000,000
	Pajak Kendaraan Roda 2	-
	- Pemeliharaan Inventaris Kantor	29,580,000
	PC/Laptop	9,490,000
	Printer	6,900,000
	AC	4,880,000
	BBM Genset	7,190,000
	Inventaris Kantor	1,120,000
6849.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	14,262,000
6849.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	3,020,000
301	Penyusunan rencana kerja dan anggaran Bawaslu Kabupaten/Kota	3,020,000
A)	Rapat Pembahasan Anggaran APBN	3,020,000
521211	Belanja Bahan	1,220,000
	- Penggandaan/Fotocopy	245,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ KOMPONEN INPUT/AKUN/ RINCIAN BELANJA	JUMLAH
	- Belanja ATK	300,000
	- Komputer Supply	300,000
	- Snack	375,000
522151	Belanja Jasa Profesi	1,800,000
	- Narasumber	1,800,000
6849.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	3,580,000
301	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Bawaslu Kabupaten/Kota	3,580,000
A)	Konsultasi dan Koordinasi Laporan Pelaksanaan Program/Kegiatan dan Anggaran	3,580,000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3,580,000
	> KOORDINASI KE PROVINSI	3,580,000
	- Penginapan	1,200,000
	- Uang Harian	1,480,000
	- Transport	900,000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	-
	> Bawaslu Kota Semarang	-
	- Uang Harian	-
	- Transport	-
6849.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	3,450,000
301	Pengelolaan administrasi keuangan Bawaslu Kabupaten/Kota	3,450,000
A)	Pengelolaan administrasi keuangan Bawaslu Kabupaten/Kota	3,450,000
521211	Belanja Bahan	900,000
	- Konsumsi dan Snack Rapat Biasa	900,000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,550,000
	- Transport Koordinasi	2,550,000
6849.EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan Bawaslu	4,212,000
301	Pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan Bawaslu Kabupaten/Kota	4,212,000
A)	Pengelolaan Kearsipan Bawaslu Kabupaten/Kota	4,212,000
521211	Belanja Bahan	1,732,000
	- Belanja ATK	271,000
	- Komputer Supply	271,000
	- Konsumsi dan Snack Rapat Biasa	1,190,000
522151	Belanja Jasa Profesi	1,800,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ KOMPONEN INPUT/AKUN/ RINCIAN BELANJA	JUMLAH
	- Narasumber	1,800,000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	680,000
	- Transport	680,000
6850	PENGELOLAAN ORGANISASI DAN SDM	22,390,000
6850.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	17,280,000
6850.EBA.957	Layanan Hukum	9,080,000
301	Fasilitasi pengelolaan layanan hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota	4,800,000
A)	Rapat pengelolaan layanan hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota	4,800,000
521211	Belanja Bahan	3,000,000
	- Penggandaan/Fotocopy	300,000
	- Belanja ATK	250,000
	- Komputer Supply	350,000
	- Konsumsi dan Snack	2,100,000
522151	Belanja Jasa Profesi	1,800,000
	- Narasumber	1,800,000
302	Kajian hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota	4,280,000
A)	Rapat Identifikasi Permasalahan Perbawaslu/Produk Hukum Non Perbawaslu	4,280,000
521211	Belanja Bahan	2,480,000
	- Penggandaan/Fotocopy	300,000
	- Belanja ATK	430,000
	- Komputer Supply	350,000
	- Konsumsi dan Snack	1,400,000
522151	Belanja Jasa Profesi	1,800,000
	- Narasumber	1,800,000
6850.EBA.962	Layanan Umum	3,200,000
301	Fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu Kabupaten/Kota	3,200,000
A)	Fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu Kabupaten/Kota	3,200,000
521211	Belanja Bahan	1,400,000
	> Rapat Biasa	
	- Konsumsi dan snack	1,400,000
522151	Belanja Jasa Profesi	1,800,000
	- Narasumber	1,800,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ KOMPONEN INPUT/AKUN/ RINCIAN BELANJA	JUMLAH
6850.EBA.969	Layanan Bantuan Hukum	5,000,000
301	Bantuan Hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota	5,000,000
A)	Jasa Konsultan (Advokat)	5,000,000
522151	Belanja Jasa Profesi	5,000,000
	- Jasa Konsultan Advokat	5,000,000
6850.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	5,110,000
6850.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	5,110,000
301	Manajemen SDM pengawas dan kesekretariatan Bawaslu Kabupaten/Kota	5,110,000
A)	Peningkatan Kapasitas dan SDM Bawaslu Kabupaten/Kota	3,200,000
521211	Belanja Bahan	1,400,000
	> Rapat Biasa	
	- Konsumsi	1,400,000
522151	Belanja Jasa Profesi	1,800,000
	- Narasumber	1,800,000
B)	Pembinaan Kode Etik bagi Pengawas Ad-hoc	1,910,000
521211	Belanja Bahan	1,400,000
	> RAPAT BIASA	
	- Konsumsi	1,400,000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	510,000
	- Transport Koordinasi	510,000
TOTAL ANGGARAN 2024		13,737,726,000

Semarang, Juni 2024
Plt. KEPALA SEKRETARIAT,

Tri Adiyanto Baay, S.STP., M.Ec.Dev.